

**PERAN PEMERINTAH DESA SUNTRI KECAMATAN GUNEM
KABUPATEN REMBANG DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI
(Studi Pasal 23 Peraturan Desa Suntri Nomor 06 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Oleh:

DUL MANAN
NIM: 132111118

**JURUSAN AHWAL AS-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2017

Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph.D.

Perum Depag IV/7 Tambakaji Ngaliyan, Semarang

Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum.

Jl. Bukit Agung E. 41 Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr: Dul Manan

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Dul Manan

NIM : 132111118

Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyah

Judul Skripsi : **Peran Pemerintah Desa Suntri Kec. Gunem Kab. Rembang Dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Pasal 23 Peraturan Desa Suntri Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.


Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 5 Desember 2017

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph.D.
NIP. 195906061989031002


Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum.
NIP. 196312191999032001



**KEMENTERIAN AGAMA R.I.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291 Semarang
50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Dul Manan

NIM : 132111118

Judul : **PERAN PEMERINTAH DESA SUNTRI KECAMATAN GUNEM
KABUPATEN REMBANG DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN
DINI (Studi Pasal 23 Peraturan Desa Suntri Nomor 06 Tahun 2014
Tentang Perindungan Anak)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumluade/baik/cukup, pada tanggal 27 Desember 2017 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2016/2017.

Semarang, 27 Desember 2017

Ketua / Penguji

Yunita Dewi Septiana, M.A
NIP.197606272005012003

Sekretaris / Penguji

Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum
NIP. 196312191999032001

Penguji Utama I

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H
NIP. 197111012006041003

Penguji II

Nur Hidayati Setyani, SH., M.H
NIP. 196703201993032001



Pembimbing I

Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D
NIP. 195906061989031002

Pembimbing II

Hj. Briliyan Erna Wati, SH., M.Hum
NIP. 196312191999032001

PERSEMBAHAN

Dengan melewati berbagai halangan dan hambatan akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sesuai kemampuan penulis. Untuk itu, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Bapak saya H. Ruslan dan Ibu saya Hj. Kiswati tercinta, atas cucuran keringat, curahan perhatian, kasih sayang dan doa, serta yang membesarkan dan mendidik dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, yang tak mungkin dapat kubalas dengan apapun.
2. Kakek saya H. Sukahar dan Nenek Saya Hj. Sulastri, yang selama ini telah mencurahkan perhatian, kasih sayang dan doanya.
3. Kakakku tercinta Masrukin S.Pd., yang senantiasa memberikan motivasi dalam menempuh kuliah di UIN Walisongo Semarang.
4. Izzati Rizqi Annisa penyejuk suasana hati yang memantik semangat saya.
5. Segenap teman-temanku BM Kos dan Salman Kos
6. Teman-teman posko 29 KKN MIT 3
7. Teman-Teman seperjuangan Hukum Perdata Islam angkatan 2013 yang tidak dapat saya sebut satu persatu.

Semoga Allah selalu memberi keselamatan di dunia dan akhirat dengan penuh kesenangan dan kebahagiaan. Amin Ya rabbal ‘alamin.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, 5 Desember 2017
Deklarator

DUL MANAN
NIM:132111118

ABSTRAK

Pemerintah Desa Suntri Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang membuat peraturan desa (Perdes) Nomor 06 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dijelaskan dalam pasal 23 ayat (1) Pemerintah Desa Suntri bertanggungjawab mencegah pernikahan dini. Dalam Perdes Suntri Nomor 06 Tahun 2014 mengatur batasan minimal usia menikah yaitu dalam pasal 1 ayat (10) pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan diusia anak. Diperjelas pasal 1 ayat (1) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Penelitian ini bertujuan (a) untuk mengetahui peran Pemerintah Desa Suntri dalam mencegah pernikahan dini, apakah Pemerintah Desa Suntri sudah mengimplementasikan pasal yang telah ia buat. (b) untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Perdes Suntri Nomor 06 Tahun 2014 terkait batasan minimal usia pernikahan.

Penelitian ini adalah lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan tema penelitian ini, khususnya Desa Suntri Kec. Gunem Kab. Rembang. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa Peraturan Desa Suntri, dokumentasi kegiatan sosialisasi. Analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian menyimpulkan Pemerintah Desa Suntri sudah mengimplementasikan Peraturan Desa Suntri No. 06 Tahun 2014 terkait perannya dalam mencegah pernikahan dini. Dalam hal upaya tersebut peran yang dilakukan Pemerintah Desa Suntri adalah meningkatkan kinerja KPAD, sosialisasi bahaya menikah dini, menolak atau menasehati calon mempelai yang belum mencapai umur 18 tahun. Hanya saja perannya tersebut dirasa belum maksimal karena masih ada beberapa kendala yaitu struktur hukumnya yang dalam memberikan sosialisasi bahaya menikah dini masih kurang terprogram dan terstruktur, substansi hukumnya secara hierarki berbenturan dengan undang-undang yang lebih tinggi yaitu UU Perkawinan 1974, lalu secara kultur hukum masyarakat di Desa Suntri masih memegang teguh tradisi *ngemblok* (tradisi perjudohan) dan kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya menikah diusia cukup umur. Mengenai batasan minimal usia menikah dalam Perdes Suntri No.06 Tahun 2014, tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Batasan minimal usia menikah merupakan masalah *ijtihadiah* untuk menjawab tantangan zaman yang semakin terus berkembang.

Kata Kunci: Pencegahan, Pernikahan Dini, Peran

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Suntri Kec. Gunem Kab. Rembang Dalam Mencegah Pernikahan Dini (Studi Pasal 23 Peraturan Desa Suntri Nomor 06 Tentang Perlindungan Anak)” dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph. D dan Hj. Brilliyah Erna Wati, SH. M.Hum selaku pembimbing I dan II yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, masukan, kemudahan dan pandangan positif kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
2. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.A selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. H. A. Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Anthin Latifah, M.Ag, selaku ketua jurusan Hukum Keluarga dan Ibu Yunita Dewi Septiani M.A selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga.
5. Segenap Dosen pengajar Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap karyawan akademik Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

7. Seluruh keluarga besar penulis : Bapak, Ibu, Kakak, dan semua keluarga yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kalian semua adalah semangat hidup bagi penulis yang telah memberikan do'a, kasih sayang, dukungan agar selalu melangkah dengan optimis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan-rekanku, sahabat-sahabatku semua yang selalu memberi dukungan dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuannya baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian terimakasih serta do'a semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan.

Semarang, 5 Desember 2017

Penulis,

DUL MANAN

NIM: 132111118

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN	18
A. Pengertian Pernikahan	18
B. Hukum Pernikahan	21
C. Rukun dan Syarat Pernikahan	24
D. Tujuan Pernikahan	26

E.	Hikmah Melakukan Pernikahan.....	29
F.	Konsep Batas Usia Pernikahan	30
	1. Batas Usia Pernikahan Menurut Hukum Positif	31
	2. Batas Usia Pernikahan Menurut Hukum Islam	34
G.	Kewajiban dan Tanggungjawab dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	43
H.	Sistem Hukum.....	45
I.	Hierarki atau Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan	46

**BAB III GAMBARAN UMUM DESA SUNTRI DAN PERAN
PEMERINTAH DESA SUNTRI KECAMATAN GUNEM
KABUPATEN REMBANG DALAM MENCEGAH
PERNIKAHAN DINI.....**

A.	Gambaran Umum Desa Suntri Kecamatan Gunem	49
	1. Letak Geografis	49
	2. Kondisi Demografis.....	50
	A. Kondisi Penduduk	50
	B. Kondisi Pendidikan	52
	C. Kondisi Sosial Ekonomi.....	55
	D. Kondisi Keagamaan	56
	E. Kondisi Sosial Budaya	58
	3. Struktur dan Anggota Kelembaga	58
B.	Gambaran Umum Peran Pemerintah Desa Suntri dalam Mencegah Pernikahan Dini.....	59

BAB IV	ANALISIS PERAN PEMERINTAH DESA SUNTRI KEC.	
	GUNEM KAB. REMBANG DALAM MENCEGAH	
	PERNIKAHAN DINI (STUDI PASAL 23 PERATURAN DESA	
	SUNTRI NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG	
	PERLINDUNGAN ANAK)	80
A.	Analisis Peran Pemerintah Desa Suntri dalam Mencegah	
	Pernikahan Dini	80
B.	Analisis Hukum Islam Tentang Peraturan Desa Suntri Nomor	
	06 Tahun 2014 Terkait Batas Minimal Usia Perkawinan	90
BAB V	PENUTUP	102
A.	Kesimpulan	102
B.	Saran	103
C.	Penutup	103
 DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki seorang perempuan yang bukan *mahram*.¹ Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.²

Di Indonesia, untuk menyebut perihal nikah ini, masyarakat menggunakan kata perkawinan atau pernikahan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UUP), pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah.⁴

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, Cet. ke-9, hlm. 9.

² M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, Cet. ke-3, hlm. 6.

³ Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan 1974

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, hlm. 114.

Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga dan berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga pengenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya.⁵

Atas alasan itu, maka salah satu prinsip yang digariskan oleh UU Perkawinan Nomor 1/1974 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa calon mempelai untuk dapat melangsungkan perkawinan harus telah masak jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang sehat.⁶

Arus globalisasi yang terus berkembang, mengubah cara pandang masyarakat pada umumnya, bahkan bagi perempuan yang menikah di usia belia dianggap menghancurkan masa depan wanita, menghambat kreativitasnya serta mencegah wanita untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas.⁷ Perkawinan dibawah umur dapat mengurangi harmonisasi keluarga, hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejala darah muda dan cara berfikir yang belum matang.

Bagi sebagian masyarakat, pernikahan dibawah umur masih memiliki konotasi negatif, masih banyak yang beranggapan bahwa

⁵ Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 4.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1997, hlm. 57.

⁷ Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Perkawinan Dini*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, Cet. ke-1, hlm. 27.

pernikahan dibawah umur identik dengan bangunan rumah tangga yang kacau, terlalu tergesa-gesa dan dilakukan tidak dengan perencanaan yang matang. Perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik mental maupun material. Artinya secara fisik laki-laki dan perempuan sudah sampai pada batas umur yang bisa dikategorikan menurut hukum positif dan baligh menurut hukum Islam.

Di zaman modern ini, pembatasan usia minimal perkawinan sangatlah perlu guna menekan angka pernikahan anak dibawah umur. Pada dasarnya, hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an menginsyarkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah SWT (surat An-Nur : 32) :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: *“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”*⁸

⁸ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, Jakarta: Mekar Surabaya, 2002, hlm. 494.

Prinsip perkawinan yang mengharuskan mempelai matang jiwa dan raganya, diimplementasikan dengan adanya pembatasan umur pada saat menikah.⁹ Secara tidak langsung dalam Islam mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda *baligh*. Rachmat Syafe'I menulis, penentu bahwa seorang telah *baligh* ditandai dengan keluarnya haid pertama kali bagi wanita dan keluarnya mani bagi pria melalui mimpi pertama kali, atau telah sempurna berumur 15 (lima belas) tahun.¹⁰ Dengan terpenuhinya kriteria *baligh* maka memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan.¹¹ Sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan *baligh*.

Sedangkan pembatasan usia perkawinan menurut hukum positif diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa:¹²

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun; Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dan pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.”

Namun karena ukuran kedewasaan sudah ditetapkan oleh perundang-undangan, maka perkawinan yang dilakukan dibawah ukuran tersebut dikategorikan sebagai perkawinan usia dini.¹³ Oleh karena itu

⁹ Achmad Arief Budiman, *Pernikahan Usia Dini di Kota Semarang*, Penelitian Individual, Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo, 2008, hlm. 2.

¹⁰ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh (Untuk IAIN, STAIN, PTAIS)*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, hlm. 336.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Jakarta: Prenada Media, 2008, Cet. ke-2, hlm. 394.

¹² Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perkawinan 1974

¹³ *Perkawinan usia dini* adalah perkawinan yang dilakukan pada usia dibawah 20 tahun bagi wanita dan dibawah 25 tahun bagi pria. Sedangkan *perkawinan dibawah umur*

langkah penguatan dan pelestarian nilai-nilai perkawinan sesuai dengan ajaran agama, termasuk pencegahan pernikahan anak dibawah umur perlu mendapat perhatian yang lebih besar dari semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Desa Suntri Kec. Gunem Kab. Rembang memberikan peran dan tanggung jawab terhadap pencegahan pernikahan dini, dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Desa Suntri No. 06 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang dengan jelas diatur dalam pasal 23 ayat (1) dan (2) bahwa:

1. Pemerintah desa wajib dan bertanggung jawab mencegah pernikahan dini;
2. Tanggung jawab pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah:
 - a. Melakukan koordinasi dengan dinas dan kantor terkait;
 - b. Tidak mengeluarkan izin menikah kecuali atas rekomendasi Pengadilan Agama;
 - c. Berpedoman pada batasan usia anak dalam UUPA.

Yang dimaksud anak adalah sesuai Peraturan Desa Suntri No.06 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1) dan (10) bahwa:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
10. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan diusia anak.¹⁴

Salah satu yang melatar belakangi Pemerintah Desa Suntri membuat perdes tersebut khususnya pernikahan dini adalah untuk pembangunan pendidikan. Dengan memperbaiki pendidikan, Pemerintah Desa Suntri berharap bisa meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Untuk itu peningkatan kualitas sumber daya manusia mutlak

adalah perkawinan yang dilakukan pada usia dibawah 19 tahun bagi pria. Intruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 tentang Usia Perkawinan dalam Rangka Mendukung Program Kependudukan dan Keluarga Berencana, ditetapkan tanggal 24 Juli 1983

¹⁴ Lihat Peraturan Desa Suntri Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

dilakukan. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas dapat memberikan efek berlipat terhadap pembangunan perekonomian. Maka dari itu Pemerintah Desa Suntri mencegah pernikahan dini dikarenakan pernikahan dini dianggap salah satu penghambat terciptanya SDM yang berkualitas. Untuk mewujudkan SDM yang berkualitas pendidikan merupakan peranan yang paling strategis, karena pendidikan merupakan investasi penting dalam menghadapi masa depan dunia secara global. Kemudian juga bahwa anak adalah amanah Illahi yang perlu dilindungi dan generasi penerus yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Jumlah Pasangan Pengantin yang Menikah Usia Dini di Desa Suntri Kec.

Gunem Kab. Gunem¹⁵

No	Tahun	Dari Keseluruhan Pasangan Yang Menikah	Pasangan yang Menikah Dini
1	2011	31 Orang	8 Orang
2	2012	31 Orang	7 Orang
3	2013	38 Orang	9 Orang

Dikarenakan tingginya angka pernikahan dini di Desa Suntri tersebut, membuat Pemerintah Desa Suntri prihatin sehingga mengeluarkan Peraturan Desa No. 06 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terdapat pada pasal 23 yang didalamnya mengatur tentang pencegahan pernikahan dini. Dengan dikeluarkannya peraturan desa tersebut diharapkan mampu menekan angka pernikahan dini sehingga tidak pernah terjadi lagi pernikahan dini.

¹⁵ Buku Catatan Kehendak Nikah

Dari pengamatan tersebut, penulis terdorong untuk meneliti bagaimana peran Pemerintah Desa Suntri Kec. Gunem Kab. Rembang dalam mencegah pernikahan dini serta bagaimana tinjauan hukum Islam tentang Pemerintah Desa Suntri Kec. Gunem Kab. Rembang dalam mencegah pernikahan dini dan akan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul **"PERAN PEMERINTAH DESA SUNTRI KEC. GUNEM KAB. REMBANG DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI (Studi Pasal 23 Peraturan Desa Suntri Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pemerintah Desa Suntri Kec. Gunem Kab. Rembang dalam mencegah pernikahan dini (studi pasal 23 Perdes Suntri No.06 tahun 2014 tentang perlindungan anak) ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Perdes Suntri No.06 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang batasan minimal usia nikah ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui peran Pemerintah Desa Suntri Kec. Gunem Kab. Rembang dalam mencegah pernikahan dini, apakah sudah

mengimplementasikan peraturan desa yang berlaku (studi pasal 23 Perdes Suntri Nomor 06 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).

- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Perdes Suntri No.06 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang batasan minimal usia nikah

2. Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk menambah khazanah keilmuan dan juga pemikiran khususnya pada bidang hukum keluarga serta menambah pengetahuan pada diri sendiri, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.
- b. Agar penulisan skripsi ini berguna untuk mengurangi adanya pernikahan dini.
- c. Untuk memberikan gambaran terhadap praktek Peraturan Desa Suntri Kec. Gunem Kab. Rembang Nomor 06 Tahun 2014 yang bertujuan memberikan perlindungan kepada anak.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini tentu saja tidak satu-satunya penelitian yang pertama meneliti tentang pernikahan dini, melainkan satu dari sekian banyak penelitian terdahulu mengenai tema ini. Sudah banyak beberapa penelitian terkait pernikahan dini, namun tentu saja dengan fokus dan permasalahan yang berbeda. Demi menunjang penulisan skripsi ini maka terlebih dahulu penulis membaca dan mengkaji beberapa literatur sebagai berikut :

1. Skripsi karya Dade Ahmad Nasrullah (2080441000020) mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah yang berjudul

Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pesarean Kec. Pamijahan Kabupaten Bogor, dari penelitian tersebut hasilnya pertama, ada 33 pelaku pernikahan dini yang tersebar dalam 33 RT Desa Pesarean, pelaku yang tamat SD berjumlah 3 pasangan, SD/MI berjumlah 13 pasangan dan SMP/MTS berjumlah 17. Selain itu, dari 33 pasangan pelaku pernikahan usia dini ada 2 pasangan yang menikah dini oleh karena sudah ada jodohnya/ dijodohkan, dan selebihnya 31 pasangan menikah dini oleh karena alasan ekonomi (menghilangkan beban ekonomi keluarga). Kedua, tentang efektivitas hasilnya KUA Kec. Pamijahan dalam hal ini penghulu telah mengadakan sosialisasi atau mengenai pentingnya menikah sesuai umur yang telah ditentukan Undang-Undang saat sebelum akad nikah (khutbah nikah) atau oleh *amil* desa melalui pengajian-pengajian dan peringatan hari-hari besar keagamaan (bila diundang) dalam rangka menanggulangi pernikahan dini di Pesarean.¹⁶

2. Skripsi karya Fahrul Fatkhurozi (112111021) mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo yang berjudul *Peran Pegawai Pencatat Nikah Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dibawah umur (Studi Kasus di KUA Kec. Tanjung Kab. Brebes)*, dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam meminimalisir pernikahan dibawah umur di KUA Kec, Tanjung

¹⁶ Dade Ahmad Nasrullah, *Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pesarean Kec. Pamijahan Kabupaten Bogor*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014.

Kab. Brebes sangatlah berperan. Tingkat efektivitas peran PPN dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dibawah umur cukup efektif..¹⁷

3. Skripsi karya Triana Apriyanita (111104410003) mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “*Tradisi Ngemblok: Fenomena Pernikahan Dini Dan Janda Muda*” (*Studi Kasus Desa Tegaldowo, Kec. Gunem Kab. Rembang, Jawa Tengah*). Dalam skripsi ini menyimpulkan faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini adalah takut disebut *perawan kasep*, persepsi yang menganggap bahwa sekolah tinggi tidak akan merubah kehidupan mereka dan yang lebih ditakutkan mereka takut menolak lamaran karena factor adat. Dampak pernikahan dini adalah banyak janda muda mereka memilih jadi janda daripada harus menolak lamaran. Maka yang terjadi di Desa Tegaldowo adalah banyaknya janda muda yang umurnya masih anak-anak, bahkan pada umur 18 tahun kerap terjadi yang menikah dua kali.¹⁸
4. Penelitian Karya Suhadi (0301510058) Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang dengan judul “*Perkawinan Belia Dalam Perspektif Teori Dramaturgi*”. Dalam penelitian ini membahas tentang karakteristik masyarakat Tegaldowo dan perilaku perkawinan belia, perspektif

¹⁷ Fahrul Fatkhurozi, *Peran Pegawai Pencatat Nikah Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Dibawah umur (Studi Kasus di KUA Kec. Tanjung Kab. Brebes)*, UIN Walisongo, Semarang, 2015.

¹⁸ Triana Apriyanita *Tradisi Ngemblok: Fenomena Pernikahan Dini Dan Janda Muda*” (*Studi Kasus Desa Tegaldowo, Kec. Gunem Kab. Rembang, Jawa Tengah*), Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015

perkawinan belia pada masyarakat Tegaldowo, peranan masyarakat dan pemerintah dalam memandang perkawinan belia.¹⁹

5. Jurnal Pendidikan Sosiologi 2016 yang ditulis oleh Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti dengan judul "*Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu*". Hasil penelitiannya adalah bahwa pernikahan dini yang terjadi di Desa Plosokerep Kab. Indramayu disebabkan oleh beberapa faktor baik intern maupun ektern.²⁰
6. Jurnal Al-Tahrir Vol. 13 No. 2 November 2013 karya Ali Imron dengan judul "*Perkawinan Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam dalam Perlindungan dan Kesejahteraan Anak*." Hasil penelitiannya adalah perkawinan dibawah umur pada dasarnya secara normatif melanggar regulasi perlindungan kesejahteraan anak. Sedangkan dispensasi perkawinan yang dikeluarkan oleh pengadilan seharusnya didudukkan sebagai pintu darurat yang diperketat pelaksanaannya.²¹

Adapun perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan diatas, bahwasannya dalam penelitian terdahulu pembahasannya fokus menggunakan pembatasan usia perkawinan yang telah ditentukan dalam hukum positif di Indonesia bahwa yang dimaksud perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan pada usia dibawah 19 tahun bagi pria dan 16

¹⁹ Suhadi, *Perkawinan Belia Dalam Perspektif Teori Dramaturgi*, UNNES, 2010

²⁰ Martyan Mita Rumekti, V. Indah Sri Pinasti, "*Peran Pemerintah Daerah (Desa) dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu*", Jurnal Sosiologi 2016.

²¹ Ali Imron, "*Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dalam Perlindungan dan Kesejahteraan Anak*", Jurnal Al-Tahrir Vol. 13 No. 2 November 2013.

tahun bagi perempuan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih fokus pembatasan usia menggunakan Perdes Suntri No.06 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu yang dimaksud pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan diusia anak (18 tahun). Kebanyakan peneliti-peneliti sebelumnya hanya meneliti tentang faktor-faktor perkawinan dibawah umur, dan hanya meneliti tentang sebatas meminimalisir, menanggulangi, dan mengatasi pernikahan dibawah umur, belum ada yang menelaah tentang peran pemerintah desa sampai dalam tahap mencegah pernikahan anak dibawah umur. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul tersebut.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data dan penjelasan yang akan dibutuhkan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan, dibutuhkan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian. Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²² Maka penulis menggunakan beberapa metode penelitian, antara lain:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata atau lisan dari fenomena yang diteliti atau dari

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008, Cet. ke-4, hlm. 2.

orang-orang yang berkompeten di bidangnya.²³ Selain itu penelitian ini juga termasuk jenis penelitian non doktrinal, yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses berkejanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian ini sering disebut juga sebagai *sosio legal research*.²⁴ Berdasarkan hal tersebut, yang paling sering menjadi topik di dalam penelitian non doktrinal adalah efektifitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.²⁵

2. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁶ Dengan kata lain, sumber data primer yang menjadi acuan pokok dari studi ini yaitu hasil wawancara dengan Perangkat Desa Suntri, Masyarakat, dan juga beberapa pelaku pernikahan dini Desa Suntri Kec. Gunem Kab. Rembang sebagai data primer.

b. Data Sekunder

²³ Lexi. J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2001, hlm. 3.

²⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 42.

²⁵ Suratman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015, hlm. 88.

²⁶ Sugiyono, *op.cit*, hlm. 225.

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.²⁷ Maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumentasi dan beberapa studi literatur yaitu buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Wawancara (*Interview*), yaitu suatu pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan atau narasumber.²⁸ Adapun narasumber yang akan di wawancarai antara lain Perangkat Desa Suntri, masyarakat, dan beberapa pelaku pernikahan dini di Desa Suntri Kec. Gunem Kab. Rembang.
- b) Dokumentasi, yaitu dengan cara pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.²⁹ Dokumentasi ini digunakan untuk menggali data tentang perihal peran Pemerintah Desa Suntri Kec. Gunem Kab. Rembang dalam mencegah pernikahan dini. Dalam penelitian ini dokumentasinya berupa Peraturan Desa Suntri Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Perlindungan

²⁷ *Ibid.*

²⁸ S. Nasution, *Metode research*, Jakarta: Bumi Akasara, 2010, hlm. 113.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, Cet. ke-13, hlm. 158.

Anak, buku catatan kehendak nikah Desa Suntri, foto kegiatan sosialisasi.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis, proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, dokumentasi, dan data yang diperoleh dari pustaka. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh di lapangan dirangkum dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data-data yang benar terkait dengan permasalahan yang dibahas.³⁰ Deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan pelaksanaan, dalam hal ini difokuskan pada peran Pemerintah Desa Suntri Kec. Gunem Kab. Rembang dalam mencegah pernikahan dini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memudahkan dalam memahami permasalahan dan pembahasannya. Maka dalam penelitian ini, penulis mencoba membagi sistematika penulisan skripsi ini ke dalam lima bab :

Bab Pertama merupakan pendahuluan. Bab ini meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

³⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, Cet ke-10, hlm. 160.

Bab Kedua mengenai tinjauan umum pernikahan yang didalamnya diuraikan secara teoritis tentang pengertian pernikahan, hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan, konsep batas usia pernikahan yaitu batasan usia pernikahan menurut hukum Positif dan hukum Islam, serta kewajiban dan tanggungjawab dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, sistem hukum, hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan.

Bab Ketiga membahas mengenai gambaran umum Desa Suntri dan peran Pemerintah Desa Suntri Kec. Gunem Kab. Rembang dalam mencegah pernikahan dini. Bab ini meliputi: gambaran umum Desa Suntri Kec. Gunem Kab. Rembang antara lain letak geografis dan kondisi demografis, struktur kelembaga serta gambaran umum peran Pemerintah Desa Suntri dalam mencegah pernikahan dini.

Bab Keempat mengenai analisis hasil penelitian. Bab ini menguraikan tentang analisis terhadap peran Pemerintah Desa Suntri Kec. Gunem Kab. Rembang dalam mencegah pernikahan dini, apakah dalam mencegah pernikahan dini Pemerintah Desa Suntri sudah mengimplementasikan sesuai dengan peraturan desa yang berlaku pada pasal 23 Perdes Suntri No.06 tahun 2014 tentang perlindungan anak, serta analisis hukum Islam tentang Peraturan Desa Suntri No.06 tahun 2014 terkait batas usia minimal pernikahan.

Bab Kelima bab ini merupakan bab yang terakhir dan merupakan penutup dari semua pembahasan. Dalam bab terakhir ini meliputi: kesimpulan

dan saran. Kesimpulan disajikan penulis sebagai ringkasan dan gambaran dari apa yang telah dihasilkan oleh pembahasan skripsi ini, serta jawaban dari rumusan masalah yang telah dijelaskan dalam bab pertama. Dilengkapi dengan saran yang perlu penulis sampaikan kepada pembaca secara umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

A. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.³¹

1. Secara etimologi

Kata nikah berasal dari kata, *zawaj*. Dalam *Kamus al-Munawwir*, kata nikah disebut dengan *al-nikah* (النكاح) dan *az-ziwaj/az-zijah* (الزيجه – الزواج) secara harfiah, *an-nikah* berarti *alwath'u* (الوطء), *adhdhammu* (الضم) dan *al-jam'u* (الجمع) artinya berjalan diatas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.³² Kata (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat.³³ Kata “*nikah*” telah dibakukan menjadi Bahasa Indonesia. Secara sosial, kata pernikahan dipergunakan dalam berbagai upacara perkawinan. Disamping itu, kata “pernikahan”

³¹ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *op.cit*, hlm. 6.

³² Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1461.

³³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016, Cet. ke-1, hlm. 23.

tampak lebih etis dan agamis dibandingkan dengan kata “perkawinan”. Kata perkawinan lebih cocok untuk makhluk selain manusia.³⁴

2. Secara terminologi

Nikah berarti suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz menikahkan atau mengkawinkan. Kata nikah itu sendiri secara hakiki bermakna persetubuhan. Pendapat lain menerangkan tentang hukum pernikahan diantaranya dijelaskan kata nikah diucapkan menurut makna bahasanya yaitu kumpul, *wat'i* jimak dan akad. Diucapkannya menurut pengertian syara' yaitu suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat.³⁵

Perkawinan menurut istilah seperti yang dikemukakan oleh Muhammad abu zahrah di dalam kitabnya *al ahwal al syakhsiyyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, saling tolong menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.³⁶

Mahmud Yunus mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan seksual, sedangkan Ibrahim Hosein mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan

³⁴ Beni Ahmad Saebani, *op.cit*, hlm. 10.

³⁵ Achmad Arief Budiman, *op.cit*, hlm. 22.

³⁶ Muhammad Abu Zahrah, *al ahwal al syakhsiyyah*, Qahirah: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1957, hlm. 19.

wanita. Secara lebih tegas perkawinan juga dapat didefinisikan sebagai hubungan seksual (bersetubuh).³⁷

Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan, nikah menurut syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.³⁸

Sedangkan Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakiah Daradjat, akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk perkawinan pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.³⁹

Sedangkan menurut UU No.1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami

³⁷ Ibrahim Hosein, *Fikih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk* Jakarta: Ihya Ulumudin, 1971, hlm. 5.

³⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015, Cet. ke-7, hlm. 8.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 9-10.

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁰

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah⁴¹. Berdasarkan definisi diatas, berarti yang dimaksud dengan pernikahan adalah akad nikah. Akad nikah yaitu rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.⁴²

B. Hukum Pernikahan

Pernikahan adalah *sunnatullah* bagi seluruh alam ini. Laki-laki dan perempuan laksana siang dan malam, dua hal yang beda tetapi tidak dapat dipisahkan. Dalam kehidupan rumah tangga, bagi manusia pernikahan membawa implikasi dan tanggung jawab sosial yang sangat besar. Oleh karena itu pernikahan harus didasarkan oleh pondasi yang kuat dan kukuh agar tidak mudah runtuh⁴³

Adapun dasar hukum yang menunjukkan pensyariatan nikah adalah sebagai berikut :

- a. (QS. An-Nisa' [4]: 1)

⁴⁰ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

⁴¹ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

⁴² *Ibid*, Pasal 1 huruf c

⁴³ Muhammad Mutawwali Sya'rawi, *Fiqh Wanita*, Jakarta : Pena Pundi Akasara, 2007, hlm. 95.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُومُوا رَّبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا



Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.⁴⁴

b. (QS. An-Nisa’ [4]: 3)

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.⁴⁵

Sedangkan hukum asal nikah adalah mubah⁴⁶ dan hukum tersebut dapat berubah sesuai dengan keadaan seseorang yang akan melakukan pernikahan, berdasarkan kepada perubahan illat-nya, maka hukum nikah dapat beralih menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram. Berikut penjelasannya:

⁴⁴ Al-Qur’an dan Terjemahannya, *op.cit.*, hlm. 99.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Abdul Fatah dan Abu Hamdi, *Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta : Rineka Cipta, 1994, hlm. 98.

1. Hukumnya beralih menjadi sunnah.

Yaitu apabila seseorang dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk kawin serta sekadar biaya hidup telah ada, maka baginya menjadi sunnahlah untuk melakukan perkawinan.

2. Hukumnya beralih menjadi wajib.

Yaitu apabila seseorang dipandang dari segi biaya kehidupan telah mencukupi dan dipandang dari segi pertumbuhan jasmaniyahnya sudah sangat mendesak untuk kawin, sehingga kalau dia tidak kawin dia akan terjerumus kepada penyelewengan, maka menjadi wajibah baginya untuk kawin.

3. Hukumnya beralih menjadi makruh.

Yaitu seseorang yang dipandang dari pertumbuhan jasmaniyahnya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya, maka makruhlah baginya untuk kawin.⁴⁷

4. Hukumnya beralih menjadi haram.

Yaitu diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri isteri.⁴⁸

⁴⁷ Mardani, *op.cit*, hlm. 35-37

⁴⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *op.cit*, hlm. 11

5. Hukumnya Nikah Mubah

Bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.⁴⁹

C. Rukun dan Syarat Pernikahan

Menurut ulama fiqh, bahwa rukun berfungsi menentukan sah atau batalnya perbuatan hukum. Suatu perbuatan atau tindakan hukum dinyatakan sah jika terpenuhi seluruh rukunnya, dan perbuatan hukum itu dinyatakan tidak sah jika tidak terpenuhi salah satu atau lebih atau semua rukunnya.⁵⁰

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutupi aurat untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.⁵¹

Menurut jumhur ulama rukun perkawinan itu ada lima, dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat dari rukun tersebut adalah:

1. Calon suami, syarat-syarat:
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Neng Djubaidah, *Pecatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 90.

⁵¹ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *op.cit*, hlm.12.

- e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2. Calon istri, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat dimintai persetujuannya
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- 3. Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perkawinannya.
- 4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam ijab qabul
 - c. Dapat mengerti maksud akad
 - d. Islam
 - e. Dewasa
- 5. Ijab qabul, syarat-syaratnya:
 - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
 - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut

- d. Antara ijab dan qabul bersambungan
- e. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
- f. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.⁵²

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah.

D. Tujuan Pernikahan

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekadar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang akan dilahirkan tidak diketahui siapa akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia, yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan yang mahadahsyat. Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan

⁵² Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, Cet. ke-1, hlm. 10.

akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara.⁵³

Menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁵⁴ Menurut undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa tujuan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵⁵ Masdar Hilmi, menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga serta meneruskan dan memelihara keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia, juga untuk mencegah perzinahan, dan juga agar terciptanya ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.⁵⁶

Sulaiman Al-Mufarraj, dalam bukunya *Bekal Pernikahan*, menjelaskan bahwa ada 15 tujuan perkawinan, yaitu:

1. Sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah SWT. Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya;

⁵³ Beni Ahmad Saebani, *op.cit*, hlm. 19-20.

⁵⁴ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

⁵⁵ Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974

⁵⁶ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Mitra Usaha, 2001, hlm 37.

2. Untuk *'iffah* (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang); *ihsan* (membentengi diri) dan *mubadho 'ah* (bisa melakukan hubungan intim);
3. Memperbanyak umat Muhammad SAW;
4. Menyempurnakan agama;
5. Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah;
6. Melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surga;
7. Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinaan, dan lain sebagainya;
8. Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu isteri di rumah;
9. Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh ligkaran keluarga;
10. Saling mengenal dan menyayangi;
11. Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan isteri;
12. Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai dengan ajaran-Nya terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah SWT maka tujuan nikahnya akan menyimpang;
13. Suatu tanda kebesaran Allah SWT kita melihat orang yang sudah menikah, awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lainnya, tetapi dengan melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya bisa saling mengenal dan sekaligus mengasihi;

14. Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan;
15. Untuk mengikuti panggilan *iffah* dan menjaga pandangan kepada hal-hal yang diharamkan.⁵⁷

E. Hikmah Melakukan Pernikahan

Kawin adalah jalan yang paling baik untuk mendapatkan keturunan menjadi mulia, keturunan menjadi banyak dan sekaligus melestarikan hidup manusia serta memelihara keturunannya. Orang yang telah kawin dan telah memperoleh anak, maka naluri kebapakan, atau naluri keibuannya akan tumbuh dan saling melengkapi dalam suasana hidup kekeluargaan yang menimbulkan perasaan ramah, saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Orang yang telah kawin dan memperoleh anak akan mendorong dan bersangkutan melakukan tanggung jawab dan kewajibannya dengan baik, sehingga dia akan bekerja keras untuk melaksanakan kewajibannya itu.⁵⁸

Melakukan perkawinan yang sah akan memperoleh hikmah yang sangat besar, yaitu:

1. Menghindari terjadinya perzinaan.
2. Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan.

⁵⁷ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, kata mutiara*, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, Jakarta: Qisthi Press, 2003, hlm. 51.

⁵⁸ Umul Baroroh, *op.cit*, hlm. 18-19.

3. Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinaan seperti AIDS.
4. Lebih menumbuhkan kembangkan kamantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga.
5. Nikah merupakan setengah dari agama.
6. Menikah dapat menumbuhkan kesungguhan, keberanian, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan negara.
7. Perkawinan dapat memperhubungkan silaturahmi, persaudaraan, dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat sosial.⁵⁹

F. Konsep Batas Usia Pernikahan

Di dalam undang-undang tidak ditemukan istilah pengertian perkawinan dini atau perkawinan dibawah umur. Sebuah perkawinan dinamakan perkawinan dini karena usia para pelaku perkawinan tersebut masih terlalu dini atau terlalu muda untuk melangsungkan perkawinan. Dikarenakan usia para pelaku perkawinan tersebut belum mencapai umur yang disyaratkan oleh aturan perkawinan baik undang-undang maupun peraturan terkait lainnya. Dari definisi tersebut nampak perlu adanya standarisasi batasan usia bagi para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Batasan usia ini penting bagi masyarakat agar para pelaku perkawinan mendapatkan kepastian apakah perkawinan mereka masuk

⁵⁹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, hlm. 37-38.

kategori perkawinan dini atau perkawinan dibawah umur ataukah perkawinan yang sewajarnya.⁶⁰

1. Batas Usia Pernikahan Menurut Hukum Positif

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur batasan usia perkawinan bagi para pihak yang akan melangsungkan perkawinan.⁶¹ Yaitu termaktub dalam Pasal 7:

Ayat (1): Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Ayat (2): dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Ketentuan batas kawin ini seperti disebutkan dalam kompilasi pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang dilektakan UU perkawinan bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Disamping itu, bagi calon yang belum mencapai umur 21 tahun diharuskan mendapatkan izin dari kedua orang tua atau pengadilan, seperti disebutkan pada pasal 6 ayat (2) dan (5) Undang-Undang No. 1 Tahun

⁶⁰ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, Cet. ke-1, hlm. 115-116.

⁶¹ Abdul Manan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Perasada, 2000, hlm. 10.

1974 tentang perkawinan. Adapun isi ayat (2) : “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua” sedang isi ayat (5) adalah : “Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini”⁶² Dengan demikian apabila izin tidak didapatkan dari orang tua, maka pengadilan tidak memberikan izin.⁶³

KUHPerdara dalam pasal 29 menentukan, setiap laki-laki yang belum berusia 18 tahun penuh dan wanita belum berusia 15 tahun penuh, tidak diperbolehkan mengadakan perkawinan namun bila ada alasan-alasan penting, Presiden dapat menghapuskan larangan-larangan itu dengan memberikan dispensasi.⁶⁴

Sedangkan menurut rencana Undang-Undang Perkawinan Umat Islam yang panitianya dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Agama

24. ⁶² Watjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Balai Aksara, 1987, hlm

⁶³ *Ibid.*, hlm. 26.

⁶⁴ R. Subekti, R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pramodya paramita, 2006, Cet. ke-37, hlm. 540.

tanggal 4 April 1960 No. 38 ukuran dewasa ditentukan dengan umur, yaitu umur 15 tahun untuk wanita dan umur 18 tahun untuk laki-laki⁶⁵

Sementara di dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 15 ayat (1) untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya umur 16 tahun.⁶⁶

Intruksi Mendagri menentukan perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan pada usia dibawah 20 tahun bagi wanita dan dibawah 25 tahun bagi pria. Sedangkan perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan pada usia dibawah 19 tahun bagi pria.⁶⁷

Sedangkan dalam UU No.23 Tahun 2003 Tentang perlindungan Anak sebagai instrument HAM juga tidak menyebutkan secara eksplisit tentang usia minimum menikah selain menegaskan bahwa anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan Ibu.⁶⁸

Sejalan dengan Peraturan Desa Suntri Nomor 06 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang

⁶⁵ Kamal Muchtar, *Asas² Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, Cet. ke-1, hlm. 95.

⁶⁶ Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kompilasi Hukum islam*, Bandung: Fokus Media, 2005, hlm 25.

⁶⁷ Intruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 tentang Usia Perkawinan dalam Rangka Mendukung Program Kependudukan dan Keluarga Berencana, ditetapkan tanggal 24 Juli 1983

⁶⁸ Undang-Undang RI No.23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, Jakarta: Trinity, 2007, Cet. ke-1, hlm. 3.

dilakukan diusia anak.⁶⁹ Diperjelas pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁷⁰ Maka batas standarisasi usia ideal menikah sesuai dalam Peraturan Desa Suntri Nomor 06 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yaitu manakala pernikahan yang dilakukan diusia anak (kurang dari 18 tahun), dengan demikian jika masih dibawah standarisasi tersebut, maka pernikahan tersebut dinamakan pernikahan dini.

2. Batas Usia Pernikahan Menurut Hukum Islam

Ketika berbicara batasan umur minimal perkawinan untuk menikah pada dasarnya dalam hukum Islam tidak mengatur secara eksplisit tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk menikah dapat dianggap sebagai sebuah kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya.⁷¹ Masalah pengaturan batasan umur dalam hukum Islam merupakan masalah ijtihadiyah, artinya tidak ada nash yang mengatur secara eksplisit persoalan tersebut. Islam hanya menegaskan agar kita perlu mengantisipasi supaya keluarga yang dibentuk tidak menghasilkan anak keturunan yang lemah, sebagai akibat dari ketidaksiapan orang tuanya pada saat menikah.⁷² Meskipun secara terang-terangan tidak ada petunjuk Al-Qur'an atau Hadist Nabi tentang batas usia perkawinan, namun secara implisit ada ayat Al-Qur'an dan

⁶⁹ Pasal 1 ayat 10 Perdes Suntri No.06 Tahun 2014

⁷⁰ Pasal 1 ayat 1 Perdes Suntri No.06 Tahun 2014

⁷¹ Helmi Karim dalam Huzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshari H.Z. (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Kedua, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996, hlm. 80.

⁷² Achmad Arief Budiman, *op.cit*, hlm.33.

begitu pula hadist Nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu.⁷³ Al-Quran menyatakan dalam surat An-Nisa' ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”*⁷⁴

Ayat diatas memang tidak secara tegas berkaitan dengan persoalan batasan usia pernikahan tetapi bisa dimaknai bahwa untuk membentuk rumah tangga yang ideal maka kedua pasangan harus mempersiapkan segala hal yang dapat mendukung pencapaian tujuan itu. Seandainya kedua mempelai belum masak jiwa raganya bisa diprekdisikan bahwa pembentukan rumah tangga yang bahagia, sehat, dan matang akan sulit diwujudkan.⁷⁵ Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: *“Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan*

⁷³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, hlm. 67.

⁷⁴ Al-Qur'an dan Terjemahannya, *op.cit*, hlm. 101.

⁷⁵ Achmad Arief Budiman, *op.cit*, hlm. 34.

*mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.*⁷⁶

Kata (الصالحين) dipahami oleh banyak ulama dalam arti ‘yang layak kawin’ yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga.⁷⁷ Begitu pula dengan hadits Rasulullah SAW, yang menganjurkan kepada para pemuda untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya kemampuan.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ⁷⁸ (رواه البخاري)

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian telah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan mata dan menjaga lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu menikah maka hendaknya ia berpuasa, karena itu merupakan obat baginya.” (HR. Bukhari Muslim)

Secara tidak langsung, Al-Qur’an dan hadits ini mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam perkawinan. Untuk melangsungkan perkawinan harus mempunyai kemampuan persiapan untuk kawin. Kemampuan dan persiapan untuk kawin ini hanya dapat terjadi bagi orang yang sudah dewasa. Usia kedewasaan dalam Islam sering diidentikkan dengan *baligh*.⁷⁹ Dengan terpenuhinya kriteria *baligh* maka telah

⁷⁶ Al-Qur’an dan Terjemahannya, *op.cit*, hlm. 494.

⁷⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, Vol. IX. Jakarta : Lentera Hati, 2005, Cet. ke-6, hlm. 335.

⁷⁸ Abu Abdullah Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid 3, Nomor hadits 5066, Beirut: Dar al-Fikr, 1995, hlm. 252.

⁷⁹ *Baligh* adalah cukup umur. Lihat Departemen Agama Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, Cet. ke-3, hlm. 96.

memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan.⁸⁰ Juga Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ^ط
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا^ع وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ^ط وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ^ع فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ^ع وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Atinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).⁸¹

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah *baligh*, ‘sampai mereka cukup umur untuk kawin’, Mujtahid berkata: artinya *baligh*. Jumhur ulama berkata: *baligh* pada anak laki-laki terkadang oleh mimpi, yaitu disaat tidur, bermimpi sesuatu yang menyebabkan keluarnya air mani yang memancar, yang darinya akan menjadi anak.⁸²

Ketika menafsirkan ayat ini, Hamka mengatakan bulugh al nikah itu diartikan dengan dewasa. Kedewasaan itu bukanlah bergantung kepada umur, tetapi kepada kecerdasan atau kedewasaan pikiran. Karena ada juga

⁸⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm. 394.

⁸¹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, *op.cit*, hlm. 100-101.

⁸² ‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman bin Ishaq Ali Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, M. ‘Abdul Goffar, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008, hlm. 236.

anak usianya belum dewasa, tetapi ia lebih cerdas dan ada pula seseorang yang usianya telah agak lanjut, tetapi belum matang pemikirannya. Batas umur minimal tidak terdapat dalam berbagai madzhab secara konkrit yang dinyatakan dalam bilangan angka, yang terdapat pernyataan istilah *baligh* sebagai batas minimalnya. Para ulama madzhab sepakat *haidh* dan hamil merupakan bukti kebaligh-an seorang wanita. Hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan *haidh* kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki.⁸³

Masa '*aqil baligh*' seharusnya telah dialami oleh tiap-tiap orang pada rentang usia 14-17 tahun. Salah satu tanda yang biasa dipakai sebagai patokan apakah kita sudah '*aqil baligh*' atau belum adalah datangnya mimpi basah (*ihtilam*). Akan tetapi pada masa kita sekarang, datangnya *ihtilam* sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan berpikir. Generasi yang lahir pada zaman kita banyak yang telah memiliki kemasakan seksual, tetapi belum memiliki kedewasaan berpikir.⁸⁴

Doktrin fiqh menetapkan batasan kedewasaan seseorang relatif lebih lentur dibanding dengan ketentuan dalam hukum modern saat ini. Fiqh menetapkan kecakapan melakukan tindakan hukum secara aktif diukur dengan kriteria baligh. Menurut jumhur ulama salah satu ciri orang dianggap telah baligh, apabila dia sudah bermimpi basah (*ihtilam*) bagi seorang laki-laki, dan mengalami menstruasi (*haidh*) bagi perempuan.

⁸³ Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Juz IV, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1983, hlm. 266.

⁸⁴ Muhammad Fauzil Adhim, *op.cit*, hlm. 47.

Lebih lanjut apabila seseorang anak lelaki telah berusia lima belas tahun, atau telah tumbuh kumis dan bulu kemaluan, juga dipandang telah dewasa.⁸⁵

Terdapat beberapa pendapat tentang kriteria atau batasan *baligh*. Ketentuan *baligh* ini diperlukan sebagai patokan untuk menilai kedewasaan seseorang. Para ulama berbeda pendapat terhadap ketentuan *baligh*, diantaranya:⁸⁶

No	Madzhab Hukum	Kriteria Baligh
1.	Madzhab Syafi'i (fiqh syafi'iyah)	<p>Laki-laki</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usia anak genap 15 tahun, dan atau 2. Keluarnya air mani (minimal umur 9 tahun) 3. Tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan <p>Perempuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Haid, dan atau 2. Hamil <p>Usia rata-rata laki-laki dan perempuan 15 tahun</p>
2.	Madzhab Maliki (fiqh malikiyyah)	<p>Laki-laki</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarnya air mani baik keadaan tidur atau terjaga 2. Tumbuhnya rambut disekitar kemaluan 3. Tumbuhnya rambut diketiak 4. Indera penciuman hidung menjadi peka, dan 5. Perubahan pita suara 6. Umur 18 tahun berjalan atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun <p>Perempuan</p>

⁸⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum I*, Edisi Kedua, Jakarta: Magenta Bhakti Guna, 1994, hlm.155-157.

⁸⁶ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 126-127.

		1. Haid, dan atau 2. Hamil Usia rata-rata laki-laki dan perempuan 18 tahun
3.	Madzhab Hanafi (fiqh hanafiyyah)	Laki-laki 1. Berumur 12 tahun, dan atau 2. Ihtilam (keluarnya air mani) karena bersetubuh atau tidak, dan atau 3. Menghamili wanita Perempuan 1. Haid, dan atau 2. Hamil 3. Berumur minimal 9 tahun Usia rata-rata: 1. Laki-laki 18 tahun 2. Perempuan 17 tahun
4.	Madzhab Hambali (fiqh hanabilah)	Sama seperti Madzhab Syafi'i

Berdasarkan pendapat para ulama tersebut, dapat dipahami konsep kedewasaan dalam Islam tampaknya lebih menonjolkan pada aspek fisik. Padahal hal tersebut merupakan ciri-ciri pubertas yang hanya berkaitan dengan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kalau kedewasaan merujuk pada semua tahap kedewasaan, maka pubertas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual dan kedewasaan fisik. Tetapi kedewasaan fisik saja tidak cukup bagi kehidupan berumah tangga. *Rusyd* (kematangan pikiran) adalah hal lain yang sama pentingnya. Namun, disisi lain, kehidupan kita masa kini telah menjadi sangat rumit, sehingga muncul kesenjangan yang besar antara masa puber dan kedewasaan dalam urusan finansial maupun sosial. Secara fisik, pemuda masa kini menjadi dewasa lebih cepat dari generasi-generasi sebelumnya, tetapi secara

emosional, mereka memakan waktu jauh lebih panjang untuk mengembangkan kedewasaan.⁸⁷

Disamping itu dilihat dari salah satu tujuan perkawinan dalam hukum Islam adalah agar terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Agar terwujudnya tujuan nikah tersebut maka kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan harus mempertimbangkan dari aspek psikis, biologis, dan juga kesiapan ekonomis.⁸⁸ Maka hal ini tujuan perkawinan tidak mungkin tercapai apabila pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan belum dewasa dan belum matang jiwanya.

Lebih lanjut dalam bukunya. '*Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*', Ukasyah Abdulmanan Athibi menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Kematangan jasmani. Minimal dia sudah *baligh*, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami isteri atau keturunannya.
2. Kematangan finansial/keuangan. Maksudnya dia mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian. Pemberian uang kepada isteri bisa dilakukan mingguan atau bulanan. Yang penting dia mampu membayarkan kemampuannya dalam bidang finansial.

⁸⁷ Sayyid Muhammad Ridhwi, diterjem, Muhammad Hasyim, *Perkawinan Moral dan Seks dalam Islam*, Jakarta: Lentera, 1994, hlm. 64.

⁸⁸ Ali Imron, *op.cit*, hlm. 129.

3. Kematangan perasaan. Artinya, perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci, sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.⁸⁹

Yusuf Musa mengatakan bahwa usia dewasa itu setelah seseorang berumur 21 tahun. Hal ini dikarenakan pada zaman modern ini orang melakukan persiapan matang, sebab mereka masih kurang pengalaman hidup dan masih dalam proses belajar. Namun demikian kepada mereka dapat diberikan beberapa urusan sejak usia 18 tahun.⁹⁰

Maka dari itu untuk dapat melaksanakan perkawinan haruslah mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang, tidak dapat diragukan, kehidupan pada masa sekarang lebih sulit dibanding zaman dahulu. Apabila kawin muda dimasa dahulu ini penting dan tidak membahayakan tetapi kalau sekarang akan menimbulkan bencana, menimbulkan kerusakan yang tidak dapat diingkari.⁹¹ Datangnya ihtilam sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan berpikir. Karena itu wajib bagi kita pegang dalam menentukan anak cukup

⁸⁹ Ukasyah Abdulmanan Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, khairil Halim, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 351-352.

⁹⁰ Hasbi Ash Shidieqy, *Pengantar Hukum Islam*, jilid 2, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm. 20.

⁹¹ H.S.A Alhamdani, *Risalah Nikah*, IAIN Walisongo cabang Pekalongan: Raja Murah, 1980, hlm.40.

umur adalah kedewasaannya secara jiwa, bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik (tubuh).

G. Kewajiban dan Tanggungjawab dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Kewajiban dan tanggungjawab dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 adalah untuk perlindungan anak dan menjamin pemenuhan hak anak. Bahwa yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Kemudian, hak anak adalah bagian hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Maka kewajiban dan tanggungjawab dalam pemenuhan hak anak adalah sebagai berikut:⁹²

1. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan atau mental.
2. Untuk menjamin pemenuhan hak anak, negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak.

⁹² Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

3. Untuk menjamin pemenuhan hak anak, pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang penyelenggaraan perlindungan anak.
4. Untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan, pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.
5. Kebijakan sebagaimana dimaksud, dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak.
6. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
7. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak.
8. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
9. Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

10. Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak.
11. Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
12. Dalam hal orang tua tidak ada, atau karena tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

H. Sistem Hukum

Sebuah sistem menurut Lawrence M. Friedman adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem ini bersifat mekanis, organis, atau sosial.⁹³ Menurut H. L. A. Hart seperti dikuti oleh Lawrence M. Friedman bahwa sistem hukum adalah kumpulan ganda dari peraturan-peraturan. Suatu sistem hukum adalah kesatuan dari peraturan-peraturan primer dan peraturan-peraturan sekunder. Peraturan primer adalah norma-norma perilaku; peraturan sekunder adalah norma mengenai norma-norma ini bagaimana memutuskan apakah semua itu valid, bagaimana memberlakukannya, dll.⁹⁴ Ia kemudian mengatakan bahwa suatu sistem

⁹³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Penerjemah: M. Khozim, "Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial", Bandung: Nusa Media, 2011, Cet. ke-4, hlm. 6.

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 16.

hukum operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi⁹⁵. Penjelasannya sebagai berikut:

1. Struktur hukum, adalah salah satu dasar dan elemen yang paling nyata dari sistem hukum. Struktur sebuah sistem adalah kerangka badan yang menjadi bentuk permanennya, tubuh institusional dari sistem tersebut, tulang tulang keras yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasannya.⁹⁶ Jadi struktur hukum terdiri dari lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.
2. Subtansi hukum (peraturan-peraturan), adalah elemen lain dari strukuktur hukum, substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku.⁹⁷
3. Kultur hukum, adalah elemen sikap dan nilai sosial. Dengan begitu, kultur hukum mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum, adat kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari dari hukum dan dengan cara-cara tertentu.⁹⁸

I. Hierarki atau Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Lawrence M. Friedman peraturan bisa diperingkat daam sejenis piramid, dari peraturan yang rendah sampai yang tingkatnya tinggi. Ketika peraturan-peraturan berkonflik, peraturan yang lebih tinggi mengontrl peraturan yang lebih rendah. Dalam suatu sistem konstitusional, peraturan-

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 17.

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 15-16.

⁹⁷ *Ibid*, hlm. 16.

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 17.

peraturan konstitusional memiliki validitas yang lebih tinggi daripada peraturan-peraturan yang biasa. Sebuah undang-undang pada gilirannya memiliki otoritas yang lebih tinggi daripada sebuah ordinasi kota atau suatu regulasi administratif. Biasanya, validitas yang semakin tinggi tidak berarti bahwa peraturan tersebut secara moral lebih sempurna, melainkan hanya bahwa mereka yang membuatnya berdiri lebih tinggi dalam piramida pemerintahan.⁹⁹

Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan (selanjutnya disingkat TAP MPR No.III/MPR/2000) sebagai pengganti TAP MPRS No.XX/MPRS/1966. TAP MPR No.III/MPR/2000 tersebut menentukan tata urutan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pembuatan dalam pembuatan aturan hukum dibawahnya, dalam pasal 2 urutannya adalah sebagai berikut:¹⁰⁰

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah.

⁹⁹ *Ibid*, Hlm. 52.

¹⁰⁰ Lihat TAP MPR No.III/MPR/2000

Peraturan daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Peraturan daerah meliputi peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten/kota, peraturan desa atau yang setingkat. Konsekuensi dari ketentuan pasal 2 TAP MPR No.III/MPR/2000 tersebut adalah, setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi.¹⁰¹

Berdasarkan pada pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:¹⁰²

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

¹⁰¹ *Ibid*

¹⁰² Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5

BAB III

**GAMBARAN UMUM DESA SUNTRI DAN PERAN PEMERINTAH DESA
SUNTRI KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG DALAM
MENCEGAH PERNIKAHAN DINI**

A. Gambaran Umum Desa Suntri Kecamatan Gunem

Lokasi daerah yang digunakan untuk penelitian dan penulisan skripsi ini adalah Desa Suntri Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang harus diketahui adalah kondisi geografis, pendidikan, keadaan sosial ekonominya dan keagamaan.

1. Letak Geografis

Desa Suntri merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Gunem dengan ketinggian tanah 3.000 meter diatas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata 25°C. Secara administratif, luas Desa Suntri Kecamatan Gunem seluas 221.970 Ha. Letak Desa Suntri ini bersebelahan dengan desa lain dengan batas-batas sebagai berikut:¹⁰³

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Dowan
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tegaldowo
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Dowan dan Tegaldowo
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Biringan Kecamatan Sale

Adapun jarak Desa Suntri dengan tempat lainnya adalah sebagai berikut:¹⁰⁴

¹⁰³ Monografi Desa Suntri Tahun 2016

¹⁰⁴ Monografi Desa Suntri Tahun 2016

- a. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan : 9,5 km
- b. Jarak dari ibukota Kabupaten : 29 km
- c. Jarak dari ibukota Provinsi : 109 km
- d. Jarak dari ibukota Negara : 623 km

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa jarak antara Desa Suntri ke Pusat pemerintahan kecamatan yaitu 9,5 km dengan tempuh waktu \pm 30 menit, jarak dari Desa Suntri ke Ibukota Kabupaten yaitu 29 km dengan tempuh waktu \pm 1 jam, jarak dari Desa Suntri ke Ibukota Provinsi yaitu 109 km dengan tempuh waktu \pm 3 jam, jarak dari Deas Suntri ke Ibukota Negara yaitu 623 km dengan tempuh waktu \pm 13 jam.¹⁰⁵

2. Kondisi Demografis

A. Kondisi Penduduk

Sesuai dengan data monografi Desa Suntri per tahun 2016 dapat diketahui bahwa jumlah pendduduk yang ada di Desa Suntri Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang tercatat sebanyak 1.370 orang dengan perincian jenis kelamin, Sebagai berikut:¹⁰⁶

Tabel 1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelamin

No	Jenis Kelamin	Keterangan
1	Laki-laki	690 Orang

¹⁰⁵ Monografi Desa Suntri Tahun 2016

¹⁰⁶ Monografi Desa Suntri Tahun 2016

2	Perempuan	680 Orang
Jumlah		1.370 Orang

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan jumlah penduduk Desa Suntri antara laki-laki dan perempuan jumlahnya hampir sama, yaitu kaum laki-laki 690 orang, dan kaum perempuan 680 orang, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 374 orang.¹⁰⁷

Kemudian jumlah penduduk berdasarkan usia dibagi menjadi dua kelompok yaitu meliputi kelompok pendidikan dan kelompok Tenaga kerja, adalah sebagai berikut:¹⁰⁸

Tabel 2

Jumlah Penduduk Menurut Usia (Kelompok Pendidikan)

No	Usia	Jumlah
1	00 – 03 Tahun	58 Orang
2	04 – 06 Tahun	33 Orang
3	07 – 12 Tahun	105 Orang
4	13 – 15 Tahun	67 Orang
5	16 – 18 Tahun	56 Orang

¹⁰⁷ Monografi Desa Suntri Tahun 2016

¹⁰⁸ Monografi Desa Suntri Tahun 2016

6	19 – Keatas	1.051 Orang
---	-------------	-------------

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk menurut kelompok usia pendidikan banyak dihuni oleh mereka yang berusia 07-12 tahun dan paling sedikit berusia 04-06 tahun.

Tabel 3

Jumlah Penduduk Menurut Usia (Kelompok Tenaga Kerja)

No	Usia	Jumlah
1	10 – 14 Tahun	136 Orang
2	15 – 19 Tahun	155 Orang
3	20 – 26 Tahun	189 Orang
4	27 – 40 Tahun	441 Orang
5	41 – 56 Tahun	313 Orang
6	57 – Keatas	236 Orang

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk menurut kelompok usia tenaga kerja banyak dihuni oleh mereka yang berusia 27-40 tahun mencapai 441 orang dan yang paling sedikit adalah berusia 10-14 tahun yang mencapai 136 orang.

B. Kondisi Pendidikan

Jumlah penduduk masyarakat Desa Suntri berdasarkan tingkat pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu menurut lulusan pendidikan umum, dan juga menurut lulusan pendidikan khusus, adalah sebagai berikut:¹⁰⁹

Tabel 4

Tingkat Lulusan Pendidikan Umum

No	Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak	17 Orang
2	Sekolah Dasar	107 Orang
3	SMP/SLTP	152 Orang
4	SMA/SLTA	64 Orang
5	Akademi/DI – D3	5 Orang
6	Sarjana (S1 – S3)	14 Orang

Tabel 5

Tingkat Lulusan Pendidikan Khusus

No	Pendidikan	Jumlah
1	Pondok Pesantren	15 Orang

¹⁰⁹ Monografi Desa Suntri Tahun 2016

2	Madrasah	16 Orang
3	Pendidikan Keagamaan	6 Orang
4	Kursus / Keterampilan	12 Orang

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kebanyakan penduduk Desa Suntri mayoritas masyarakatnya lulus SMP/SLTP dengan 152 orang, disusul dengan masyarakat yang lulus SD dengan 107 orang, dan yang ketiga disusul dengan masyarakat yang lulus SMA dengan 64 orang.

Adapun dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, penduduk Desa Suntri didukung oleh beberapa sarana pendidikan, yang dikategorikan menjadi dua, yaitu sarana pendidikan umum dan sarana pendidikan khusus. Berikut dibawah ini adalah tabel sarana penunjang pendidikan di Desa Suntri.¹¹⁰

Tabel 6

Sarana Pendidikan Umum

No	Lembaga Pendidikan Negeri	Jumlah
1	TK	1 Buah
2	SD	1 Buah

¹¹⁰ Monografi Desa Suntri Tahun 2016

3	Madrasah	1 Buah
---	----------	--------

Tabel 7

Sarana Pendidikan Khusus

No	Lembaga Pendidikan Negeri	Jumlah
1	Pondok Pesantren	2 Buah
2	Madrasah	1 Buah
3	Sarana Pendidikan Non Formal	1 Buah

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa di Desa Suntri mempunyai 1 bangunan Taman Kanak-Kanak, 1 bangunan Sekolah Dasar, 1 bangunan Madrasah Negeri dan 1 lagi bangunan Madrasah swasta, 2 bangunan Pondok Pesantren, dan 1 Sarana Pendidikan Formal. Belum ada bangunan SMP sebagai penunjang sarana pendidikan di Desa Suntri.

C. Kondisi Sosial Ekonomi

Secara keseluruhan masyarakat Desa Suntri dihuni oleh 1370 orang beragam mata pencaharian, tetapi yang lebih dominan adalah petani. Adapun yang lain bermata pencaharian sebagai PNS, pedagang,

pertukangan, buruh tani, dan lain sebagainya. Berikut ini merupakan tabel mengenai jumlah penduduk Desa Suntri menurut pencaharian:¹¹¹

Tabel 8

Mata Pencaharian Penduduk

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	12 Orang
2	ABRI	1 Orang
3	Swasta	14 Orang
4	Wiraswasta/Pedagang	6 Orang
5	Petani	691 Orang
6	Pertukangan	36 Orang
7	Buruh Tani	80 Orang
8	Pensiunan	3 Orang
9	Jasa	5 Orang

Berdasarkan tabel diatas nampak bahwa mata pencaharian penduduk Desa Suntri mayoritas adalah Petani dengan 691 orang, ini dikarenakan wilayahnya yang agraris, disusul buruh tani dengan 80 orang, kemudian yang ketiga adalah pertukangan dengan 36 orang.

¹¹¹ Monografi Desa Suntri Tahun 2016

D. Kondisi Keagamaan

Setiap manusia memiliki hak untuk memilih masing-masing agama yang menjadi pedoman dalam kehidupannya. Dengan adanya enam agama yang ada di Indonesia yaitu Islam, Hindu, Protestan, Katolik, Budha dan Konghucu. Namun hanya terdapat satu agama yang di yakini oleh masyarakat Desa Suntri. Adapun jumlah penduduk menurut agama yang dianutnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini: ¹¹²

Tabel 9

Berdasarkan Pemeluk Agama

No	Agama	Keterangan
1	Islam	1.370 Orang
2	Kristen	-
3	Khatolik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
6	Konghucu	-
Jumlah		1.370 Orang

¹¹² Monografi Desa Suntri Tahun 2016

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hanya terdapat satu agama yang dianut oleh masyarakat Desa Suntri tersebut, yaitu agama Islam dengan jumlah 1.370 orang. Dan tidak ada satupun orang yang beragama selain Islam, maka dari itu tak heran jika di Desa Suntri tidak ada tempat peribadatan lain selain agama Islam. Sebagai sarana peribadatan Desa Suntri terdapat 9 buah Mushola dan 1 Masjid. Adapun sebagaimana daftar tempat ibadah di Desa Suntri dapat dilihat pada tabel dibawah ini:¹¹³

Tabel 10

Sarana Peribadatan

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	1
2	Mushola	9
3	Gereja	-
4	Vihara	-
5	Pura	-

E. Kondisi Sosisal Budaya

¹¹³ Monografi Desa Suntri Tahun 2016

Sebagian masyarakat Desa Suntri masih ada yang mematuhi tradisi yang berlaku sejak nenek moyang mereka, salah satunya adalah tradisi ngemblok. Tradisi ngemblok adalah tradisi meminang yang dilakukan oleh keluarga perempuan ke keluarga laki-laki dengan membawa makanan, minuman, gula beberapa kwintal atau barang-barang lain dalam jumlah banyak yang dijadikan sebagai panjer atau pengikat kepada anak laki-laki. Tradisi ngemblok identik dengan perjodohan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Suntri ketika berusia 14-24 tahun. Seorang perempuan akan segera melaksanakan tradisi ngemblok agar terhindar dari istilah perawan tuwo sing gak payu rabi (perawan tua yang tidak laku menikah). Hal ini seperti diungkapkan oleh Fintiq Puryani pelaku pernikahan dini, ia menuturkan:¹¹⁴ “*Suntri kan daerah gunung mas, dadine kene iseh kentel tradisi ngemblok, lha dari pada selak dadi perawan tuwo*”, “Suntri itu kan daerah pegunungan, jadinya disini masih kental akan budaya ngemblok, dari pada akhirnya jadi perawan tua”. Budaya ini turun temurun dari nenek moyang. Begitu lekatnya tradisi tersebut dalam pikiran masyarakat, menyebabkan masyarakat hormat dan patuh pada tradisi ngemblok.

3. Struktur dan Anggota Kelembaga

Adapun daftar perangkat Desa Suntri berdasarkan buku monografi Desa Suntri tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 11

¹¹⁴ Fintiq Puryani, pelaku pernikahan dini Desa Suntri, wawancara pada tanggal 30 Oktober 2017

NO.	NAMA	JABATAN
1	Siswoyo	Kepala Desa
2	Sudirman	Sekretaris Desa
3	Samiyono	Kasi Pemerintahan
4	Abdul Ghoni	Kasi Kesra
5	Kamaludin	Kasi Pembangunan
6	Kodo	Kasi Keuangan

B. Gambaran Umum Peran Pemerintah Desa Suntri dalam Mencegah Pernikahan Dini

Fenomena pernikahan dini merupakan suatu peristiwa yang tidak asing lagi, dan hal ini sudah sering terjadi serempak diberbagai daerah di Indonesia, termasuk yang dialami sebagian masyarakat Desa Suntri, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang.

Para remaja di Desa Suntri umumnya menikah pada usia dini, mereka jarang melanjutkan kejenjang SMA, kebanyakan dari mereka setelah lulus SMP langsung menikah dan membina rumah tangga pada usia yang relatif masih dini. Hal ini akhirnya mendapat perhatian serius oleh Plan Indonesia, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan anak di Indonesia. Dari sinilah awal mula munculnya ide sebuah gagasan untuk membuat Peraturan Desa tentang perlindungan anak. Lalu

Kepala Desa Suntri maupun jajarannya beserta masyarakat Desa Suntri bekerja sama dengan Plan Indonesia untuk membuat perdes tentang perlindungan anak yang salah satu didalamnya mengatur tentang pencegahan pernikahan dini.¹¹⁵ Lalu untuk mendukung dan menunjang peraturan desa dibentuklah KPAD¹¹⁶ (Komite Perlindungan Anak Desa) sebuah lembaga perlindungan anak berbasis masyarakat.¹¹⁷ Dengan pertimbangan bahwa karena anak adalah amanah Illahi yang perlu dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi dan juga generasi penerus yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, hasil analisa situasi hak anak di Desa Suntri perlu perlindungan dan dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan.¹¹⁸

Kemudian dari pertimbangan-pertimbangan tersebut dibuatkanlah Peraturan Desa Suntri tentang perlindungan anak, yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Desa Suntri yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.¹¹⁹

Setiap anak di Desa Suntri dilindungi dan dijamin haknya sesuai pasal 5 sampai pasal 19 Peraturan Desa Suntri No.06 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yaitu setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh

¹¹⁵ Sudirman, Sekertaris Desa Suntri, wawancara pada tanggal 30 Oktober 2017

¹¹⁶ Suyikno, Humas KPAD, wawancara pada tanggal 14 Desember 2017

¹¹⁷ Pasal 1 ayat 16 Perdes Suntri

¹¹⁸ Pertimbangan Perdes Suntri perlindungan anak

¹¹⁹ Pasal 4 Perdes Suntri

dan berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹²⁰ Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.¹²¹ Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.¹²² Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, dalam suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.¹²³

Juga berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.¹²⁴ Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.¹²⁵ Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan

¹²⁰ Pasal 5 Perdes Suntri

¹²¹ Pasal 6 Perdes Suntri

¹²² Pasal 7 Perdes Suntri

¹²³ Pasal 8 Perdes Suntri

¹²⁴ Pasal 9 Perdes Suntri

¹²⁵ Pasal 10 Perdes Suntri

tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.¹²⁶

Serta hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.¹²⁷ Anak yang berkebutuhan khusus berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.¹²⁸

Setiap anak dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud diatas, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.¹²⁹

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.¹³⁰ Dan juga hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam

¹²⁶ Pasal 11 Perdes Suntri

¹²⁷ Pasal 12 Perdes Suntri

¹²⁸ Pasal 13 Perdes Suntri

¹²⁹ Pasal 14 Perdes Suntri

¹³⁰ Pasal 15 Perdes Suntri

kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.¹³¹

Kemudian hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Hak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.¹³²

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. Dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.¹³³ Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.¹³⁴

Sudirman melihat bahwa generasi muda Desa Suntri merupakan aset berharga untuk Desa Suntri. Maka dari itu dengan dibuatkannya peraturan desa tersebut dengan tujuan diharapkan mampu memperbaiki pendidikan generasi muda Desa Suntri. Dengan memperbaiki pendidikan, Pemerintah Desa Suntri berharap bisa meningkatkan sumber daya manusia

¹³¹ Pasal 16 Perdes Suntri

¹³² Pasal 17 Perdes Suntri

¹³³ Pasal 18 Perdes Suntri

¹³⁴ Pasal 19 Perdes Suntri

(SDM) yang berkualitas. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas maka dapat memberikan efek berlipat terhadap pembangunan perekonomian. Semua itu bisa terwujud salah satunya dengan mencegah pernikahan dini.¹³⁵

Apalagi setelah munculnya pabrik semen di Desa Tegaldowo yang berdekatan dengan Desa Suntri, diharapkan menunda pernikahan yang masih dini, dengan menunda pernikahan dini maka pemuda bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, dengan pendidikan yang tinggi itu generasi muda diharapkan bisa dengan mudah mendapatkan lapangan pekerjaan mungkin dengan bekerja di pabrik semen itu.¹³⁶

Dikuatkan lagi oleh Abdul Ghoni tujuan dibuatnya peraturan desa tentang perlindungan anak adalah agar menunda pernikahan dini dengan menunda pernikahan dini maka diharapkan pemuda desa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dengan pendidikan yang lebih tinggi ini diharapkan mempermudah remaja desa dalam mencari lapangan pekerjaan, lebih-lebih usia yang masih dini secara biologis dipandang belum matang reproduksinya.¹³⁷

Lalu kemudian disahkanlah peraturan desa tentang perlindungan anak yang ditetapkan di Desa Suntri pada tanggal 25 Maret 2014. Namun sebelum itu penulis akan uraikan rincian praktek pernikahan

¹³⁵ Sudirman, Sekertaris Desa Suntri, wawancara pada tanggal 30 Oktober 2017

¹³⁶ Siswoyo, Kepala Desa Suntri, wawancara pada tanggal 3 Oktober 2017

¹³⁷ Abdul Ghoni, Kaur Kesra Suntri, wawancara pada tanggal 30 Oktober 2017

usia dini di Desa Suntri mulai dari tahun 2011-2013, sebelum di tetapkannya aturan peraturan desa tentang perlindungan anak :¹³⁸

Tabel 12

Pernikahan Dini Sebelum Perdes Suntri Tahun 2011 – 2013

No	Tahun	Dari Keseluruhan Pasangan Yang Menikah	Pasangan yang Menikah Dini
1	2011	31 Orang	8 Orang
2	2012	31 Orang	7 Orang
3	2013	38 Orang	9 Orang

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa sebelum ditetapkannya Peraturan Desa Suntri tentang perlindungan anak, kasus pernikahan dini mulai dari tahun 2011 sampai tahun 2013 mengalami naik turun, terbukti ditahun 2011 dari 31 orang yang menikah terdapat 8 orang yang menikah diusia dini, ditahun 2012 dari 31 orang yang menikah terdapat 7 orang yang menikah diusia dini, kemudian di tahun 2013 dari 38 orang yang menikah terdapat 9 orang yang menikah diusia dini.

Berdasarkan Peraturan Desa Suntri No.06 Thun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 23:¹³⁹

¹³⁸ Buku Catatan Kehendak Nikah Desa Suntri Tahun 2011-2013

¹³⁹ Pasal 23 Perdes Suntri

1. Pemerintah Desa wajib dan bertanggungjawab mencegah pernikahan dini.
2. Tanggungjawab Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. Melakukan koordinasi dengan dinas dan kantor terait;
 - b. Tidak mengeluarkan ijin menikah kecuali atas rekomendasi Pengadailan Agama
 - c. Berpedoman pada batasan usia anak dalam UUPA.

Jadi secara teoritis Pemerintah Desa Suntri harus mencegah pernikahan dini. Yang dimaksud pernikahan dini didalam Peraturan Desa Suntri tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (10) dijelaskan bahwa:¹⁴⁰

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan diusia anak.

Kemudian yang dimaksud anak dijelaskan dalam Peraturan Desa Suntri tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa:¹⁴¹

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan Peraturan Desa Suntri No.06 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, peran dan tanggungjawab yang dilakukan Pemerintah Desa Suntri adalah melakukan tindakan pencegahan setiap orang yang ingin melangsungkan pernikahan dini, yaitu pernikahan yang kurang dari 18 tahun termasuk didalam kandungan. Untuk mendukung dan menunjang peraturan desa tersebut ditingkatkanlah KPAD¹⁴² (Komite Perlindungan Anak Desa) sebuah lembaga perlindungan anak berbasis masyarakat.¹⁴³ Berikut langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Suntri dalam mencegah pernikahan dini:

¹⁴⁰ Pasal 1 ayat 10 Perdes Suntri

¹⁴¹ Pasal 1 ayat 1 Perdes Suntri

¹⁴² Suyikno, Humas KPAD Suntri, wawancara pada tanggal 14 Desember 2017

¹⁴³ Pasal 1 ayat 16 Perdes Suntri

1. Meningkatkan Kinerja KPAD (Komite Perlindungan Anak Desa)

Strategi langkah awal yang dilakukan Pemerintah Desa Suntri adalah dengan memberikan dana yang cukup kepada KPAD (Komite Perlindungan Anak Desa) agar kinerja KPAD semakin meningkat. KPAD dibentuk secara partisipatif dengan melibatkan unsur yang berkepentingan dengan perlindungan anak, yang dijadikan sebagai salah satu institusi desa untuk menjamin perlindungan anak. Dengan memberikan dana kepada KPAD diharapkan mampu meningkatkan kinerja KPAD dengan meningkatnya kinerja KPAD diharapkan mampu menunjang keberhasilan Pemerintah Desa Suntri dalam mencegah pernikahan dini.

2. Sosialisasi Terhadap Peraturan Desa Tentang Perlindungan Anak

Sosialisasi terhadap peraturan desa dilakukan baik formal maupun non formal. Sosialisasi ini sangat perlu guna memberikan penyuluhan tentang bahaya menikah, atau memberikan pemahaman, dan penanaman nilai-nilai baik kepada anak-anak atau bahkan para orang tua dan juga masyarakat agar dapat membimbing anak-anaknya agar tidak melangsungkan pernikahan diusia dini.

- c. Menasehati atau menolak dengan tidak memberikan izin apabila calon mempelai usianya masih dini

Langkah akhir yang dilakukan Pemerintah Desa Suntri untuk mencegah pernikahan dini adalah dengan cara menasehat atau menolak dengan tidak memberikan izin menikah secara administrasi ketika calon

mempelai usianya kurang dari 18 tahun atau menasehati agar pelaku nikah dini dapat menunda pernikahannya.

Berikut penulis akan uraikan hasil wawancara penulis dengan para responden:

Salah satu upaya pencegahan pernikahan dini yang dilakukan Pemerintah Desa Suntri adalah ikut terlibat melakukan sosialisasi rutin setiap satu bulan sekali tentang pernikahan dini di Balai Desa. Setiap penduduk Desa Suntri yang datang ke Balai Desa untuk mengurus administrasi perizinan nikah, asalkan sudah berumur 17 tahun atau mempunyai KTP (kartu tanda penduduk) maka pemerintah desa membolehkan. Apabila kurang dari 17 tahun pemerintah desa tidak membolehkan perizinan pernikahan.¹⁴⁴

Dari pernyataan Siswoyo diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sudah melakukan upaya pencegahan pernikahan dini salah satunya adalah dengan mengadakan sosialisasi rutin setiap satu bulan sekali tentang pencegahan pernikahan dini. Secara perizinan administrasi pernikahan setiap calon mempelai yang sudah berusia lebih dari 17 tahun atau sudah mempunyai KTP maka Pemerintah Desa Suntri membolehkan.

Sudirman mengatakan pemerintah bekerjasama dengan Plan Indonesia lalu membuat peraturan desa kemudian mengumumkan kepada masyarakat tentang adanya Peraturan Desa Suntri tentang perlindungan anak yang didalamnya mengatur tentang pernikahan dini. Pemerintah desa lalu mensosialisasikan dan mengumpulkan segenap tokoh-tokoh masyarakat

¹⁴⁴ Siswoyo, Kepala Desa Suntri, wawancara pada tanggal 3 Oktober 2017

seperti LPMD, BPD dan juga Pemerintah Desa Suntri mengumumkannya lewat acara kondangan, hajatan atau kadang disampaikan kepada masyarakat ketika mengobrol di warung. Pemerintah desa sering ikut hadir dan terlibat bersama-sama Plan Indonesia mensosialisasikan tentang bahaya pernikahan dini di Balai Desa, yang dulu sering diadakan rutin setiap satu bulan sekali di Balai Desa namun sekarang sudah jarang diadakan sosialisasi, yang sekarang sosialisasi diserahkan ke KPAD (Komite Perlindungan Anak Desa). Secara perizinan apabila ada calon pasangan mempelai nikah datang ke Kantor Balai Desa Suntri usianya belum genap 16 tahun dicegah atau tidak dibolehkan. Kemudian apabila sudah lebih 16 tahun meskipun kurang dari 18 tahun secara perizinan pemerintah juga sudah mengupayakan mencegah dengan cara menasehati agar calon mempelai menunda pernikahannya tapi karena ada desakan dari orang tua yang mengehendaki agar anaknya menikah terpaksa dibolehkan dan secara Undang-Undang perkawinan sendiripun mengizinkan. Sebetulnya secara peraturan desa memang seharusnya tidak membolehkan..¹⁴⁵

Dari pernyataan Sudirman tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa setiap satu bulan sekali dulu rutin mengadakan sosialisasi tentang pencegahan pernikahan dini di Balai Desa. Secara perizinan apabila calon mempelai usianya sudah lebih dari 16 tahun dan meskipun usianya kurang dari 18 tahun maka pemerintah desa mengizinkan.

Abdul Ghoni menguatkan bahwa upaya pencegahan pernikahan dini salah satunya dengan cara sosialisasi rutin yang diadakan setiap satu

¹⁴⁵ Sudirman, Sekertaris Desa Suntri, wawancara pada tanggal 30 Oktober 2017

bulan sekali bersama KPAD (Komite Perlindungan Anak Desa). Secara perizinan jika ada calon mempelai yang ingin mengurus perizinan administrasi di Balai Desa jika mereka usianya kurang dari 18 tahun maka pemerintah desa tetap mencegah dan tidak memberikan perizinan.¹⁴⁶

Dari pernyataan Abdul Ghoni tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah desa yaitu salah satunya dengan mengadakan sosialisasi rutin yang diadakan setiap satu bulan sekali bersama KPAD. Secara perizinan administrasi apabila calon mempelai yang ingin menikah usianya kurang dari 18 tahun upaya yang pemerintah desa lakukan adalah mencegah atau tidak membolehkan.

Samiyono mengungkapkan dalam mencegah pernikahan dini upaya yang dilakukan adalah mensosialisasikan bahaya menikah dini. sosialisasi diadakan setiap satu bulan sekali yang diadakan lewat pertemuan warga, dan juga sosialisasi di Balai Desa. Apabila usianya kurang dari 18 tahun maka ia menyarankan dan menasehati untuk menunda pernikahan menyarankan untuk sekolah dulu, namun apabila keluarga tetap bersikukuh akhirnya dibolehkan karena ditakutkan bahayanya lebih besar ditakutkan hamil duluan atau kumpul kebo.¹⁴⁷

Suyikno menguatkan bahwa dalam mencegah pernikahan dini yang ia lakukan adalah lewat sosialisasi tentang bahaya menikah pernikahan dini. sosialisasi KPAD merupakan dari gabungan kepanitiaan atau gabungan dari berbagai organisasi atau institusi seperti perwakilan tokoh masyarakat,

¹⁴⁶ Abdul Ghoni, Kaur Kesra Suntri, wawancara pada tanggal 30 Oktober 2017

¹⁴⁷ Samiyono, Kaur Pemerintahan Suntri, wawancara pada tanggal 14 Desember

perangkat desa, tokoh agama, ketua RT, ibu PKK, karang taruna, kelompok posyandu. Sosialisasi masih sederhana karena terbatas dana. Sosialisasi biasanya diselipkan lewat acara selapanan, arisan kelompok-kelompok, tahlil. Ia meminta izin untuk mengisi sosialisasi dengan meminta waktu setengah jam atau 10 menit untuk menyelipkan sosialisasi diacara tersebut dengan begitu ia tidak memerlukan biaya banyak, dapat menghemat biaya dan juga lebih efektif. Sosialisasi memberikan pemahaman kepada orang tua dan juga anak-anak. Terkadang juga memperingatkan masyarakat untuk mengontrl anaknya agar tidak terjadi pernikahan dini. Pemerintah desa selama ini juga ikut terlibat mensosialisasikan, karena anggota KPAD sendiripun memang merupakan gabungan dari perangkat desa jadi perangkat desa memang selalu ikut mensosialisasikan bahaya menikah dini.¹⁴⁸

Keterangan diatas berdasarkan wawancara antara penulis dengan responden atau pihak Pemerintah Desa Suntri. Adapun berikut ini rincian praktek pernikah dini di Desa Suntri setelah ditetapkannya peraturan desa tentang perlindungan anak dari tahun 2014-2016.¹⁴⁹

Tabel 13

Pernikahan Dini Sesudah Perdes Suntri Tahun 2014 – 2016

No	Tahun	Dari Keseluruhan Pasangan Yang Menikah	Pasangan yang Menikah Dini

¹⁴⁸ Suyikno, Humas KPAD, wawancara pada tanggal 14 Desember 2017

¹⁴⁹ Buku Catatan Kehendak Nikah Desa Suntri Tahun 2014-2016

1	2014	24 Orang	4 Orang
2	2015	31 Orang	5 Orang
3	2016	19 Orang	8 Orang

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa kasus pernikahan dini setelah ditetapkannya Peraturan Desa Suntri dari tahun 2014 sampai tahun 2016 mengalami kenaikan, terbukti ditahun 2014 dari 24 orang yang menikah terdapat 4 orang yang menikah diusia dini, ditahun 2015 dari 31 orang yang menikah terdapat 5 orang yang menikah diusia dini, kemudian di tahun 2016 dari 19 orang yang menikah terdapat 8 orang yang menikah diusia dini. Artinya jika kasus pernikahan dini masih ada dan bahkan mengalami kenaikan, maka itu menimbulkan sebuah pertanyaan mengapa setelah adanya perdes perlindungan anak kasus pernikahan dini di Desa Suntri masih tetap saja terjadi. Setelah disahkannya peraturan desa tentang perlindungan anak apakah pemerintah sudah benar-benar telah mengimplementasikan sesuai peraturan desa yang telah dibuatnya.

Fakta tidak terelakkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa Suntri. Fenomena pernikahan dini masih saja tetap terjadi di kalangan masyarakat Desa Suntri bahkan mengalami peningkatan. Berikut ini adalah hasil fakta lapangan yang penulis temukan setelah wawancara dengan beberapa narasumber atau pelaku pernikahan dini.

Yuli Astuti menuturkan bahwa selama ini ia tidak tahu bahwa di Desa Suntri ada peraturan desa tentang perlindungan anak yang di dalamnya mengatur tentang pencegahan pernikahan dini, yang ia tau ialah pernah dengar dari Plan Indonesia yang mengajak sosialisasi tentang perlindungan anak, untuk lebih jelasnya tentang ada tidaknya peraturan desa di desanya ia tidak tau. Ia mengungkapkan tidak tau berapa bulan sekali sosialisasi dilakukan, karena ia sendiri tidak pernah ikut menghadiri sosialisasi. Ia mengaku kurang tau apakah pemerintah desa ikut terlibat dalam sosialisasi bahaya pernikahan dini karena ia sendiri tidak pernah mengikuti sosialisasi. Ketika mengurus perizinan administrasi pernikahan di Balai Desa pihak pemerintah desa langsung menyetujui pelaku yang menikah yang umurnya kurang dari 18 tahun.¹⁵⁰

Vera Apriliyani ia mengaku kurang terlalu tau bahwa di desanya ada peraturan desa tentang perlindungan anak, namun ia mengaku pernah dengar dari yang disampaikan oleh pak lurah tentang adanya peraturan Desa Suntri tentang perlindungan anak. Sosialisasi diadakan rutin setiap 3 bulan sekali. Ia mengaku ikut pernah mengikuti sosialisasi, kemudian yang ikut terlibat mensosialisasikan pernikahan dini Plan Indonesia dan Pemerintah Desa Suntri dan KPAD di Balai Desa. Ia mengaku ketika mengurus perizinan pernikahan ia disarankan untuk menunda pernikahan karena pada waktu itu ia

¹⁵⁰ Yuli Astuti, pelaku pernikahan dini, wawancara pada tanggal 30 Oktober 2017

usianya kurang dari 16 tahun, kemudian ia mendapatkan rekomendasi dari PA.¹⁵¹

Vila Fatikasari mengungkapkan bahwa ia tau kalau selama ini di desanya ada peraturan desa tentang perlindungan anak yang didalamnya mengatur tentang pernikahan dini. Ia tau karena rumahnya pernah di datangi pihak Plan Indonesia yang menyarankan dia untuk menunda pernikahannya. Ia juga mengungkapkan bahwa ia pernah dua kali ikut hadir dalam forum sosialisasi di Kantor Balai Desa tentang pernikahan dini. Ia mengaku bahwa sosialisasi diadakan setiap satu bulan sekali. Ia mengaku pemerintah desa terlibat mensosialisasikan bahaya menikah dini bersama Plan Indonesia dan juga kak yik (selaku humas KPAD). Secara perizinan administrasi perizinan pernikahan pihak pemerintah desa menyarankan untuk menunda pernikahannya karena pada waktu itu usianya kurang dari 16 tahun.¹⁵²

Eni Idayanti mengaku bahwa selama ini ia tidak tau kalau di desanya ada peraturan desa tentang perlindungan anak yang didalamnya mengatur tentang pencegahan pernikahan dini. Ia mengaku selama ini tidak pernah ikut sosialisasi di Balai Desa karena tidak diajak dan tidak mendapat undangan untuk ikut sosialisasi di Balai Desa tentang pencegahan pernikahan dini jadi ia tidak tau siapa saja yang ikut terlibat mensosialisasikan bahaya

2017 ¹⁵¹ Vera Apriliyani, pelaku pernikahan dini, wawancara pada tanggal 30 Oktober

2017 ¹⁵² Vila Fatikasari, pelaku pernikahan dini, wawancara pada tanggal 30 Oktober

pernikahan dini. Secara perizinan ketika ia mengurus administrasi pernikahan di Balai Desa pihak pemerintah langsung mengizinkan.¹⁵³

Hastim menguatkan bahwa ia juga tidak tau bahwa selama ini sebenarnya di desanya ada peraturan desa yang didalamnya mengatur tentang pencegahan pernikahan dini. Ia mengaku selama ini tidak pernah ikut mengahdiri acara sosialisasi karena tidak mendapat undangan. Namun ia mengaku setau ia selama ini yang sosialisasi dari Plan Indonesia namun ia tidak tau berapa bulan sekali diadakan sosialisasi. Secara perizinan ketika mengurus administrasi pernikahan di Balai Desa ia langsung diizinkan oleh Pemerintah Desa Suntri.¹⁵⁴

Uswatun Hasanah menuturkan bahwa selama ini ia sudah tahu bahwa di Desa Suntri ada peraturan desa tentang perindungan anak yang di dalamnya mengatur tentang pencegahan pernikahan dini. Ia menuturkan bahwa ia pernah ikut hadir dalam forum sosialisasi yang diadakan di SD yang mensosialisasikan pihak Plan Indonesia. Sosialisasi dulu diadakan setiap satu bulan sekali namun sekarang sudah tidak pernah ada sosialisasi lagi. Ia mengungkapkan pemerintah desa tidak pernah ikut terlibat dalam forum sosialisasi tapi Yus (keponakan pak carik) ikut mensosialisasikan. Ketika mengurus perizinan administrasi pernikahan di Balai Desa, ia mengaku pihak pemerintah desa langsung menyetujui.¹⁵⁵

¹⁵³ Eni Idayanti, pelaku pernikahan dini, wawancara pada tanggal 30 Oktober 2017

¹⁵⁴ Hastim, pelaku pernikahan dini, wawancara pada tanggal 30 Oktober 2017

¹⁵⁵ Uswatun Hasanah, pelaku pernikahan dini, wawancara pada tanggal 30 Oktober 2017

Nurul Inayah mengungkapkan bahwa ia tau kalau di desanya ada peraturan desa tentang perlindungan anak. Ia mengaku selama ini ia ikut hadir dalam sosialisasi di Balai Desa yang diadakan rutin setiap 1 bulan sekali. Ia mengungkapkan pemerintah desa ikut mensosialisasikan bahaya menikah dini bersama Plan Indonesia. Namun sekarang sosialisasi sudah berakhir. Ia mengaku waktu mengurus untuk meminta izin nikah pemerintah desa langsung membolehkan.¹⁵⁶

Fintiq Puryani mengungkapkan ia tau bahwa di desanya sudah ada peraturan desa tentang perlindungan anak yang didalamnya mengatur tentang pernikahan dini. Ia mengungkapkan bahwa ia pernah ikut hadir dalam forum sosialisasi di Kantor Balai Desa tentang bahaya pernikahan dini. Ia mengaku bahwa sosialisasi diadakan setiap satu bulan sekali dan yang menyampaikan sosialisasi tentang pernikahan dini adalah Plan Indonesia sedangkan pihak pemerintah desa sendiri tidak ikut hadir dan terlibat dalam mensosialisasikan tentang bahaya pernikahan dini. Sosialisasi itu pun dulu, sekarang tidak pernah ada sosialisasi. Secara perizinan ketika ia mengurus administrasi di Kantor Balai Desa pihak pemerintah desa menyarankan untuk menunggu sampai ia berumur 16 tahun atau kalau tidak untuk mengurus dispensasi ke Pengadilan Agama. Namun pada saat itu ia tidak mengurus ke Pengadilan Agama melainkan menikah siri. Setelah ia berumur 16 tahun barulah ia menikah di KUA.¹⁵⁷

2017 ¹⁵⁶ Nurul Inayah, pelaku pernikahan dini, wawancara pada tanggal 30 Oktober

2017 ¹⁵⁷ Fintiq Puryani, pelaku pernikahan dini, wawancara pada tanggal 30 Oktober

Yani menguatkan selama ini ia tau bahwa di desanya ada peraturan desa tentang perlindungan anak yang didalamnya mengatur tentang pernikahan dini. Ia mengungkapkan bahwa ia pernah ikut hadir dalam forum sosialisasi di Kantor Balai Desa tentang bahaya pernikahan dini. Ia mengaku bahwa sosialisasi diadakan setiap satu bulan sekali dan yang menyampaikan sosialisasi tentang pernikahan dini adalah Plan Indonesia dan Kepala Desa juga ikut hadir dan terlibat dalam mensosialisasikan tentang bahaya pernikahan dini. Namun itu dulu, sekarang sosialisasi tidak pernah dilakukan. Secara perizinan ketika ia baru berumur 17 tahun ia mengurus administrasi perizinan pernikahan di Kantor Balai Desa dan pihak pemerintah desa langsung mengizinkan.¹⁵⁸

Pinur Anik mengungkapkan bahwa selama ini ia tidak tau kalau di desanya ada peraturan desa tentang perlindungan anak yang didalamnya mengatur tentang pencegahan pernikahan dini. Ia mengaku selama ini ia tidak pernah ikut sosialisasi di Balai Desa karena tidak mendapat undangan untuk ikut sosialisasi, jadi ia tidak tau siapa saja yang terlibat mensosialisasikan. Secara perizinan ketika mengurus administrasi pernikahan ia mengaku pihak pemerintah desa langsung membolehkan dan mengizinkan untuk melakukan pernikahan.¹⁵⁹

Berdasarkan yang telah disampaikan dari sepuluh narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa lima diantaranya mengaku tidak tau bahwa di desanya ada peraturan desa tentang perlindungan anak yang didalamnya

¹⁵⁸ Yani, pelaku pernikahan dini, wawancara pada tanggal 30 Oktober 2017

¹⁵⁹ Pinur Anik, pelaku pernikahan dini, wawancara pada tanggal 30 Oktober 2017

mengatur tentang pernikahan dini. Sisanya lagi mengaku bahwa ia tau kalau didesanya mempunyai peraturan desa tentang perlindungan anak. Bahwa dari sepuluh narasumber tersebut lima diantaranya menuturkan dulu sosialisasi diadakan rutin setiap satu bulan sekali namun sekarang tidak pernah diadakan sosialisasi. Kemudian empat diantaranya mengaku bahwa tidak tau kapan diadakan sosialisasi rutin karena ia tidak mendapat undangan menghadiri acara sosialisasi pernikahan dini, kemudian sisanya mengungkapkan sosialisasi diadakan setiap 3 bulan sekali.

Dari sepuluh narasumber tersebut dua diantaranya yaitu Vera Apriliyani dan Vila Fatikasari mengungkapkan bahwa selama ini yang mensosialisasikan tentang bahaya pernikahan dini adalah pemerintah desa, Plan Indonesia, dan juga KPAD. Kemudian dua diantaranya yaitu Nurul Inayah dan Yani mengungkapkan yang mensosialisasikan adalah pemerintah desa dan juga Plan Indonesia. Kemudian tiga diantaranya yaitu Yuli Astuti, Eni Idayanti, dan Pinur Anik tidak tau siapa yang mensosialisasikan karena ia tidak pernah ikut sosialisasi dan tidak diundang untuk ikut hadir dalam forum sosialisasi. Kemudian sisanya yaitu Hastim, Uswatun Hasanah, dan juga Fintiq Puryani mengaku yang mensosialisasikan adalah Plan Indonesia. Dari seluruh narasumber mengungkapkan bahwa pada saat para pelaku nikah dini meminta perizinan administrasi pernikahan di Kantor Balai Desa, pihak dari Pemerintah Desa Suntri langsung membolehkan. Berdasarkan keterangan tersebut penulis mencoba menggambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 13**Wawancara Penulis dengan Narasumber (Pelaku Nikah Dini)**

Nama	Tau/Tidaknya Adanya Perdes	Sosialisasi Diadakan	Yang Mensosialisasikan	Pemerintah Desa Menolak/ Mengizinkan
YA	Tidak tau	Tidak tau	Plan Indonesia	Mengizinkan
VF	Tidak Tau	3 bulan sekali	Pemerintah Desa, Plan Indonesia, KPAD	Mengizinkan
VF	Tau	1 bulan sekali	Pemerintah Desa, Plan Indonesia, KPAD	Mengizinkan
EI	Tidak tau	Tidak tau	Tidak tau	Mengizinkan
H	Tidak tau	Tidak tau	Plan Indonesia	Mengizinkan
UH	Tau	1 bulan sekali	Plan Indonesia	Mengizinkan
NI	Tau	1 bulan sekali	Pemerintah Desa dan Plan Indonesia	Mengizinkan
FP	Tau	1 bulan sekali	Plan Indonesia	Mengizinkan
Y	Tau	1 bulan	Pemerintah desa	Mengizinkan

		sekali	dan Plan Indonesia	
PA	Tidak tau	Tidak tau	Tidak tau	Mengizinkan

BAB IV

ANALISIS PERAN PEMERINTAH DESA SUNTRI KEC. GUNEM KAB. REMBANG DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI (STUDI PASAL 23 PERATURAN DESA SUNTRI NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)

A. Analisis Peran Pemerintah Desa Suntri dalam Mencegah Pernikahan Dini

Sesuai berdasarkan Peraturan Desa Suntri No.06 tahun 2014 pasal 23 ayat (1) dan (2) tentang perlindungan anak, menyatakan bahwa “pemerintah desa bertanggungjawab mencegah pernikahan dini. Tanggungjawab Pemerintah yang dimaksud dalam ayat (1) adalah melakukan koordinasi dengan dinas terkait, tidak mengeluarkan ijin menikah kecuali atas rekomendasi Pengadilan Agama, berpedoman pada batasan usia anak dalam UUPA.” Kemudian dalam pasal 1 ayat (10) Perdes Suntri No.06 tahun 2014 tentang perlindungan anak, memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan diusia anak. Lalu diperjelas lagi dalam pasal 1 ayat (1) bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Maksudnya, manakala salah satu kedua calon mempelai menikah kurang dari umur 18 tahun maka disebut pernikahan dini dan setiap anak yang berusia dibawah standar minimal usia perkawinan tersebut yaitu kurang dari 18 tahun, maka perkawinan ditolak dan Pemerintah Desa Suntri bertanggungjawab mencegah perkawinan tersebut.

Dalam melaksanakan tugas tanggungjawab yang dimaksud, ada beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Suntri dalam mencegah pernikahan dini, diantaranya:

Sebagaimana dari hasil wawancara yang telah penulis paparkan dalam bab 3, Siswoyo, mengatakan bahwa dalam mencegah pernikahan dini upaya yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi rutin setiap satu bulan sekali di Balai Desa¹⁶⁰. Kemudian untuk mendukung dan menunjang peraturan desa ditingkatkanlah KPAD¹⁶¹ (Komite Perlindungan Anak Desa) sebuah lembaga perlindungan anak berbasis masyarakat.¹⁶² Suyikno selaku Humas KPAD menambahkan sosialisasi tentang bahaya pernikahan dini dilakukan secara sederhana yaitu lewat acara hajatan, tahlilan, selapanan, maupun arisan, dengan izin meminta waktu sebentar kurang lebih setengah jam atau 10 menit untuk menyelipkan sosialisasi diacara tersebut dengan begitu tidak memerlukan biaya yang banyak dan juga menghemat biaya pengeluaran. Terkadang juga diacara tersebut memperingatkan masyarakat untuk mengontrol anaknya agar tidak terjadi pernikahan dini.

Samiyono menuturkan bahwa ia telah menyarankan calon mempelai untuk menunda menikah apabila usianya kurang dari 18 tahun namun apabila keluarga tetap mendesak untuk dilakukan pernikahan maka pemerintah desa mengizinkan dengan alasan ditakutkan kumpul kebo dan

¹⁶⁰ Siswoyo, Kepala Desa Suntri, wawancara pada tanggal 3 Oktober 2017

¹⁶¹ Suyikno, Humas KPAD Suntri, wawancara pada tanggal 14 Desember 2017

¹⁶² Pasal 1 ayat 16 Perdes Suntri

hamil duluan.¹⁶³ Abdul Ghoni menguatkan bahwa Pemerintah Desa Suntri menolak perizinan pernikahan calon mempelai yang usianya kurang dari 18 tahun karena diusia yang masih dini calon mempelai belum matang reproduksinya, dan juga mentalnya.¹⁶⁴

Berdasarkan keterangan dari responden diatas dapat diketahui bahwa upaya-upaya dalam mencegah pernikahan dini, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja KPAD (Komite Perlindungan Anak Desa)

Strategi langkah awal yang dilakukan Pemerintah Desa Suntri adalah dengan memberikan dana yang cukup kepada KPAD (Komite Perlindungan Anak Desa) agar kinerja KPAD semakin meningkat. KPAD dibentuk secara partisipatif dengan melibatkan unsur yang berkepentingan dengan perlindungan anak, yang dijadikan sebagai salah satu institusi desa untuk menjamin perlindungan anak. Dengan memberikan dana yang cukup kepada KPAD diharapkan mampu meningkatkan kinerja KPAD dengan meningkatnya kinerja KPAD diharapkan mampu menunjang keberhasilan Pemerintah Desa Suntri dalam mencegah pernikahan dini.

Menurut analisa penulis, yang dilakukan Pemerintah Desa Suntri dengan meningkatkan kinerja KPAD adalah sebuah langkah yang bagus, karena dengan meningkatkan kinerja KPAD pemerintah desa Suntri bisa berkerjasama untuk mensosialisasikan peraturan yang berkaitan dengan

2017 ¹⁶³ Samiyono, Kaur Pemerintahan Suntri, wawancara pada tanggal 14 Desember

¹⁶⁴ Abdul Ghoni, Kaur Kesra Suntri, wawancara pada tanggal 30 Oktober 2017

perlindungan anak melalui berbagai pertemuan-pertemuan baik acara formal maupun non formal dan juga stiker, seni budaya, dll.

2. Sosialisasi Terhadap Peraturan Desa Tentang Perlindungan Anak

Sosialisasi terhadap peraturan desa tentang perlindungan anak dilakukan melalui kegiatan formal maupun non formal, seperti acara hajatan, tahlil, arisan, selapanan. Sosialisasi tersebut disampaikan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Desa Suntri baik orang tua agar bisa membimbing anaknya supaya anaknya tidak melakukan pernikahan diusia dini, maupun menanamkan nilai-nilai baik kepada anak-anak. Sosialisasi juga menjelaskan tentang bahaya yang bisa ditimbulkan jika menikah diusia dini, juga batasan usia pernikahan di Desa Suntri, mengingat pentingnya pernikahan harus didahului dengan persiapan fisik maupun mental yang kokoh.

Menurut analisa penulis, sebelum sampai pada tahap mencegah memang idealnya dilakukan tahap pembinaan dan sosialisasi terlebih dahulu, dengan membangun kesadaran anak dengan tujuan agar anak tidak menikah dini, serta menanamkan nilai-nilai yang baik sejak dini pada anak, dan memberikan bimbingan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Dengan begitu kebijakan pencegahan pernikahan dini akan mudah terwujud. Karena itu, sosialisasi penting dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah disampaikan dalam bab 3, ada ketidakserasian antara yang diungkapkan oleh pemerintah desa, KPAD, pembantu pegawai pencatat nikah dan pelaku nikah dini terkait

tentang sosialisasi pernikahan dini. Pihak Pemerintah Desa Suntri, KPAD, dan juga pembantu pegawai pencatat nikah mengungkapkan bahwa selama ini pemerintah desa telah ikut serta melakukan sosialisasi tentang bahaya pernikahan dini, namun dari pihak pelaku nikah dini sebagian ada yang mengatakan bahwa pemerintah desa selama ini ikut mensosialisasikan bahaya menikah dini, namun sebagian ada juga yang mengungkapkan bahwa selama ini pemerintah desa tidak ikut terlibat dalam sosialisasi pernikahan dini.

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut ada kesimpangsiuran antara yang diungkapkan oleh Pemerintah Desa Suntri, KPAD, dan juga pelaku nikah dini. Setelah penulis menggali info lebih dalam akhirnya penulis menemukan hasil dokumentasi sosialisasi berupa foto-foto sesuai dalam lampiran-lampiran, dimana dalam foto tersebut terlihat Pemerintah Desa Suntri, KPAD dan juga anak-anak bersama-sama dalam kegiatan sosialisasi pernikahan dini.

Menurut analisa penulis, Pemerintah Desa Suntri telah mensosialisasikan bahaya menikah dini melalui acara formal maupun non formal, terbukti berdasarkan hasil dokumentasi berupa foto-foto yang penulis dapatkan. Terdapatnya kesimpangsiuran yang diungkapkan dari pelaku nikah dini tersebut barangkali ketika masih dalam usia yang masih dibawah umur para pelaku nikah dini waktu itu belum faham betul kalau itu sebenarnya adalah kegiatan sosialisasi.

3. Menasehati atau menolak dengan tidak memberikan izin apabila calon mempelai usianya masih dini.

Langkah selanjutnya yang ditempuh oleh Pemerintah Desa Suntri adalah dengan menolak memberikan izin nikah bagi calon mempelai yang masih diusia anak atau masih dibawah batas minimal usia perkawinan sesuai Peraturan Desa Suntri No. 06 tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu kurang dari 18 tahun. Dalam hal ini juga ada kesimpangsiuran antara yang diungkapkan oleh Pemerintah Desa Suntri dan juga pelaku nikah dini. Pihak Pemerintah Desa Suntri menuturkan sudah menyarankan dan menasehati calon mempelai untuk menunda menikah apabila usianya kurang dari 18 tahun namun apabila keluarga tetap mendesak untuk dilakukan pernikahan maka pemerintah desa mengizinkan dengan alasan ditakutkan kumpul kebo dan hamil duluan. Abdul Ghoni menguatkan bahwa Pemerintah Desa Suntri menolak perizinan pernikahan calon mempelai yang usianya kurang dari 18 tahun karena diusia yang masih dini calon mempelai belum matang reproduksinya, dan juga mentalnya.¹⁶⁵ Sedangkan dari pihak pelaku nikah dini mengaku tidak dicegah atau diberikan nasehat untuk menunda pernikahan.

Dengan langkah ini, Pemerintah Desa Suntri belum mampu menekan jumlah pernikahan dini, terbukti berdasarkan temuan dilapangan setelah disahkannya Peraturan Desa Suntri No.06 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jumlah pernikahan dini masih saja terjadi bahkan

¹⁶⁵ Abdul Ghoni, Kaur Kesra Suntri, wawancara pada tanggal 30 Oktober 2017

mengalami peningkatan per tahunnya. Berikut data yang penulis peroleh dilapangan jumlah pernikahan dini di Desa Suntri sebelum diberlakukan peraturan desa tentang perlindungan anak, sesuai pada bab 3 tabel 11:

Pernikahan Dini Sebelum Perdes Suntri Tahun 2011 – 2013

No	Tahun	Dari Keseluruhan Pasangan Yang Menikah	Pasangan yang Menikah Dini
1	2011	31 Orang	8 Orang
2	2012	31 Orang	7 Orang
3	2013	38 Orang	9 Orang

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa sebelum ditetapkannya Peraturan Desa Suntri tentang perlindungan anak, kasus pernikahan dini tahun 2011 sampai tahun 2013 mengalami naik turun, terbukti ditahun 2011 dari 31 orang yang menikah terdapat 8 orang yang menikah diusia dini, ditahun 2012 dari 31 orang yang menikah terdapat 7 orang yang menikah diusia dini, kemudian di tahun 2013 dari 38 orang yang menikah terdapat 9 orang yang menikah diusia dini.

Kemudian berikut data yang penulis temukan dilapangan sesudah diberlakukan Peraturan Desa Suntri No.06 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sesuai pada bab 3 tabel 12:

Pernikahan Dini Sesudah Perdes Suntri Tahun 2014 – 2016

No	Tahun	Dari Keseluruhan Pasangan Yang Menikah	Pasangan yang Menikah Dini
1	2014	24 Orang	4 Orang
2	2015	31 Orang	5 Orang
3	2016	19 Orang	8 Orang

Dari data diatas dapat diketahui bahwa kasus pernikahan dini setelah ditetapkannya Peraturan Desa Suntri dari tahun 2014 sampai tahun 2016 mengalami kenaikan, terbukti ditahun 2014 dari 24 orang yang menikah terdapat 4 orang yang menikah diusia dini, ditahun 2015 dari 31 orang yang menikah terdapat 5 orang yang menikah diusia dini, kemudian di tahun 2016 dari 19 orang yang menikah terdapat 8 orang yang menikah diusia dini.

Fakta tidak terelakkan terjadi, setelah diberlakukan peraturan desa perlindungan anak, fenomena pernikahan dini di Desa Suntri masih saja terjadi bahkan meningkat per tahunnya. Masih saja terjadinya pernikahan dini di Desa Suntri bukan tanpa alasan. Sudirman mengungkapkan hal ini terjadi karena sebenarnya pemerintah desa sudah menasehati untuk menunda pernikahan calon mempelai yang usianya masih dini, tapi ada desakan dari orang tua kepada Pemerintah Desa Suntri dengan alasan ditakutkan anaknya kumpul kebo dan ditakutkan terjadi hamil diluar nikah,

akhirnya pemerintah desa dengan terpaksa memberikan izin kepada calon mempelai yang usianya masih dini dan juga berdasarkan Undang-Undang perkawinan 1974 pun membolehkan apabila usianya sudah 16 tahun keatas.¹⁶⁶ Hal itulah yang akhirnya membuat pemerintah desa terpaksa memberikan izin kepada calon mempelai yang usianya kurang dari apa yang telah ditentukan dalam peraturan desa.

Menurut analisa penulis, meningkatnya angka pernikahan dini tidak sepenuhnya kesalahan Pemerintah Desa Suntri, karena pihak Pemerintah Desa Suntri telah mengupayakan pencegahan dengan cara menasehati untuk menunda pernikahannya, tetapi karena ada desakan oleh orang tua akhirnya pemerintah desa terpaksa membolehkan dengan alasan dikhawatirkan terjadi mafsadah yang lebih besar. Tentang adanya kesimpangsiuran yang pelaku nikah dini mengungkapkan bahwa pemerintah desa tidak menasehati ketika mengurus perizinan, pelaku nikah dini menuturkan begitu karena pada saat mengurus perizinan yang menguruskan adalah orang tuanya. Kemudian untuk menolak memberikan izin juga bukan sepenuhnya kesalahan pihak Pemerintah Desa Suntri karena ada benturan peraturan dimana didalam undang-undang yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Perkawinan 1974 menghendaki apabila pernikahan dilakukan pada usia calon mempelai sudah mencapai 16 tahun, sedangkan di peraturan desa hanya menghendaki apabila calon mempelai usianya sudah 18 tahun keatas. Adanya benturan peraturan inilah yang

¹⁶⁶ Sudirman, Sekertaris Desa Suntri, wawancara pada tanggal 30 Oktober 2017

menjadikan pemerintah desa tidak berdaya dan terkesan tidak konsisten untuk menerapkan peraturan desanya. Menurut penulis, hal ini bukan sepenuhnya kesalahan Pemerintah Desa Suntri, karena Undang-Undang Perkawinan 1974 pun cenderung lebih longgar dalam membatasi usia pernikahan.

Penulis menyimpulkan, bahwa Pemerintah Desa Suntri sudah mengimplementasikan sesuai peraturan yang telah ia buat yaitu mencegah pernikahan dini. Langkah-langkah yang dilakukan dalam mencegah pernikahan dini antara lain adalah dengan meningkatkan kinerja KPAD, sebuah institusi desa berbasis masyarakat yang bekerja untuk menjamin perlindungan anak, mensosialisasikan bahaya menikah dini baik formal maupun non formal, menolak memberikan izin calon mempelai yang usianya kurang dari 18 tahun dan juga menasehati orang tua pelaku nikah dini untuk mengurungkan niatnya agar anaknya tidak terjadi pernikahan dini. Namun dalam menasehati dan menolak memberikan izin, Pemerintah Desa Suntri masih dibuat tidak berdaya oleh desakan para orang tua pelaku nikah dini, karena dikhawatirkan kumpul kebo dan juga hamil diluar nikah, kekhawatiran inilah yang menjadi pertimbangan pemerintah desa yang akhirnya pemerintah desa membolehkan memberikan izin bagi calon mempelai, kemudian adanya benturan peraturan desa dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Perkawinan 1974 juga menjadi pemicu atau penghambat penyebab ketidak konsistennya Pemerintah Desa Suntri dalam mengimplementasikan peraturan desa, dimana Undang-Undang perkawinan

menghendaki calon mempelai apabila usianya sudah genap 16 tahun, sedangkan Peraturan Desa Suntri hanya menghendaki apabila calon mempelai usianya sudah 18 tahun keatas.

Menurut penulis, bila diruntut berdasarkan sistem hukum ketidak efektifan tersebut dipengaruhi dari struktur hukumnya yang kurang terprogram dan terseruktur dalam agenda memberikan sosialisai bahaya menikah dini, kemudian dari segi substansi hukumnya secara hierarki berbenturan dengan undang-undang yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, lalu secara kultur hukum masyarakatnya di Desa Suntri yang berada di daerah pegunungan masih memegang teguh tradisi *ngemblok*¹⁶⁷ (tradisi perjodohan). Begitu lekatnya tradisi tersebut dalam pikiran masyarakat, menyebabkan masyarakat hormat dan patuh pada tradisi ngemblok.

B. Analisis Hukum Islam Tentang Peraturan Desa Suntri Nomor 06 Tahun 2014 Terkait Batas Minimal Usia Perkawinan

Ketika berbicara batasan umur minimal perkawinan untuk menikah pada dasarnya dalam hukum Islam tidak mengatur secara eksplisit tentang batas umur perkawinan. Usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak. Islam tidak menentukan batas usia namun mengatur usia *baligh*¹⁶⁸ untuk siap menerima pembebanan hukum Islam. Pernikahan usia dini hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan

¹⁶⁷ Ngemblok adalah tradisi perjodohan yang dilakukan masyarakat Desa Suntri, seorang perempuan akan segera melaksanakan tradisi ngemblok agar terhindar dari istilah perawan tuwo sing gak payu rabi (perawan tua yang tidak laku menikah).

¹⁶⁸ *Baligh* adalah cukup umur. Lihat Departemen Agama Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. 3, 2005, hlm. 96.

rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan mudharat. Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan kehamilan.

Guna merealisasikan kemaslahatan tersebut dirasakan oleh Pemerintah Desa Suntri mengenai pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui Peraturan Desa Suntri No.06 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Peran dan tanggungjawab yang dilakukan Pemerintah Desa Suntri adalah melakukan tindakan pencegahan kepada calon mempelai yang ingin melangsungkan pernikahan apabila usianya kurang dari 18 tahun termasuk didalam kandungan yang bertujuan untuk menekan angka perkawinan dibawah umur dan meningkatkan kualitas pendidikan. Ini sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.¹⁶⁹

Adapun dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ketentuan usia kawin ini seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 aya (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya, agar

¹⁶⁹ Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.¹⁷⁰

Masalah pengaturan batasan umur dalam UU Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan masalah *ijtihadiah*, sebagai usaha pembaharuan pemikirn fiqh yang dirumuskan ulama terdahulu.¹⁷¹ Artinya tidak ada nash yang mengatur secara eksplisit mengatur persoalan tersebut. Namun secara implisit menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan muda dibawah ketentuan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Meskipun secara terang-terangan tidak ada petunjuk Al-Qur'an atau Hadist Nabi tentang batas usia perkawinan, namun secara implisit ada ayat Al-Qur'an dan begitu pula hadist Nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu.¹⁷² Al-Quran menyatakan dalam surat An-Nisa' ayat 9:

وَلِيَحْشَ الْذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”¹⁷³.

¹⁷⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 59.

¹⁷¹ *Ibid*, hlm. 60.

¹⁷² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 67.

¹⁷³ Al-Qur'an dan terjemahannya, *op.cit*, hlm. 101.

Ayat diatas memang tidak secara tegas berkaitan dengan persoalan batasan usia pernikahan tetapi bisa dimaknai bahwa untuk membentuk rumah tangga yang ideal maka kedua pasangan harus mempersiapkan segala hal yang dapat mendukung pencapaian tujuan itu. Seandainya kedua mempelai belum masak jiwa raganya bisa diprekdisikan bahwa pembentukan rumah tangga yang bahagia, sehat, dan matang akan sulit diwujudkan.¹⁷⁴

Dengan demikian, berdasarkan dasar hukum diatas menurut analisa penulis kebijakan pembatasan minimal usia pernikahan yang telah diatur dalam Peraturan Desa Suntri No.06 Tahun 2014 merupakan sebuah langkah yang sangat baik. Melihat pentingnya sebuah pernikahan, karena pernikahan merupakan suatu prosesi yang sangat sakral dan hanya dilakukan sekali seumur hidup, untuk itu diperlukan kedewasaan calon mempelai. Maksudnya setiap calon suami dan calon istri harus benar-benar telah matang fisik maupun psikisnya. Dengan harapan agar para pihak yang melangsungkan pernikahan mempunyai bekal lahiriyah dan bathiniyah yang cukup untuk membangun sebuah fondasi yang kokoh dalam bangunan rumah tangga.

Dalam literatur fiqh tidak ditemukan ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia minimal maupun maksiml untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam menyikapi persoalan batasan usia perkawinan. Di dalam hadits Rasulullah SAW hanya mengisyaratkan perintah menikah ketika seseorang telah mampu untuk melangsungkan perkawinan dengan sabdanya:

¹⁷⁴ Achmad Arief Budiman, *op.cit*, hlm. 34.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ¹⁷⁵ (رواه البخاري)

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang telah mampu menikah, maka menikahlah, karena sungguh menikah itu lebih menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka hendaknya dia berpuasa karena itu adalah perisai baginya.” (HR. Bukhari Muslim)

Kata **الْبَاءَةُ** ada beberapa bacaan mengenai kata ini. Yang paling masyhur huruf ba’ dibaca panjang dan disudahi dengan ta’ marbuttha. Kata ini diambil untuk makna nikah dari kata **الْمُبَاعَاةُ** yang berarti tempat tinggal yang dapat didiami oleh suami isteri, karena orang yang mengawini seorang perempuan harus menempatkannya disebuah tempat tinggal.¹⁷⁶

Para ulama’ berselisih pendapat tentang makna **الْبَاءَةُ**. Dan kesimpulan dari pendapat-pendapat mereka adalah berkisar pada salah satu dari dua makna atau keduanya; kemampuan untuk jima’ dan kemampuan untuk menanggung, yaitu nafkah dan tempat tinggal.¹⁷⁷ Dapat dimaknai bahwa dianjurkan bagi pemuda ingin menikah harus mampu menyediakan atau menanggung sarana pernikahan yaitu nafkah, tempat tinggal dan lain sebagainya. Dapat diprediksikan pemuda yang masih dini atau belum dewasa belum mampu menanggung atau mencukupi segala kebutuhan nafkah yang diperlukan dalam berumah tangga, karena pernikahan dini tentu sinergi

¹⁷⁵ Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, *Taisir Al-A’lām Syarh ‘Umdatul Al-Ahkam*, Penerjemah, Arif Wahyudi, et al., ‘*Syarah Hadits Hukum Bukhari Muslim*’, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2009, Cet. ke-2, hlm. 898.

¹⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 899.

¹⁷⁷ Asy-Syaikh Abu Abdurrahman, Adil bin Yusuf al-‘Azzazi, *Tamamul Minnah Shahih Fiqh Sunnah 3*, Penerjemah, Muhammad Anwar, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2011, Cet. ke-1, hlm. 21.

dengan SDM yang tidak berkualitas dengan SDM yang tidak berkualitas tentu mempengaruhi dalam perekonomian keluarga, dan tentu dengan ekonomi keluarga yang serba kurang maka ia tidak mampu untuk menanggung atau mencukupi nafkah.

Usia kedewasaan dalam Islam sering diidentikkan dengan *baligh*. Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan. Menurut jumhur ulama, salah satu orang yang dianggap telah baligh, apabila dia sudah bermimpi basah (*ihtilam*) bagi seorang laki-laki, dan mengalami menstruasi (*haidh*) bagi perempuan. Lebih lanjut apabila seseorang anak laki-laki berusia 15 tahun, atau telah tumbuh kumis dan bulu kemaluan, juga dipandang telah dewasa.¹⁷⁸

Sedangkan para ulama madzhab berbeda pendapat terhadap ketentuan baligh. Ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa batasan usia baligh bagi laki-laki dan perempuan adalah 17 atau 18 tahun. Hanafi berpendapat bahwa usia baligh adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali sama pendapat bahwa batasan usia baligh adalah pada usia sempurna 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.¹⁷⁹

Dapat dipahami konsep kedewasaan dalam hukum Islam tampaknya lebih menonjolkan pada aspek fisik. Padahal hal tersebut merupakan ciri-ciri pubertas yang hanya berkaitan dengan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kalau kedewasaan merujuk pada

¹⁷⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *op.cit*, hlm.155-157.

¹⁷⁹ Ali Imron, *op.cit*, hlm. 126-127.

semua tahap kedewasaan, maka pubertas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual dan kedewasaan fisik. Tetapi kedewasaan fisik saja tidak cukup bagi kehidupan berumah tangga. *Rusyd* (kematangan pikiran) adalah hal lain yang sama pentingnya. Namun, disisi lain kehidupan kita masa kini telah menjadi sangat rumit, sehingga muncul kesenjangan yang besar antara masa puber dan kedewasaan dalam urusan finansial maupun sosial. Secara fisikal, pemuda masa kini menjadi dewasa lebih cepat dari generasi-generasi sebelumnya, tetapi secara emosional, pemuda masa kini membutuhkan waktu jauh lebih panjang untuk mengembangkan kedewasaan.¹⁸⁰

Dengan demikian dapat diketahui bahwa kemaslahatan manusia akan selau berubah dan bertambah sesuai dengan kemajuan zaman. Dalam kondisi semacam ini, akan banyak timbul masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan dalam Al-Quran dan sunnah. Seperti mengenai pembatasan usia minimal pernikahan. Hal ini menjadi persoalan yang seruis dalam hukum Islam akan ketinggalan zaman. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat ditempuh menggunakan metode ijtihad. Tentu saja metode ijtihad tersebut harus didasarkan pada prinsip *maqashid syari'ah* (tujuan disyariatkannya), yaitu mewujudkan kemaslahatan untuk calon mempelai yang akan menikah.

Sehingga menurut analisa penulis kebijakan penetapan batasan usia pernikahan dalam Peraturan Desa Suntri tentang perlindungan anak yaitu tidak dibolehkannya menikah apabila calon mempelai usianya kurang dari 18 tahun, maka ini sesuai pada prinsip *maqashid syari'ah* (tujuan syara') yang

¹⁸⁰ Sayyid Muhammad Ridhwi, *op.cit*, hlm. 64.

mana termasuk al-maslahah ad-dharuriyat yaitu menjaga jiwa (*hifdzul nafs*) dalam hal ini menjaga jiwa dari calon ibu atau si bayi yang ditakutkan mengalami kematian ketika persalinan. Menjaga akal (*hifdzul aql*) pernikahan dini secara tidak langsung menghambat bahkan menutup berkembangnya pola pikir untuk menjadi manusia yang mumpuni. Menjaga keturunan (*hifdzul nasl*) hal ini bisa tercapai pada usia dimana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi sehingga akan menghasilkan keturunan yang baik dan unggul. Menjaga harta (*hidzul mal*) hal ini bisa tercapai apabila calon mempelai lebih mendahulukan pendidikan dan mengesampingkan pernikahan yang masih dini, karena dengan pendidikan maka akan membentuk SDM yang berkeualitas, dengan SDM yang berkualitas akan mampu mencukupi perekonomian keluarga.

Kemudian bila diruntut dari perspektif metodologi hukum Islam, kebijakan penetapan batasan minimal usia pernikahan yang terdapat dalam Peraturan Desa Suntri No.06 Tentang Perlindungan Anak didasarkan pada metode *maslahah mursalah* yaitu suatu metode ijtihad dalam hukum Islam dimana suatu maslahat yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya dan menolaknya.¹⁸¹ Penerapan metode ini mengcover persoalan-persoalan yang meskipun tidak diperintahkan atau dilarang oleh dua sumber utama hukum Islam, yakni Al-Quran dan al-Hadits, tetapi karena substansinya

¹⁸¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Bina Utama, 1994, hlm. 116.

diyakini dapat mendatangkan kemaslahatan secara umum, maka sebuah persoalan dapat ditetapkan sebagai aturan yang baku.¹⁸²

Berdasarkan Kongres Ulama Perempuan yang berlangsung di Cirebon yang diikuti ulama dan tokoh perempuan mancanegara sekitar 300 peserta ambil bagian dalam kongres tersebut, termasuk para ulama dan tokoh perempuan dari Afghanistan, Pakistan dan Malaysia. Konferensi yang berlangsung selama tiga hari dan sebagai pertemuan pertama di dunia ini mengeluarkan fatwa pelarangan pernikahan anak di bawah usia 18 tahun, sebagai upaya menghentikan gadis-gadis muda menikah dibawah umur. Fatwa tersebut, para ulama perempuan mengutip beberapa penelitian beberapa penelitian yang meneliti banyak pengantin anak Indonesia tidak dapat melanjutkan studinya setelah menikah dan setengah dari perkawinan itu berakhir dengan perceraian. Pernikahan dini tidak hanya membuat perempuan berhenti sekolah, namun juga meningkatkan resiko eksploitasi, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga dan kematian saat persalinan.¹⁸³

Pernikahan yang telah dewasa atau cukup umur dipandang telah mempunyai kesiapan fisik, psikis, sosial maupun kematangan dalam berpikir, sehingga dengan semua itu dipandang akan memudahkan seseorang dalam mengarungi lika-liku rumah tangga. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggungjawab. Pernikahan yang cukup umur akan mudah untuk mewujudkan tujuan pernikahan yaitu menciptakan keluarga yang kekal, bahagia serta harmonis.

¹⁸² Achmad Arief Budiman, *op.cit*, hlm. 35.

¹⁸³ <http://amp.dw.com/id/ulama-perempuan-larangan-pernikahan-usia-bawah-18-tahun/a-3862930> dikutip pada tanggal 19 Desember 2017 pukul 16:30 WIB

Sebaliknya pernikahan dibawah umur semesetinya dihindari karena membawa dampak yang sangat tidak baik, terutama bagi calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan dini tersebut. Dampak pernikahan dari pernikahan tersebut antara lain akan melahirkan keturunan yang lemah atau tidak berkualitas, tingkat ekonomi rendah, pendidikan rendah, tingkat fertilitas menjadi tinggi, sering terjadi percecokan dalam rumah tangga, bahkan berakhir pada perceraian.¹⁸⁴ Sehingga kesiapan fisik, psikis, sosial, maupun kematangan dalam berpikir harus diperhatikan. Meskipun para pihak sudah baligh, tidak serta merta diizinkan untuk melangsungkan pernikahan.

Dengan demikian, menurut pendapat penulis apa yang dilakukan Pemerintah Desa Suntri dengan menetapkan pembatasan minimal usia pernikahan yaitu tidak dibolehkannya menikah apabila calon mempelai usianya kurang dari 18 tahun, menurut penulis ini merupakan metode *sadd dzari'ah* yaitu suatu metode ijtihad dalam hukum Islam dengan mengedepankan kehati-hatian untuk menghindari atau menolak mafsadat. Artinya, suatu metode ijtihad dimana sesuatu yang sebenarnya dibolehkan, tetapi ternyata antara pertimbangan maslahat dan mafsadat dampaknya lebih berat mafsadatnya, maka pernikahan tersebut menjadi dilarang atau harus dicegah atau ditunda terlebih dahulu.¹⁸⁵

Menurut penulis, kaidah fihiyyah yang digunakan dalam permasalahan ini yaitu:

¹⁸⁴ M. Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur*, Bandung: Alumni, 2012, Cet. ke-1, hlm. 138.

¹⁸⁵ Muhyiddin, *Ushul Fiqh 1: Metode Penetapan Hukum dengan Adillat al-Ahkam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, Cet. ke-1, hlm. 140.

جلب المصالح ودرء المفاسد

Artinya: “*Meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan*”.¹⁸⁶

Maksudnya mengenai apa yang dilakukan Pemerintah Desa Suntri dengan membuat kebijakan pembatasan minimal usia pernikahan yang secara implisit terdapat dalam Peraturan Desa Suntri tentang perlindungan anak sebuah langkah yang sangat baik karena bertujuan meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Kemaslahatan yang ingin diraih adalah agar rakyatnya dapat mewujudkan tujuan daripada perkawinan yaitu keluarga yang kekal dan bahagia dan untuk mewujudkan pendidikan yang baik agar terwujudnya SDM yang berkualitas. Mafsadat yang ditolak adalah agar tidak terjadi perceraian pada rumah tangga rakyatnya karena perkawinan yang usianya masih muda dipandang mudah terjadi percecokan yang ditakutkan berujung pada perceraian.

Kaidah kedua yang digunakan penulis adalah:

تصرّف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “*Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan*”.¹⁸⁷

Tujuan kebijakan Pemerintah Desa Suntri adalah memberikan kemaslahatan kepada rakyatnya yaitu agar rakyatnya dapat mewujudkan tujuan pernikahan yang kekal dan bahagia. Maka kebijakan penguasa (perangkat desa) Desa Suntri sesuai dengan kaidah ini.

¹⁸⁶ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 27.

¹⁸⁷ *Ibid.* hlm. 147.

Kaidah ketiga yang digunakan penulis adalah:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكَةِ وَالْأَحْوَالِ

Artinya: "Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan."¹⁸⁸

Maksudnya ketetapan pembatasan usia pernikahan yang terdapat dalam Peraturan Desa Suntri tentang perlindungan anak berdasarkan perubahan zaman. Kehidupan masa kini telah menjadi sangat rumit, sehingga muncul kesenjangan yang besar antara masa puber dan kedewasaan dalam urusan finansial maupun sosial. Secara fisik, pemuda masa kini menjadi dewasa lebih cepat dari generasi-generasi sebelumnya, tetapi secara emosional, pemuda masa kini membutuhkan waktu jauh lebih panjang untuk mengembangkan kedewasaan.¹⁸⁹ Untuk itu meskipun mepelai sudah baligh dan secara hukum Islam apabila sudah baligh sudah dibolehkan untuk menikah, itu tidak serta merta dibolehkan melakukan pernikahan dini karena keadaan zaman sudah berubah.

¹⁸⁸ A. Ghazali Ihsan, *Kidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015, hlm. 98.

¹⁸⁹ Sayyid Muhammad Ridhwi, *op.cit*, hlm. 64.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang penulis kemukakan dalam bab sebelumnya, dapatlah penulis ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Suntri sudah mengimplementasikan Peraturan Desa Suntri No. 06 Tahun 2014 terkait perannya dalam mencegah pernikahan dini. Dalam hal upaya tersebut peran yang dilakukan Pemerintah Desa Suntri adalah meningkatkan kinerja KPAD, sosialisasi bahaya menikah dini, menolak atau menasehati calon mempelai yang belum mencapai umur 18 tahun. Hanya saja perannya tersebut dirasa belum maksimal karena masih ada beberapa kendala yaitu struktur hukumnya yang dalam memberikan sosialisasi bahaya menikah dini masih kurang terprogram dan terstruktur, substansi hukumnya secara hierarki berbenturan dengan undang-undang yang lebih tinggi yaitu UU Perkawinan 1974, lalu secara kultur hukum masyarakat di Desa Suntri masih memegang teguh tradisi *ngemblok*¹⁹⁰ (tradisi perjodohan) dan kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya menikah diusia cukup umur.
2. Hukum Islam sendiri secara eksplisit tidak mengatur batasan minimal usia nikah, akan tetapi syariat Islam menentukan batas usia kedewasaan menggunakan konsep baligh untuk siap menerima pembebanan hukum Islam. Dengan demikian ketentuan batasan minimal usia pernikahan yang

¹⁹⁰ Ngemblok adalah tradisi perjodohan yang dilakukan masyarakat Desa Suntri, seorang perempuan akan segera melaksanakan tradisi ngemblok agar terhindar dari istilah perawan tuwo sing gak payu rabi (perawan tua yang tidak laku menikah).

terdapat dalam Peraturan Desa Suntri Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena Pembatasan minimal usia nikah merupakan masalah *ijtihad* yang disesuaikan untuk menjawab tantangan zaman yang sekarang semakin berkembang.

B. Saran

Pada kesempatan ini penulis bermaksud memberikan saran-saran yang sekiranya bermanfaat diantaranya:

1. Alangkah baiknya jika dalam mensosialisasikan bahaya menikah diusia dini, para pihak Pemerintah Desa Suntri bisa lebih terprogram dan terstruktur, agar kedepannya sosialisasi tersebut bisa berjalan baik dan lebih efektif.
2. Hendaknya Peraturan Desa Suntri No. 06 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengenai pembatasan usia menikah dikaji ulang dan disesuaikan dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) mengingat secara hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan bahwa setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehinggapenulis dapat menyelesaikan skripsi yang masih sangat sederhana ini. Penulis menyadari telah berusaha semaksimal mungkin dalam skripsi ini, namun masih banyak kelemahannya.

Semua itu semata-mata karena keterbatasan dan kekhilafan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan sebagai penyempurnaan segala kekurangan dan kekeliruan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Koro, M., *Perlindungan Anak Di Bawah Umur*, Bandung: Alumni, Cet. ke-1, 2012.
- Abdullah Ismail al-Bukhari, Abu, *Shahih al-Bukhari*, Jilid 3, Nomor hadits 5066, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Abdulmanan Athibi, Ukasyah, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, khairil Halim, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abdurrahman Alu Bassam, Abdullah bin, *Taisir Al-A'llam Syarh 'Umdatul Al-Ahkam*, Penerjemah, Arif Wahyudi, et al., 'Syarah Hadits Hukum Bukhari Muslim', Jakarta: Pustaka as-Sunnah, Cet. ke-2, 2009.
- Abu Abdurrahman, Asy-Syaikh, Adil bin Yusuf al-'Azzazi, *Tamamul Minnah Shahih Fiqh Sunnah 3*, Penerjemah, Muhammad Anwar, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, Cet. ke-1, 2011.
- Abu Zahrah, Muhammad, *al ahwal al syakhsiyyah*, Qahirah: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957.
- Ahmad Saebani, Beni, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. ke-9 2009.
- Al-Mufarraj, Sulaiman, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, kata mutiara*, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, Jakarta: Qisthi Press, 2003.
- Alhamdani, H.S.A, *Risalah Nikah*, IAIN Walisongo cabang Pekalongan: Raja Murah, 1980.
- Arief Budiman, Achmad, *Pernikahan Usia Dini di Kota Semarang*, Penelitian Individual, Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo, 2008.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. ke-13, 2006.
- Ash Shidieqy, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, jilid 2, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Baroroh, Umul, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Departemen Agama Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. ke-3, 2005.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Mekar Surabaya, 2002.

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.

Djubaidah, Neng, *Pecatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

Fatah, Abdul dan Abu Hamdi, *Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta : Rineka Cipta, 1994.

Fauzil Adhim, Mohammad, *Indahnya Perkawinan Dini*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke-1, 2002.

Ghozali Ihsan, A., *Kidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015.

Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Juz IV, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1983.

Hosein, Ibrahim, *Fikih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk* Jakarta: Ihya Ulumudin, 1971.

<http://amp.dw.com/id/ulama-perempuan-larangan-pernikahan-usia-bawah-18-tahun/a-3862930>

Imron, Ali, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, Cet. ke-1, 2015.

Intruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 tentang Usia Perkawinan dalam Rangka Mendukung Program Kependudukan dan Keluarga Berencana, ditetapkan tanggal 24 Juli 1983.

J. Moeloeng, Lexi., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2001.

Karim, Helmi, dalam Huzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshari H.Z. (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Kedua, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

Kompilasi Hukum Islam

- M. Friedman, Lawrence, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Penerjemah: M. Khozim, "*Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*", Bandung: Nusa Media, Cet. ke-4, 2011.
- Manan, Abdul, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Perasada, 2000.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, Cet. ke-1, 2016.
- _____, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet. ke-1, 2011.
- Muchtar, Kamal, *Asas² Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. ke-1, 1974.
- Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Ali Syaikh, 'Abdullah bin, *Tafsir Ibnu Katsir*, M. 'Abdul Goffar, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Teungku, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum I*, Edisi Kedua, Jakarta: Magenta Bhakti Guna, 1994.
- Muhammad Ridhwi, Sayyid, diterjem, Muhammad Hasyim, *Perkawinan Moral dan Seks dalam Islam*, Jakarta: Lentera, 1994.
- Muhyiddin, *Ushul Fiqh 1: Metode Penetapan Hukum dengan Adillat al-Ahkam*, Semarang: Karya Abadi Jaya, Cet. ke-1, 2015.
- Mutawwali Sya'rawi, Muhammad, *Fiqh Wanita*, Jakarta : Pena Pundi Akasara, 2007.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. ke-10, 2009.
- Nasution, S., *Metode research*, Jakarta: Bumi Akasara, 2010.
- Quraish Shihab, M., *Tafsir al Misbah, Vol. IX*. Jakarta : Lentera Hati, Cet. ke-6, 2005.
- Rahman Ghozali, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. ke-7, 2015.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.

_____, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Saleh, Watjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Balai Aksara, 1987.

Subekti, R., R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pramoodya paramita, Cet. ke-37, 2006.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet. ke-4, 2008.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Suratman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Syafe'I, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh (Untuk IAIN, STAIN, PTAIS)*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

_____, Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Jakarta: Prenada Media, Cet. ke-2, 2008.

TAP MPR No.III/MPR/2000

Tihami, M.A dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. ke-3, 2013.

Tim Redaksi Fokus Media, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kompilasi Hukum islam*, Bandung: Fokus Media, 2005.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Wahab Khalaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Bina Utama, 1994.

Warson Al-Munawwir, Ahmad, *Kamus Al Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.

Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif* , Yogyakarta: Mitra Usaha, 2001.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas

Nama : Dul Manan

Jenis kelamin : Laki-laki

Tempat/tanggal lahir : Rembang, 12 September 1995

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Desa Dadapmulyo Kec. Sarang Kab. Rembang

HP/Email : 081539234201/dulmanan.1212@gmail.com

Nama Orang Tua : H. Ruslan (Ayah) / Hj. Kiswati (Ibu)

II. Latar Belakang Pendidikan

SD Negeri 1 Dadapmulyo	Lulus	2007
SMP Negeri 1 Sarang	Lulus	2010
SMA Negeri 1 Kragan	Lulus	

LAMPIRAN

- 1. Surat Izin Riset**
- 2. Balasan Surat Riset**
- 3. Peraturan Desa Suntri**
- 4. Buku Catatan Kehendak Nikah Desa Suntri**
- 5. Hasil Wawancara**
- 6. Gambar Proses Wawancara**
- 7. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi**

1. Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-2789/Un.10.1/D1/TL.01/9/2017

28 September 2017

Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal

Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

Kepala Desa Suntri Kec. Gunem Kab. Rembang
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : Dul Manan
NIM : 132111118
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"PERAN PEMERINTAH DESA SUNTRI KEC. GUNEM DALAM MENCEGAH
PERNIKAHAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PERDES 23 PERATURAN DESA
SUNTRI NO.06 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)"**

Dosen Pembimbing I : Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph. D
Dosen Pembimbing II : Hj. Brilliyani Erna Wati, SH. M.Hum

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu yang diberikan kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



2. Balasan Surat Riset



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG KECAMATAN GUNEM DESA SUNTRI

Nomor : 045.2 /118/VIII/ 2017
Lampiran :
Hal : Pembalasan Permohonan Izin Riset

3 Oktober 2017

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembalasan Surat UIN Walisongo Fakultas Syari'ah dan Hukum Semarang No. B-2789/Un. 10.1/D1/TL.01/9/2017 tanggal 28 September 2017 tentang Izin Riset dalam rangka menyusun skripsi dengan judul **"PERAN PEMERINTAH DESA SUNTRI KEC. GUNEM KAB. REMBANG DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI (STUDI PASAL 23 PERATURAN DESA SUNTRI NO.06 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)"** di Desa kami dengan identitas:

Nama : Dul Manan
NIM : 132111118
Jurusan : Ahwal As-Syakhsiyah

dengan ini kami tidak berkeberatan dan akan menerimanya.

Demikian surat ini dibuat atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



3. Peraturan Desa Suntri



PERATURAN DESA SUNTRI
NOMOR : 06 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUNTRI

Menimbang :

- a. Bahwa anak adalah amanah Illahi yang perlu dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi;
- b. Bahwa anak generasi penerus yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- c. Bahwa hasil analisa situasi hak anak di Desa Suntri perlu perlindungan;
- d. Bahwa untuk perlindungan dan kesejahteraan anak di Desa Suntri diperlukan dukungan;

Mengingat :

1. Undang - Undang nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang per kawinan;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Convention On The Elimination of all for of Diskrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29 Tambahan lembaran Negara Nomor 3277);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak;(Lembaran Negara Tahun 1997 No 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
6. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat;(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang pengesahan ILO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age for Admition to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, tambahan lembaran Negara Nomor 3835);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang pengesahan ILO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age for Admition to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, tambahan lembaran Negara Nomor 3835);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia;(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

10. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan segera
11. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang otonomi daerah;
14. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 95, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan; informasi publik;
16. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;
17. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2004 tentang kewenangan desa;
18. Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan
19. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 77/HUK/2010 tentang pedoman dasar Karang Taruna;
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 02 tahun 2009 tentang kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNTRI

dan

KEPALA DESA SUNTRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I KETENTUAN

UMUM Pasal 1.

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ke tiga;
4. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami hambatan fisik, mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar;
5. Hak anak adalah bagian hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara;
6. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial atau organisasi kemasyarakatan;
7. Pendamping adalah pekerja sosial yang ditunjuk oleh KPAD
8. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak putus sekolah, anak berkebutuhan khusus, anak korban kekerasan dalam rumah tangga, anak yatim dan/atau yatim piatu, anak korban perlakuan salah, anak dari keluarga tidak mampu, anak korban kekerasan lainnya, dan anak korban penelantaran;
9. Anak putus sekolah adalah anak yang tidak selesai dalam kegiatan wajib belajar dua belas tahun;
10. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan diusia anak;
11. Partisipasi anak adalah keterlibatan anak dalam setiap pengambilan kebijakan publik;
12. Anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang melakukan tindakan pelanggaran hukum;
13. Pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang diberikan sejak usia 0 - 6 tahun;
14. Kesehatan anak adalah kesehatan yang diberikan sejak 0-18 tahun;
15. Kewajiban anak adalah tindakan yang harus dilakukan oleh anak;
16. Komite Perlindungan Anak Desa adalah sebuah lembaga perlindungan anak berbasis masyarakat yang selanjutnya disingkat KPAD;
17. Waktu luang anak adalah waktu di luar jam sekolah.
18. Pekerja anak adalah anak yang melakukan pekerjaan dalam rangka komersial;
19. Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda diwilayah desa / kelurahan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Prinsip-prinsip Perlindungan Anak meliputi:

- a. non diskriminasi dan non eksploitasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap anak;

Pasal 4

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Desa Suntri yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 5

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Pasal 6

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;

Pasal 7

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;

Pasal 8

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 10

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;

Pasal 11

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 12

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 13

Setiap anak yang berkebutuhan khusus berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. ,

Pasal 14

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 16

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 17

- 1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- 2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- 3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;

Pasal 18

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 19

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 20

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orangtua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian kesatu

Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa

Pasal 21

Pemerintah Desa wajib terlibat dan bertanggungjawab dalam hal:

- a. Mensosialisasikan program wajib belajar 12 tahun kepada masyarakat;
- b. Melakukan koordinasi dengan dinas terkait dalam pemenuhan wajib belajar;
- c. Mengupayakan kerjasama dengan pemerintah dan swasta dalam upaya pendidikan dan pelatihan kecakapan hidup;
- d. Mengupayakan terselenggaranya pendidikan anak usia dini;
- e. Mengupayakan beasiswa;

Pasal 22

Pemerintah Desa wajib dan bertanggungjawab di bidang kesehatan antara lain :

- a. koordinasi dengan dinas terkait dalam rangka kesehatan masyarakat
- b. posyandu di setiap dusun;
- c. forum desa siaga

Pasal 23

1. Pemerintah Desa bertanggung jawab mencegah pernikahan dini.
2. Tanggungjawab Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. melakukan koordinasi dengan dinas dan kantor terkait;
 - b. tidak mengeluarkan ijin menikah kecuali atas rekomendasi Pengadilan Agama;
 - c. berpedoman pada batasan usia anak dalam UUPA;

Pasal 24

Pemerintah Desa bertanggungjawab menyelenggarakan ruang publik untuk partisipasi anak.

Bagian kedua

Peran Dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 25

Peran dan tanggungjawab masyarakat terhadap pendidikan anak :

- a. membantu menyediakan fasilitas sekolah,
- b. mendorong minat belajar anak;
- c. mendorong tuntas belajar 12 tahun;
- d. mendorong peran komite sekolah yang ramah anak;
- e. mendorong memberi kesempatan anak berkreaitifitas di luar jam sekolah;
- f. mendorong dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan KPAD;

Pasal 26

Peran dan tanggungjawab masyarakat terhadap kesehatan anak :

- a. mensosialisasikan perilaku hidup bersih dan sehat;
- b. mendorong sarana dan prasarana posyandu
- c. mendorong terwujudnya program dan kegiatan desa siaga

Pasal 27

Peran dan tanggungjawab masyarakat terhadap pencegahan pernikahan usia dini meliputi:

- a. ikut terlibat mensosialisasikan undang - undang perlindungan anak;
- b. ikut terlibat mensosialisasikan bahayanya menikah di usia anak berkaitan dengan kesehatan reproduksi;
- c. ikut bertanggungjawab dalam pencegahan pernikahan dini;

Pasal 28

Peran dan tanggungjawab masyarakat terhadap keamanan lingkungan:

- a. berperan dan bertanggungjawab menjaga lingkungan dan keamanan yang aman bagi anak (perlu penjelasan);
- b. berperan dan bertanggung jawab terwujudnya lingkungan yang ramah anak;

Bagian ketiga

Kewajiban dan Tanggung jawab Keluarga dan Orang tua

Pasal 29

Kewajiban dan tanggungjawab keluarga dan orang tua terhadap pendidikan anak :

- a. menyekolahkan anaknya pada pra sekolah;
- b. menyekolahkan anaknya wajib belajar 12 tahun;
- c. memberikan kesempatan pada anaknya untuk mengikuti pendidikan setinggi-tingginya sesuai dengan bakat, dan kemampuannya;
- d. memberi kesempatan untuk pendidikan luar sekolah;

Pasal 30

Kewajiban dan tanggungjawab keluarga dan orang tua terhadap kesehatan anak:

- a. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat setiap anggota keluarga;
- b. melakukan tindakan awal melalui tenaga medis terdekat;

- c. memberikan pola makan dengan gizi seimbang;
- d. menyediakan waktu bermain dan beristirahat bagi anak;

Pasal 31

Kewajiban dan tanggungjawab keluarga dan Orang tua terhadap hak anak lainnya :

- a. mencegah pernikahan dini
- b. melengkapi dokumen kependudukan.
- c. kesempatan menyampaikan pendapatnya, dihargai, didengar dan dihormati.

BAB V PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN Bagian kesatu Perlindungan Khusus

Pasal 32

Pemerintahan Desa, Komite Perlindungan Anak Desa (KPAD), dan lembaga desa lainnya wajib dan bertanggung jawab memfasilitasi perlindungan khusus untuk anak yang berkonflik dengan hukum, anak putus sekolah, anak berkebutuhan khusus, anak korban kekerasan dalam rumah tangga, anak yatim, anak piatu, atau anak yatim piatu, anak korban perlakuan salah, anak dari keluarga miskin, dan anak korban kekerasan lain.

Pasal 33

Perlindungan khusus yang diberikan pada anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 adalah:

- a. anak sebagai pelaku, anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi;

Pasal 34

1. Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf a dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana di maksud dalam pasal 33 huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan harkat, martabat dan hak-hak anak;
 - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian dan jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari lebelisasi.

Waktu Luang Bagian kedua Pasal 34

1. Dalam mendukung peningkatan kreatifitas anak pemerintah desa, lembaga desa, masyarakat, keluarga, dan orang tua memberi kesempatan pada anak untuk beristirahat, bermain, belajar, berolahraga, berorganisasi, berinteraksi, bereksplorasi dan apresiasi kepada anak.
2. Dukungan peningkatan kreatifitas anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) agar anak menggunakan waktu luangnya secara optimal.
3. Penggunaan waktu luang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pemerintah desa menentukan jam wajib belajar bagi siswa didik.
4. Jam wajib belajar bagi siswa didik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberlakukan mulai jam 18.30 sampai jam 20.00 Waktu Indonesia Barat.
5. Pada waktu jam belajar masyarakat diharapkan mendukung terlaksananya kegiatan belajar anak.

Bagian Ketiga Anak Sebagai Peserta Kegiatan

Pasal 35

Persetujuan dari anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 terdiri dari:

- a. bersedia atau tidak anak untuk ikut berkegiatan;
- b. bersedia atau tidak anak untuk difoto;
- c. bersedia atau tidak anak di tugs identitasnya;
- d. bersedia atau tidak anak untuk diwawancarai;

BAB VI Komite Perlindungan Anak Desa

Pasal 36

Dalam rangka meningkatkan efektifitas perlindungan anak, dengan Peraturan Desa ini dibentuk Komite Perlindungan Anak Desa yang independen:

1. Keanggotaan Komite Perlindungan Anak Desa terdiri dari 1 (Satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, 2 (dua) orang sekretaris, 2 (dua) orang bendahara dan beberapa devisi.
2. Keanggotaan Komite Perlindungan Anak Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintahan desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan lembaga kemasyarakatan Desa.
3. Keanggotaan Komite Perlindungan Anak Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat 2 (dua) dibentuk dan disahkan melalui surat keputusan Kepala Desa setelah mendapat pertimbangan Badan Permusyawaratan Desa, untuk masa bakti 3 (tiga) tahun, dan dapat di pilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan lembaga, mekanisme kerja, dan pembiayaan di atur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 37

Komite Perlindungan Anak Desa mempunyai tugas :

- a. melakukan sosialisasi peraturan desa tentang Perlindungan Anak, mengumpulkan data dan menerima informasi, menerima pengaduan masyarakat melakukan penelusuran, dan pendampingan;
- b. memberikan laporan, saran, kritik dan masukan kepada Kepala Desa dalam rangka Perlindungan anak;

Pasal 38

Komite Perlindungan Anak Desa mempunyai fungsi:

- a. mediasi dan penanganan kasus anak;
- b. koordinasi dengan pemerintahan desa;
- c. advokasi kebijakan perlindungan anak;

Pasal 39

Karang Taruna

- a. Anggota Karang Taruna yang selanjutnya disebut Warga Karang Taruna adalah setiap anggota masyarakat yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun yang berada di desa/kelurahan.
- b. Organisasi kepemudaan tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status social, stastus ekonomi, kondisi fisik maupun kondisi psikis anak desa, sebagai media aspirasi hak-hak anak, pengembangan bakat potensi anakserta etika dan akhlak sesuai dengan harkat dan martbat manusianya.
- c. Memprioritaskan progam kerja pada peningkatan kapasitas anak baik secara individu maupun kelompok.
- d. Dalam kegiatan dibantu dan dibimbing oleh Pemerintah Desa, LPMD dan KPAD.
- e. Membantu mempromosikan hak anak dan perlindungan anak bekerja sama dengan kelembagaan desa yang lain.
- f. Mendokumentasikan kegaitan Karang Taruna.
- g. Memiliki secretariat yang disediakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 40

TUJUAN KARANG TARUNA

Karang Taruna bertujuan untuk mewujudkan :

- a. Pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota masyarakat yang berkualitas, terampil. Cerdasa, inovatif, berkarakter serta memiliki kesadaran dan tanggungjawab social dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan social, khususnya generasi muda.
- b. Kualitas kesejahteraan social setiap anggota masyarakat terutama generasi muda di desa / kelurahan secara terpadu, terarah, menyeluruh serta berkelanjutan;
- c. Pengembangan usaha menuju kemandirian setiap anggota masyarakat terutama genarasi muda;
- d. Pengembangan kemitraan yang menjamin peningkatan kemampuan dan potensi generasi muda secara terarah dan berkesinambungan.
- e. Melakukan pembinaan generasi muda dan mencetak kader-kader professional di desa melalui Forum Anak Desa (FAD)

Pasal 41

FORUM ANAK DESA (FAD)

- a. Forum Anak Desa (FAD) yang terdiri unsure anak usia 0 – 18 th tidak membedakan suku ras, ras, agama, jens kelamin, status social, status ekonomi, kondisi fisik maupun kondisi psikis anak desa, sebagai sebagai media aspirasi hak-hak anak, pengembangan bakat potensi anak serta Erika dan akhlak anak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.

- b. Memprioritaskan program kerja pada peningkatan kapasitas anak baik secara individu maupun kelompok.
- c. Dalam melakukan kegiatan dibantu dan di bombing oleh Karang Taruna dan KPAD.
- d. Membantu mempromosikan hak anak dan perlindungan anak bekerja sama dengan kelembagaan desa yang lain.
- e. Mendokumentasikan kegiatan FAD.
- f. Memiliki secretariat yang disediakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 42

- a. Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkan Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak ini dibebankan pada APB Desa.
- b. Iuran warga
- c. Usaha sendiri yang diperoleh secara sah.
- d. Alokasi Dana Desa (ADD)
- e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat

BAB VII KETENTUAN

PENUTUP Pasal 43

Keputusan Peraturan Desa Perlindungan Anak Desa Suntri ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat perkembangan atau perundang-undangan akan dilakukan penyesuaian seperlunya.

Ditetapkan di : Suntri

Pada tanggal : 25 Maret 2014

Kepala Desa Suntri



4. Buku Catatan Kehendak Nikah Desa Suntri

A. Tahun 2011

Lampiran 25 PMA No. 2 Tahun 1990
Pasal 4 ayat (2)
Model N10

BUKU CATATAN KEHENDAK NIKAH

No- mor Urut	Tanggal laporan	Nama, Umur, Warga negara, Pekerjaan, Tempat tinggal			Tanda tangan a. Kepala Desa/ Kelurahan b. Pembantu PPN	Tanggal akad nikah dilaksanakan	Nomor, tanggal akta nikah	Biaya pencatatan	Tanda tangan PPN	Keterangan
		Calon Suami (terangkan jejak, duda atau beristri)	Calon Istri (terangkan perawan, atau janda)	Wali (terangkan status dan hu- bungannya dengan calon istri)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	21/2011	-	Jarmi janda cerai Rtg 446/141/2001/ PA/R06 Des Suntri	Jarman ayah kandung		Rekomendasi	-		-	474.162/1/ 2011
2.	24/2011	Nur Philipin Rtg 17-6-1989 Jeyaka Des Suntri	Sulis Setyo Rini Rtg 18-09-1995 Pernikahan PA perawan Des Suntri	Sutarni Rtg 25-8-1979 Ayah kandung		4 Februari 2011 Jam 9.00 WIB Des Kanti	-		-	474.197/1/ 2011
3.	25/2011	Superhin Rtg 9 sept 1976 Duda cerai Des Suntri	Sukarna Rtg 10/1 Juli 1984 janda mati	Sarpin Rtg 08-07-1953 Ayah kandung		Kanis janda cerai 18 Maret 2011 jam 10.00	38/24/1/ 2011		-	474.2/25/ 2011 474.3/25/ 2011
4.	27/2011	Rurtamari Rtg 08-09-1985 Duda Cerai Des Tegaldawa	Siti Hartina Rtg 25-08-1987 janda cerai Des Suntri	Ngarpan Rtg 02-03-1959 Ayah kandung Naras		Jum'at 18 Maret 2011 jam 09.00 Des Kanti KUA	28/14/1/ 2011		-	474.4/27/ 2011

Lampiran 25 PMA No. 2 Tahun 1990
Pasal 4 ayat (2)
Model N10

BUKU CATATAN KEHENDAK NIKAH

No- mor Urut	Tanggal laporan	Nama, Umur, Warga negara, Pekerjaan, Tempat tinggal			Tanda tangan a. Kepala Desa/ Kelurahan b. Pembantu PPN	Tanggal akad nikah dilaksanakan	Nomor, tanggal akta nikah	Biaya pencatatan	Tanda tangan PPN	Keterangan
		Calon Suami (terangkan jejak, duda atau beristri)	Calon Istri (terangkan perawan, atau janda)	Wali (terangkan status dan hu- bungannya dengan calon istri)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	23/2011	Sanghi	-	-		-	-	-	-	474.5/12/1/ 2011 Numpang Nikah Des Tegaldawa
6	23/2011	Sutarnan Rtg 21-11-1985 Jeyaka Des Tegaldawa	Hartim Rtg 27-01-1994 perawan Des Suntri	Juli Rtg 31-03-1955 Ayah kandung Des Suntri		Jum'at 8 April 11 jam 16.00	56/07/1/ 2011		-	474.6/23/ 2011 474.7/17/1/ 2011
7.	23/2011	Sutikno Rtg 10-10-1988 Duda Cerai Des Tegaldawa	Sutrisni Rtg 21-11-1992 Des Suntri perawan	Ngarpan Rtg 02-03-1959 Ayah kandung Des Suntri		Senin 23 Mei jam 16.00 WIB	96/19/0/ 2011		-	474.8/07/ 2011
8	23/2011	Subri Rtg 25-08-1987 Des Tegaldawa Jeyaka	Ana Shigani Rtg 02-05-1995 perawan Des Suntri	Suarni Rtg 01-07-1969 Ayah kandung Des Suntri		Jum'at 17 Juni 11 jam 16.00 WIB	112/09/ 2011		-	474.9/23/ 2011

BUKU CATATAN KEHENDAK NIKAH

Lampiran 15 PMA No. 2 Tahun 19
Pasal 4 ayat 2
Model N

No-mor Urut	Tanggal Laporan	Nama, Umur, Warga negara, Pekerjaan, Tempat tinggal			Tanda tangan a. Kepala Desa/ Kurahan b. Pembantu PPN	Tanggal akad nikah dilangsungkan	Nomor, tanggal akta nikah	Biaya pencatatan	Tanda tangan PPN	Keterangan
		Calon Suami (terangkan jejak, duda atau beristri)	Calon Istri (terangkan perawan, atau janda)	Wali (terangkan status dan hubungannya dengan calon istri)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Rabu 25/6/11	Suyatno Rtg 23 Juni 1988 janda Dr Tegaldono	Nur Kholisah Rtg 04-05-1995 perawan Dr Suntri	Sabri Rtg 30-09-1964 Ayah kandung Nadig		Jumat 10 Juni 11 jam 4 sore	106/02/ VI/2011			474-10/ 25/VI/2011
10		Suyanto	Rekomendasi	-						474-11/VI/ 2011
11	Rabu 1/6/2011	Suparman Rtg janda Dr Suntri	Suwardinah Rtg 12-10-1992 Binti Kurni Dr Kurni Rt 01/RW 03	Saman kakak		Minggu 26 Juni 11 jam 10.00 WIB	121/18/VI/ 2011			474-12/VI/ 2011
12	Minggu 12/6/11	Sutrisno Rtg 07-07-1965 Duda Cerai Dr Suntri	Suciati Rtg 03 oktober 1991 janda Cerai Dr Sulang	Sukeani Rtg 8/2/1951 Ayah kandung Dr Sulang		Jumat Minggu 1 Juli 2011 jam 09.00 Dr Kurni KVA	125/01/ VII/2011			474-13/VI/ 2011
13	Senin 19/6/2011	M. Iqbal Afandi Rtg 27-01-1988 janda Dr Lemah Abang Kec Tamung Kab Badak	Nur Hossanah Rtg 18-06-88 perawan Dr Suntri	Wanuri Rtg 14-12-50 Naras Ayah kandung		Minggu 26 Juni jam 8.30 Dr Suntri	119/16/ VI/2011			474-14/VI/ 2011

BUKU CATATAN KEHENDAK NIKAH

Lampiran 15 KMA No. 298 Tahun 2003
Pasal 4 ayat 2
Model N - 10

Nomor Urut	Tanggal Laporan	Nama, Umur, Warganegara, Pekerjaan, Tempat tinggal			Tanda tangan a. Kepala Desa/Kelu- rahan b. Pembantu PPN	Tanggal Akad nikah dilangsungkan	Nomor, Tanggal Akta Nikah	Biaya pencatatan	Tanda Tangan PPN	Keterangan
		Calon Suami (terangkan jejak, duda atau beristri)	Calon Istri (terangkan perawan atau janda)	Wali (terangkan status dan hubungannya dengan calon istri)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	31 6-12-2006	Wawan Suherman jejak Dr Ngampel Taw Umur 18 th	Siti Waijah perawan Umur 15 th	Satipin Ayah kandung		30 Des 06				
2	29-06-2011 Rabu	Sulkan Rtg 02-11-1986 Dr Imbrangan jejak	Pinur Anik Rtg 24-06-1994 perawan Dr Suntri	Sujiman Rtg 05-12-1964 Ayah kandung		Kamis 21-02-11 jam 16.00 WIB	141/17/VII/ 2011			474-15/29/ VI/2011
3	1-07-11 Jum'at	Jubedi Rtg 22-11-1982 Dr Sumberejo Kec Pamotan Aude	Icha Imro'ah Rtg 31-12-1989 janda cerai Suntri	Jazuli Rtg 15-03-1950 Ayah kandung		Jum'at 29-02-11 jam 09.00 WIB	151/27/ VII/2011			474-16/1/ VII/2011
4	1-07-11 Jum'at	Suyadi Rtg 28-03-86 Dr Tegaldono jejak	Ngatijah Rtg 18-12-84 perawan Suntri	Sukibani Rtg Ayah kandung		Sabtu 23-07-11 jam 16.00 WIB	45/21/ VII/2011			474-17/1/ VII/2011
5	2-7-11 Sabtu	Arianto Rtg 4-3-1987 jejak Suntri	Lia Ariantia Rtg 1-02-1995 perawan Suntri	-		Selasa 19 Juli 2011 jam 14.00 WIB	138/14/ VII/2011			474-18-19/ 2/VII/2011
6	9-7-11 Sabtu	Rendi Rtg 01-01-1986	Numpang di Dr Tegaldono	-		-	-	-	-	474-19/9/ VII/2011

Catatan: Kolom 7 s/d 10 diisi oleh PPN










BUKU CATATAN KEHENDAK NIKAH

Nomor Urut	Tanggal Laporan	Nama, Umur, Warganegara, Pekerjaan, Tempat tinggal			Tanda tangan a. Kepala Desa/Kelu- rahan b. Pembantu PPN	Tanggal Akad nikah dilangsungkan	Nomor, Tanggal Akta Nikah	Biaya pencatatan	Tanda Tangan PPN	Keterangan
		Calon Suami (terangkan jejak, duda atau beristri)	Calon Istri (terangkan perawan atau janda)	Wali (terangkan status dan hubungannya dengan calon istri)						
		Bila duda atau janda jelaskan a. Akta cerai/kutipan buku pendaftaran talak/cerai b. Surat keterangan matinya suami/istri								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	20-08-2011	Ali Imron Rbg Ds Suntri Jajaka	Irma Nurliha Rbg 22-08-1984 Perawan Ds Sridadi Kec. Rembang Kab. Rembang	Muslim 49 th Paman Ds Ringin Pamotan		Juni At Suntri 9 sept 2011 Juni 09 30 WIB	159/03 IX/2011			474-20/20/ VIII/2011
8	20/08/2011	Sumaji Rbg 10-11-1982 Jajaka Ds Suntri	Sutini Rbg 29-05-1991 Perawan Ds Suntri	Sukijan Rbg Ayah kandung Ds Sumberrejo		Rahm 7 sept 2011 Juni 09 00 WIB	171/15/ X/2011			474-21.22/ 20/VIII/ 2011
9	23/9/2011	Sumari Rbg 9-2-1905 Ds Jombang Kec. Sarang Jajaka	Siti Fatimah Rbg 03-06-1983 Ds Suntri Janda Cerai	Japan Rbg 10-09-1964 Ayah kandung Ds Suntri		Senin 12 sept 2011 Juni 16 00 WIB	181/25/ IX/2011			474-22/23/ VIII/2011
10	23/8/2011	Kharul Haidi	(Rekomendasi)	-	-	-	-	-	-	474-23/23/ VIII/2011
11	23/8/2011	Epiyadi Rbg 18-07-1986 Nasab Jajaka	Hidayati Rbg 13-06-95 Perawan	Rafiman Rbg 10-6-68 Nasab Ds Suntri Ayah kandung		Juni At 9 sept 11 Juni 09.00 WIB	177/21/ IX/2011			474-24/23/ VIII/2011
12	27/8/11	Agus Nur Fathoni Rbg 6 April 1980 Jajaka Ds Suntri	-	-	-	-	-	-	-	474-25/27/ VIII/2011

Catatan : Kolom 7 s/d 10 diisi oleh PPN

BUKU CATATAN KEHENDAK NIKAH

Model N - 1

Nomor Urut	Tanggal Laporan	Nama, Umur, Warganegara, Pekerjaan, Tempat tinggal			Tanda tangan a. Kepala Desa/Kelu- rahan b. Pembantu PPN	Tanggal Akad nikah dilangsungkan	Nomor, Tanggal Akta Nikah	Biaya pencatatan	Tanda Tangan PPN	Keterangan
		Calon Suami (terangkan jejak, duda atau beristri)	Calon Istri (terangkan perawan atau janda)	Wali (terangkan status dan hubungannya dengan calon istri)						
		Bila duda atau janda jelaskan a. Akta cerai/kutipan buku pendaftaran talak/cerai b. Surat keterangan matinya suami/istri								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Selasa 13/9/2011	Sumarno Rbg 06-03-1984 Jajaka	-	-		-	-	-		474-26/13/ IX/2011
14.	Sabtu 15/10/2011	Euprayitno Rbg Jajaka 18-04-1984	-	-		-	-	-		474-27/15/ X/2011
15.	Minggu 28/10/2011	Surito Rbg 6-01-1982 Duda Cerai Ds Iga elan	Sulastri Rbg 24-03-1991 Janda Cerai	Jumari Rbg 15-03-64 Ayah kandung		Sabtu 5 NOV 2011 jam 16.00 WIB	189/04 X/2011	-		474-28/23 X/2011
16	Senin 21/10/2011	Atang Mulya Sam Rbg 21-08-1988 Ds Suntri perawan	Sofiqatun Rizka Rbg 14-10-1995 perawan Ds Suntri	Karni Rbg 12-07-1966 Ayah kandung		Rabu 16 NOV 11 jam	234/31/XI 28/11	-		474-29/30/ 31/X/2011
17	Kamis 3/11/2011	Al Khundori Rbg 28-09-1989 Ds Suntri Jajaka	-	-		-	-	-	-	474-31/03 XI/2011
18	Sabtu 2011	Tahun 2011 NIKAH = 31 orang	-	-	-	-	-	-	-	-

Catatan : Kolom 7 s/d 10 diisi oleh PPN

BUKU CATATAN KEHENDAK NIKAH

 Lampiran 16 KMA No. 298 Tahun 2003
 Pasal 4 ayat 2

Model N - 10

Nomor Urut	Tanggal Laporan	Nama, Umur, Warganegara, Pekerjaan, Tempat tinggal			Tanda tangan a. Kepala Desa/Kelurahan b. Pembantu PPN	Tanggal Akad nikah dilangsungkan	Nomor, Tanggal Akta Nikah	Biaya pencatatan	Tanda Tangan PPN	Keterangan
		Calon Suami (terangkan jejak, duda atau beristri)	Calon Istri (terangkan perawan atau janda)	Wali (terangkan status dan hubungannya dengan calon istri)						
		Bila duda atau janda jelaskan a. Akta cerai/kutipan buku pendaftaran talak/cerai b. Surat keterangan matinya suami/istri								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Sabtu 7 Jan 2012	Sumardi Rby 13-04-1980 Jajaka	Sulasti Rby 11-12-1988 Janda Cerai	Lasmin Rby 14-06-1962		Jumat 20 Jan 2012 jam 09.00	06/06/12 2012			474.1/07/3/ 2012
2	Selasa 14-2-12	Ngatman Rby 12-07-1981	-	-	-	-	-	-	-	Numpang Nikah Di Dumas 474.2/14/ 02/2012 474.3/14/ 11/2012
3	Minggu 19-2-2012	Lastari Rby 22 Des 1989 Jajaka	-	-		-	-	-	-	474.3/14/ 11/2012
4.	Selasa 28-2-2012	Agus Purnomo Rby 3 Juli 1983 Jajaka (28th) Ds Suntri	Ika Cernia Rby 13 Des 1994 perawan (13th) Ds Suntri	Marlini Rby 6-1-1969 Makab Ayah kandung		Kamis 22 Maret 2012 jam 10.00 WIB	42/25/10 2012			474.4/28/ 11/2012 474.5/
5.	Senin 05-05-12	Sutarni Rby 13-6-1987 Duda - Ds Suntri	-	-	-	-	-	-	Nikan di Tgldowu	474.6/05/11 2012
6.	Selasa 06-05-12	Suedi Rby 20-12-1983 Duda Cerai AC NO 01/AC/2012/ NO 16408 CERAI K.	-	-	-	-	-	-	Nikan Di Tanjung Seri Kib	474.7/06/ 11/2012
7	Sabtu 18-3-2012	Suhirwanto Rby 15-07-1973 Duda mati Ds Suntri	-	-	-	-	-	-	Nikan Di Dumas	474.8/18/ 11/2012

Catatan : Kolom 7 s.d 10 diisi oleh PPN

BUKU CATATAN KEHENDAK NIKAH

 Lampiran 16 KMA No. 298 Tahun 2003
 Pasal 4 ayat 2

Model N - 10

Model N. 10

Nomor Urut	Tanggal Laporan	Nama, Umur, Warganegara, Pekerjaan, Tempat tinggal			Tanda tangan a. Kepala Desa/Kelurahan b. Pembantu PPN	Tanggal Akad nikah dilangsungkan	Nomor, Tanggal Akta Nikah	Biaya pencatatan	Tanda Tangan PPN	Keterangan
		Calon Suami (terangkan jejak, duda atau beristri)	Calon Istri (terangkan perawan atau janda)	Wali (terangkan status dan hubungannya dengan calon istri)						
		Bila duda atau janda jelaskan a. Akta cerai/kutipan buku pendaftaran talak/cerai b. Surat keterangan matinya suami/istri								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Selasa 20/3/2012	-	st. Makmur Inda. Rby 04-05-1990 Janda Cerai	Kamijani. Ayah kandung.		-	-	-	-	474.9/20/ 11/2012 Numpang Di Tgldowu
9	Rabu 4/4/2012	Junas Rby 1-11-1985 Jajaka, Suntri	Rumias Rby 1-4-1996 perawan Ds Suntri	Suwarno Rby 12/12/1975 Ayah kandung Ds Suntri		Sabtu 21 April 12 Jam 09.00 WIB	77/14/10 2012			474.10-11/ 4/12/2012
10.	Minggu 29/4/12	Mardik Rby 24-09-88 Duda	-	-		-	-	-	-	474.11/29/ 10/2012
11	Rabu w/ 5/2012	Sugianto Rby 29-8-1992	-	-		-	-	-	-	474.12/4/ 11/2012 Nikan di Sale Pakis Sale 474.13/20/ 11/2012 Numpang Di Tgldowu
12	Minggu 20/5/2012	Sekutri Temak Rby perawan Ds Tgldowu	Ardi Ansyah Rby 19-02-1994 Jajaka Ds Suntri	Jumadi Rby Ayah kandung Ds Tgldowu		Minggu 8 Juli 12 16.00 WIB	152/11/ 11/2012	Salah satu Korban		474.14/22/ 11/2012
13	Selasa 22/5/2012	Supadi Rby 14-4-1988 Jajaka Ds Tgldowu	Mira Iftahin Rby 23-02-1991 perawan Ds Suntri	Gunari Rby 05-08-1987 Ayah kandung		Rabu 6 Juni Jam 06.00 4 sore	11/02/11 2012			474.15/29/ 11/2012 Numpang Di Tgldowu
14	Selasa 29/5/2012	Karnoto Rby 30-06-1986 Duda Cerai Ds Suntri	-	-		-	-	-	-	474.16/29/ 11/2012 Numpang Di Tgldowu

Catatan : Kolom 7 s.d 10 diisi oleh PPN

BUKU CATATAN KEHENDAK NIKAH

Nomor Urut	Tanggal Laporan	Nama, Umur, Warganegara, Pekerjaan, Tempat tinggal			Tanda tangan a. Kepala Desa/Kelu- rahan b. Pembantu PPN	Tanggal Akad nikah dilangsungkan	Nomor, Tanggal Akta Nikah	Biaya pencatatan	Tanda Tangan PPN	Keterangan
		Calon Suami (terangkan jejak, duda atau beristri)	Calon Istri (terangkan perawan atau janda)	Wali (terangkan status dan hubungannya dengan calon istri)						
		Bila duda atau janda jelaskan a. Akta cerai/kutipan buku pendaftaran talak/cerai b. Surat keterangan matinya suami/istri								
15	Rabu 27/6/12	Kasiman Rby 29-2-1990 Desa Tegaklawa	Kairuni Rby 15-6-1995 Perawan Desa Tegaklawa	Satijan Rby 23-2-62 Desa Suntri Ayah kandung		Selasa 15-7-2012 jam 4 sore	167/26/ VII/2012	-		474-16/27/ VI/2012
16	Senin 2/7/12	Dedi Sunarno Rby 12-2-1981 Desa Duren	Mundarah Rby 25-2-1988 Desa Suntri	Hakim Ayah kandung		Selasa 15-7-2012 jam 16.00 8/18	165/24/ VII/2012	-		474-17/02/ VII/2012
17										474-18/ waghu
18	Minggu 29/6/12	Luwari Rby 21 okt 84 Desa Suntri	Yani Rby 2 Nov 95 Desa Suntri	Suwari Rby 25-1-1953 Natah		Rabu 22 Agst 12 jam 4 sore	182/18/ VIII/2012			474-19/28/ VII/2012
19	Minggu 29/7/12	Masrip Rby 25-11-1986 Desa Pasukan	Istanti Rby 29-7-1996 Desa Suntri	Ayunganto Rby 11-7-1973 Ayah kandung		Selasa 21 Agst 12 jam 4 sore	176/06/VIII/ 2012			474-21/29/ VII/2012
20	Rabu 6/8/12	Arut Nurul Shobirin Rby 24-4-88 Desa Pasukan	Shohid Rby 10-10-86 Desa Pasukan	Mudih Ayah kandung		Sabtu 10 Sept 2012 jam 09	198/01/ IX/2012			474-22/08/ VIII/2012
21	Rabu 29-8-2012	Winarto Rby 02-03-1956 Janda mati Desa Sudomulyo Gumuh	Suwarni Rby 16-03-1966 Janda Cerai	Supardi Ayah kandung		Rabu 12 Sept 12 jam 09	305/15/ X/2012			474-23/ 29/VIII/2012
22	Rabu 5-9-2012	Abdul Rohim Desa Pasukan	(Rekomendasi)							474-24/05/ IX/2012

Catatan : Kolom 7 s/d 10 diisi oleh PPN

BUKU CATATAN KEHENDAK NIKAH

















Nomor Urut	Tanggal Laporan	Nama, Umur, Warganegara, Pekerjaan, Tempat tinggal			Tanda tangan a. Kepala Desa/Kelu- rahan b. Pembantu PPN	Tanggal Akad nikah dilangsungkan	Nomor, Tanggal Akta Nikah	Biaya pencatatan	Tanda Tangan PPN	Keterangan
		Calon Suami (terangkan jejak, duda atau beristri)	Calon Istri (terangkan perawan atau janda)	Wali (terangkan status dan hubungannya dengan calon istri)						
		Bila duda atau janda jelaskan a. Akta cerai/kutipan buku pendaftaran talak/cerai b. Surat keterangan matinya suami/istri								
23	Selasa 2 oktober 12	shohid Rby 9-1-1989				Nikah Di Tegaklawa				474-25/ 2/X/2012
24	Senin 8 okt 12	Juninto Rby 19-5-1990 Jepela Desa Duren	Junianti Rby 09-08-1994 Pasukan Desa Suntri	Junian Rby 12-03-1951 Ayah kandung		Kamis 25 okt 12 jam 4 sore	226/07/ X/2012			474-26/08/ X/2012
25	Rabu 17-10-12	Narung Handoko Tukoh 25-12-79	Wahyu Lestari Grobogan 8-3-87 Desa Suntri	Agus Prayitno (Rakab kanti)		Jumat 26 okt 12 jam 10	229/14/ X/2012			474-18/17/ X/2012
26	Sabtu 18-12-12						Nikah Di Rombang			474-27/14/ X/11/2012
27	Sabtu 19-12-12	Riki Yakubi Tanjung Bintang 02-05-1988 jejak Tanjung, Pasukan Ribu, Yak Am	Fuad Niyah Jan- nah Rby 13-10-1995 Pasukan	Dasmun Rby 05-06-1962 Ayah kandung		Minggu 30 des 2012 jam 16.00 (4 sore)				474-28/15/ XII/2012
28	Senin 29-12-12	A. Mualikin Rby 13 juni 1986 jejak Desa Suntri	Usawan Hasanah Rby 12-10-1996 Pasukan Desa Suntri	Supari Rby 19-02-1969 Ayah kandung		Jumat 11 jan 13 jam 4 sore 9 pagi	Nikah Kantur			474-29.30/ 24/XII/2012
29	Jumat 29-12-12	Suyanto Rby 05-02-1990 jejak					Pindat Nikah "B" Watu blora			474-31/28/ XII/2012
31										

Catatan : Kolom 7 s/d 10 diisi oleh PPN

BUKU CATATAN KEHENDAK NIKAH

 Lampiran 16 KMA No. 298 Tahun 2003
 Pasal 4 ayat 2

Model N - 10




















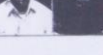
Nomor Urut	Tanggal Laporan	Nama, Umur, Warganegara, Pekerjaan, Tempat tinggal			Tanda tangan a. Kepala Desa/Kelurahan b. Pembantu PPN	Tanggal Akad nikah dilangsungkan	Nomor, Tanggal Akta Nikah	Biaya pencatatan	Tanda Tangan PPN	Keterangan	
		Calon Suami (terangkan jejak, duda atau beristri)	Calon Istri (terangkan perawan atau janda)	Wali (terangkan status dan hubungannya dengan calon istri)							
		Bila duda atau janda jelaskan a. Akta cerai/kutipan buku pendaftaran talak/cerai b. Surat keterangan matinya suami/istri									
1	23-1-13	Rio Alamsyah Rembang 08-10-1986 Jejaka	Sukarni Rembang 10-07-1984 Janda	Sukardi Kalah Kandang		Rabu 13 Feb 2013 jam 09.00 WIB	0019/002/11/2013			474.1/23/II/2013 474.2/23/II/2013	
2	Rabu 6-2-13	Lia	Lia Aristonita Nikah di tgl dan	-	-	-	-	-	-	474.3/06/II/2013	
3	Kamis 14-2-13	M-Lito Jaka 60th Dr Limbang ku. Matang	Samini Rembang 17-11-81 Janda	Rakimin Rm 19-2-1941 Ayah Kandung		-	-	-	-	474.4/14/II/2013	
4	Senin 18-2-13	Khairon Rembang 4-2-1990	Sholikhun R. Rembang 10-12-1996	Gumari Ayah Kandung		Minggu 3 Maret 2013 jam 09.00	42/07/II/2013		-	474.5/18/II/2013	
5	Senin 25-2-13	Setrisno Rm Blora 23 April 1993	-	-		-	-	-	Nikah di tgl dan	474.6/25/II/2013	
6	Rabu 27-2-13	Bramantyo N. A. Rm Tuban 21-11-1989 Tuban	Ima Irawati Rm 29-11-1987 Perawan	Mustari Rm 10-9-1964 Dr Suntri		Senin 18 Maret 2013 jam 09.00 WIB	0057/017/14/2013			474.7/27/II/2013	
7	Jumat 15-5-13	Sucipto Rm 11-6-1988 Tegalrejo	Juwari Rm 8-8-1996 Perawan Dr Suntri	Sukimin Rm 13-10-1972 Dr Suntri		Selasa 15 April 2013 jam 4 sore	68/03/IV/2013		-	474.8/15/IV/2013	
8	Minggu 24-5-13	Purnadi Rm 5-6-1990 Tegalrejo	Sucik Rm 12-4-1994 Janda Lela	Kariyoso Rm 23-5-63 Ayah Kdg		Selasa 9 April 2013 jam 09.00 Di KVA	0071/006/IV/2013			474.9/24/IV/2013	

Catatan : Kolom 7 s/d 10 diisi oleh PPN

BUKU CATATAN KEHENDAK NIKAH

 Lampiran 16 KMA No. 298 Tahun 2003
 Pasal 4 ayat 2

Model N - 10

Nomor Urut	Tanggal Laporan	Nama, Umur, Warganegara, Pekerjaan, Tempat tinggal			Tanda tangan a. Kepala Desa/Kelu rahan b. Pembantu PPN	Tanggal Akad nikah dilangsungkan	Nomor, Tanggal Akta Nikah	Biaya pencatatan	Tanda Tangan PPN	Keterangan	
		Calon Suami (terangkan jejak, duda atau beristri)	Calon Istri (terangkan perawan atau janda)	Wali (terangkan status dan hubungannya dengan calon istri)							
		Bila duda atau janda jelaskan a. Akta cerai/kutipan buku pendaftaran talak/cerai b. Surat keterangan matinya suami/istri									
1	2	3	4	5	6	7	8	9		11	
9	Selasa 26-3-13	SUPARJI RBG 5-2-1987 JEJAKA DS PASULEN	RIYANI RBG 13-11-1996 PERAWAN DS SUNTRI	KASTURI RBG 17-6-1960 AYAH KANDUNG DS SUNTRI		RABU 17-4-13 JAM: 15.00	0078/1013/ IV/2013			474.10/26/ IV/2013	
10	Ahad 31-3-13	SUTRISNO RBG 07-07-1965 DUDA CERAI	-	-		-	-	-		474.11/31/ III/2013 NIKAH DI SALE	
11	Selasa 2-4-13	DIDY SANTOSO TUBAN 8-1-1987 JEJAKA DS MARGOMULYO KBC KEREK	SINTA YUNITA RBG 12-6-1996 PERAWAN DS SUNTRI	WAJI RBG 4-1-1972 AYAH KANDUNG DS SUNTRI		SELASA 23-4-13 Jam 15.30	0085/020/ IV/2013	-		474.12/02/ IV/2013	
12	Sabtu 6-4-13	SURAJI RBG 25-12-53 DUDA MATI DS BINANGUN KBC LASEM	NYATI RBG 9-11-1960 JANDA MATI DS SUNTRI	TOKOL RBG BT TH PAMAN DS SUNTRI		SENIN 8-4-13 Jam 9 Di KVA	2	-		474.13/06/ IV/2013	
13	Selasa 14-5-13	SUNTARI RBG 28-1-1989 JEJAKA DS SUNTRI	NOVI ANGGAHATI RBG 27-11-1993 PERAWAN DS SUNTRI	SAMIYONO RBG 08-05-62 AYAH KANDUNG DS SUNTRI		SABTU 1 JUNI 13 Jam 8.00	0114/001/ VI/2013	-		474.14-15/ 14/VI/2013	
14	Selasa 14-5-13	JOFD SAMPURNO RBG 12-03-1987 JEJAKA DS SUNTRI	LINDA ARDANI TKI RBG 02-02-95 DS PASULEN	SUMARDI RBG AYAH KANDUNG DS DOWAN		KAMIS 30 MEI 13 Jam 4 sore	0119/016/ VI/2013	-		474.16/14/ VI/2013	
15	Jumat 24-5-13	MOHAMAD SYUKR DN RBG 25-12-1990 JEJAKA DS DOWAN	NUR HALIMAH RBG PERAWAN DS SUNTRI	SUMARDI RBG AYAH KANDUNG DS SUNTRI		MINGGU 9 JUNI Jam 9.00 WIB	0119/006/ VI/2013	-		474.17/24/ VI/2013	

Catatan : Kolom 7 s/d 10 diisi oleh PPN

BUKU CATATAN KEHENDAK NIKAH

Lampiran 16 KMA No. 298 Tahun 2003

Pasal 4 ayat 2

Model N - 10

Nomor Urut	Tanggal Laporan	Nama, Umur, Warganegara, Pekerjaan, Tempat tinggal			Tanda tangan a. Kepala Desa/Kelurahan b. Pembantu PPN	Tanggal Akad nikah dilangsungkan	Nomor, Tanggal Akta Nikah	Biaya pencatatan	Tanda Tangan PPN	Keterangan
		Calon Suami (terangkan jejak, duda atau beristri)	Calon Istri (terangkan perawan atau janda)	Wali (terangkan status dan hubungannya dengan calon istri)						
16	Juni at 24-5-13	MILITAUH HUIA Rbg 26-10-1988 JEJAKA Dr GAMBIRAN	MAYANG PUTRI Rbg 09-06-1997 PERAWAN DS SUNTRI	SUVANTO Rbg PANAN KANDUNG NASAB DS SUNTRI		Selasa 18 JUNI 2013 jam 16.00 WIB				474.18/24/VI/2013
17	Rabu 29-5-13	SANAN Rbg 05-02-1988 JEJAKA Dr SUNTRI								474.19/29/VI/2013 Nikah di pakir
18	Kamis 17-6-13	AKO Rastawan Boyoledi 17-07-87 Dr. Kandi Jejaka Dr. Bangle kec. Wono Segoto	Kedanis Agustina Rbg 08-8-93 Perawan Dr Suntri	Kamijon Rbg 19-3-1961 Ayah kandung Dr Suntri		Sabtu 6 Juli 2013 jam 13.00 WIB Jamij				474.20/13/VI/2013
19	Selasa 18-6-13	Sukman Rbg 07-04-88 Dr Teguharun Jejaka	Kiswanti Rbg 04-01-93 Janda (DZ) Dr Suntri	Sactani Rbg 15-3-1992 Ayah kandung Dr Suntri		Kamis 4 Juli 2013 jam 16.00 WIB				474.21/18/VI/2013
20	Kamis 4-7-13	Sukirno Rbg 19-01-1991 Dr Suntri				Nikah di Pakir				474.22/04/VI/2013
21	Kamis 18-7-13	Rismanto Tuban 15-8-1987 Dr Denat ke. Jatirogo Jejaka	Matrifah Rbg 26-8-95 Dr Suntri kec. Gunung perawan	Juwari Rbg 02-7-73 Dr Suntri Ayah kandung		Sabtu 10-8-13 jam 08.00 WIB				474.23/18/VI/2013
22	Juni at 19-7-13	Moch. Irawan Rbg 23-1-1991 Jejaka								474.24/19/VI/2013

Catatan : Kolom 7 s/d 10 diisi oleh PPN

BUKU CATATAN KEHENDAK NIKAH

Lampiran 16 KMA No. 298 Tahun 2003

Pasal 4 ayat 2

Model N - 10




Nomor Urut	Tanggal Laporan	Nama, Umur, Warganegara, Pekerjaan, Tempat tinggal			Tanda tangan a. Kepala Desa/Kelurahan b. Pembantu PPN	Tanggal Akad nikah dilangsungkan	Nomor, Tanggal Akta Nikah	Biaya pencatatan	Tanda Tangan PPN	Keterangan
		Calon Suami (terangkan jejak, duda atau beristri)	Calon Istri (terangkan perawan atau janda)	Wali (terangkan status dan hubungannya dengan calon istri)						
23	Sabtu 27-7-2013	Gunadi Rbg 24-02-1988 Jejaka Dr Suntri								474.25/27/VI/2013
24	Minggu 11-8-13	Edik Cahyanto Rbg 12 Juli 1989 Jejaka Dr Upahan	Noriana Dina Putri Rbg 18 Juni 1997 Perawan Dr Suntri	Sutopo Rbg Ayah kandung		Selasa 20 April 2013 jam 08.00 WIB Pagi				474.26/11/VIII/2013
25	Senin 12-8-13	Wawan Sugarto Lamongan 13 Maret 1990 Dr. Tenyuring Kec. Sembelg	Kusum Rhetimar Rbg 25-10-1995 Perawan Dr Suntri	Kasbi Rbg 20-11-1960 Ayah kandung						474.27/12/VI/2013
26	26 Senin 26-8-13	Sodikin Rbg 10-7-1985 Jejaka Dr Suntri Kec. Gunung								474.28/26/VIII/2013 Nikah di Lamongan
27	Rabu 11-9-13	Parne Rbg 01-02-1980 Suntri								474.29/11/IX/2013
28	Sabtu 14-9-13		Siti Musaropah Rbg 01-10-1993 Perawan Dr Suntri	Solamaf Rbg 01-08-1960 Ayah kandung Dr Suntri						474.30/14/IX/2013 Nikah di Tuban
29	Kamis 24-10-13	Kauri Rbg 09-10-1974 Duda mati Dr Suntri	Sri Rahayu Rbg 27-03-1989 Janda Cera Dr Langkir Kec. Pancur	Wasimin Rbg 54/4 Ayah kandung Dr Langkir Kec. Pancur Rembang		Minggu 27-10-13 jam 10.00 WIB	0253/048/18/2013			474.31/24/X/2013

Catatan : Kolom 7 s/d 10 diisi oleh PPN

BUKU CATATAN KEHENDAK NIKAH

Nama, Umur, Warganegara, Pekerjaan, Tempat tinggal				
Nomor Urut	Tanggal Laporan	Calon Suami (terangkan jejak, duda atau beristri)	Calon Istri (terangkan perawan atau janda)	Wali (terangkan status dan hubungannya dengan calon istri)
Bila duda atau janda jelaskan a. Akta cerai/kutipan buku pendaftaran talak/cerai b. Surat keterangan matinya suami/istri				
30.	29-10-13	Eko Ritono Rm 1-1-1982 Duda Lera Dr Sumtri	2	Nikah di Karaw. ang.
31	18-11-13	Mashum Rm 31-10-91 Jafala	2	Nikah di Lasem
32	18-11-13	Agus Purnomo Rm 06-08-1990 Duda Lera Dr Sumtri	Ita Dwi Lestari Rm Blora 29 sept 1993 kel. punggur ngg. kel. Nganten.	Sutrisno Blora 31 des 60 ayah kandung kel punggur ngg. Nganten.
33	1-12-13	Samud Rm 5-2-1988 Jafala	2	2
34	8-12-13	Ledes Rm 14-02-1979 Duda Lera Dr Tegaldan	Kagwah Rm 93 Janda Lera Sumtri	Kypera Rm 08-01-45 ayah kandung Dr Sumtri
35	8-12-13	Edik Cahyanto Rm 12 jui 1989 Duda Dr panuen	Nesiana D. P. Rm 18 jui 97 perawan Dr Sumtri	Sutopo Rm 6 jui 72 ayah kandung Sumtri
36	19-12-13	Sutono Rm 16-04-1964	-	-

Catatan : Kolom 7 s/d 10 diisi oleh PPN

Tanda tangan a. Kepala Desa/Kelu- rahan b. Pembantu PPN	Tanggal Akad nikah dilaksanakan	Nomor. Tanggal Akta Nikah	Biaya pencatatan	Tanda Tangan PPN	Keterangan
6	7	8	9	10	11
Amir	2	2	2	2	ATA-31/25/ X/2013
Amir	2	2	2	2	ATA-32/18/ X/2013
Amir	Rabu. 27 Des 13. jam 11.00	0256/ 002/X/2013			ATA-35/19/ X/2013 Kata jua cile
Amir	2	2			ATA-34/1/ X/2013
Amir	Kamis. 19 Des 13 jam 09.00	0260/003/ 1/X/2013			ATA-35/08/ X/2013
Amir	juni at 20 Des 13 jam 8.00	0262/005/ X/2013			ATA-36/08/ X/2013
Amir	-	2	2	2	ATA-37/19/ X/2013 Nikah Dr Tegaldan



BUKU CATATAN KEHENDAK NIKAH

Nomor Urut	Tanggal Laporan	Nama, Umur, Warganegara, Pekerjaan, Tempat tinggal		
		Calon Suami (terangkan jejak, duda atau beristri)	Calon Istri (terangkan perawan atau janda)	Wali (terangkan status dan hubungannya dengan calon istri)
		Bila duda atau janda jelaskan a. Akta cerai/kutipan buku pendaftaran talak/cerai b. Surat keterangan matinya suami/istri		
1	2	3	4	5
37	31 des 2013 Galaga	Rm 17-6-1986 Mushlih <		

Catatan : Kolom 7 s/d 10 diisi oleh PPN

Tanda tangan a. Kepala Desa/Kelu- rahan b. Pembantu PPN	Tanggal Akad nikah dilaksanakan	Nomor. Tanggal Akta Nikah	Biaya pencatatan	Tanda Tangan PPN	Keterangan
6	7	8	9	10	11
Amir	2	2	2	2	ATA-38/31/ X/2013 Nikah di panti



BUKU CATATAN

KEHENDAK NIKAH

Lampiran 16 KMA No. 298 Tahun 2003
Pasal 4 ayat 2

Model N - 10

Nama, Umur, Warganegara, Pekerjaan, Tempat tinggal				
Nomor Urut	Tanggal Laporan	Calon Suami	Calon Istri	Wali
		(terangkan jejak, duda atau beristri)	(terangkan perawan atau janda)	(terangkan status dan hubungannya dengan calon istri)
Bila duda atau janda jelaskan a. Akta cerai/kutipan buku pendaftaran talak/cerai b. Surat keterangan matinya suami/istri				
1	28-1-14	Kacung Tuban 7-12-1947 Duda mati Dr Margo mulyo Kec. Kerek	Sukatri Rby 19-07-1969 Janda Cerai	Sukrisnan Kosmin Rby Kandung Kandung Adik
2	7-2-14	Muji slamet Rby 16-2-89 Jajaka Dr Papucen	Rini Purdiyanti Rby 17-05-1986 perawan Dr Suntri	Kanopi Rby 30-07-1965 Ayah Kandung
3	12-2-14	Mugiyanto Blora 0 April 83 Jajaka Dr Sonorofo Blora	Zaimah. N.N. Rby 12-5-1990 Janda Cerai Suntri	Ahmad Rona Rby 21-9-65 Ayah Kandung
4	15-2-14	Nur Yasin Rembang Duta Mochi		
5	24-2-14	Saldi Rby 31-1-92 Duda mati Dr Tegaladun	Sumi Rby 1-1-71 Janda Cerai Dr Suntri	Jayadi Rby Kandung Kandung Dr Suntri
6	07-3-14	Sarasany Mopretan 13-8-76 Jajaka	Ramin Rby 1-1-71 Janda Cerai	Pangun Rby 16-3-39 Ayah Kandung Dr Suntri
7	24-3-14	Sutrisno Blora 09-07-92 Jajaka Dr Suntri		

Catatan : Kolom 7 s/d 10 diisi oleh PPN

Tanda tangan a. Kepala Desa/Kelu- rahan b. Pembantu PPN	Tanggal Akad nikah dilaksanakan	Nomor, Tanggal Akta Nikah	Biaya pencatatan	Tanda Tangan PPN	Keterangan
	7	8	9	10	11
	Senin 17-2-14 jam 8.00	019/014/ 11/2014			474.1/28/ I/2014
	Jum'at 28-2-14 jam 8.00	0039/24/ 11/2014			474.2/7/II/ 2014 (3)
	Kamis 27-2-14 jam 10.00	0035/030 11/2014			474.3/12/II/ 2014 (4)
					474.4/15/II/ 2014 nikah di Tegaladun
	Senin 10 Maret jam 09.00 WIB	0054/14/ 11/2014			474.5/24/ II/2014
	Selasa 11 Maret jam 16.00 WIB	0055/15/ 11/2014			474.6/7/ II/2014
					474.7/24/ III/2014 Nikah Dr Tegaladun

BUKU CATATAN

KEHENDAK NIKAH

Lampiran 16 KMA No. 298 Tahun 2003
Pasal 4 ayat 2

Model N - 10












Nama, Umur, Warganegara, Pekerjaan, Tempat tinggal				
Nomor Urut	Tanggal Laporan	Calon Suami	Calon Istri	Wali
		(terangkan jejak, duda atau beristri)	(terangkan perawan atau janda)	(terangkan status dan hubungannya dengan calon istri)
Bila duda atau janda jelaskan a. Akta cerai/kutipan buku pendaftaran talak/cerai b. Surat keterangan matinya suami/istri				
1	2	3	4	5
8	25-3-14	Sutrisno Rby. 18-03-89 Jajaka Dr Suntri	I	I
9	25-3-14	Sumyau Blora 1-7-56 Duda mati Dr Temurjo	Sajmini Rby 12-03-76 Janda mati Dr Suntri	Juremi Rby Ayah kandung Rahulu
10	19-4-14	Ali Mahsun Rby 20-6-85 Jajaka Dr Kenongo	Siti Solikah Rby 24-5-91 perawan Dr Suntri	Sukirno Rby. 23-9-54 Ayah kandung Dr Suntri
11	30-4-14	Sepriadi Wibisono Medan 4-9-86 Jajaka Dr Seso Japon, Blora	Shafiq Nurhayati Rby 12-4-98 perawan Dr Suntri	Wati HAKIM Keriman Rby Ayah kandung
12	30-4-14	Muafirin Rembang 21-6-90 Jajaka Dr Sumar Pule Kraton	Imawati Rby 6-7-97 perawan Dr Suntri	Satip Rby Ayah kandung Dr Suntri
13	29-5-14	Sutrisno Rby 13-7-1989 Jajaka Tegaladun	Siti Suranti Rby 30-7-94 perawan Dr Suntri	Ngatin Rby 25-5-65 Ayah kandung
14	3-7-14	Syaifuldin Zuhdi Rby 6 Nopember 1990 Jajaka	I	I

Catatan : Kolom 7 s/d 10 diisi oleh PPN

Tanda tangan a. Kepala Desa/Kelu- rahan b. Pembantu PPN	Tanggal Akad nikah dilaksanakan	Nomor, Tanggal Akta Nikah	Biaya pencatatan	Tanda Tangan PPN	Keterangan
	7	8	9	10	11
					474.8/25/ III/2014 Nikah Dr Pancur
	Jum'at 4 April 14 jam 09.00 Dr Kandung	064/01/ 11/2014			474.9/25/ III/2014 (6)
	Kamis 8 Mei 14 jam 8.00	0084/03/ 11/2014			474.10/19/ IV/2014 (7)
	Minggu 25 Mei jam 6.30 WIB	0094/15/ 11/2014			474.11/30/ IV/2014 (8)
	Minggu 25 Mei jam 8.00 WIB				474.12/30/ IV/2014 (9)
	Kamis 12 Juni 14 jam 8.30	0107/009/ 11/2014			474.13/29/ V/2014
					474.14/03/ VI/2014 Rekomendasi

KEHENDAK NIKAH

Model N - 10

Tanda tangan a. Kepala Desa/Kelu- rahan b. Pembantu PPN	Tanggal Akad nikah dilaksanakan	Nomor, Tanggal Akta Nikah	Biaya pencatatan	Tanda Tangan PPN	Keterangan
6	7	8	9	10	11
 M. Amin	Rabu 6 April jam 10.30	0160/013/ VII/2014			474.15/9/ VII/2014
 M. Amin					474.16/13/ VII/2014 N: Di Tegol dowo.
 M. Amin	Kamis 21-8-14. jam 7.30 Di Kantor.	0173/024/ VIII/2014			474.17/02/ VIII/2014
 M. Amin	Solo. 7-10-14. jam 8.00 Di Kantor.	0206/014 /X/2014			474.18/ 17/X/2014
 M. Amin	Rabu. 14-10-14. jam 0.00 Di Kantor.	21114/14/ 15/11/2014			474.19/18/ 15/2014
 Amin	Kamis. 23-10-14 jam 8 Di Kantor				474.20/ 13/X/2014

Catatan : Kolom 7 s/d 10 diisi oleh PPN

KEHENDAK NIKAH

Model N - 10

Tanda tangan a. Kepala Desa/Kelu- rahan b. Pembantu PPN	Tanggal Akad nikah dilaksanakan	Nomor, Tanggal Akta Nikah	Biaya pencatatan	Tanda Tangan PPN	Keterangan	Foto Catrin
6	7	8		10	11	
	Juni 2014 15-12- Juni 8.00 Di Kantor	241/02/ XII/2014			474. 21/08/ XI/2014	
M. N. A.					474. 22/12/ XI/2014	
	Senin 15 Des 14 Juni 8.00 Di Kantor	247/08/ XII/2014			Nikah ke 2	
					474. 23/1/ XII/2014	
M. N. A.						
					474. 24/ 24/XII/2014	
M. N. A.					Rekomendasi ke Bkora	

Catatan : Kolom 7 s/d 10 diisi oleh PPN

E. Tahun 2015

SHUN 2015

BUKU CATATAN

Nomor Urut	Tanggal Laporan	Nama, Umur, Warganegara, Pekerjaan, Tempat tinggal		
		Calon Suami (terangkan jejak, duda atau beristri)	Calon Istri (terangkan perawan atau janda)	Wali (terangkan status dan hubungannya dengan calon istri)
1	15-1-2015	Juli Rm 15-3-67 Dr Suntri	Ngarni Rm 14-5-65	Hakim Karenza jani
2	20-1-2015	UTOMO Rm 23-11-1989 Sulastri Jelaku Dr Tegalewa	Dwi Marzhas Rm 01-10-1991 Guru Rizwan Dr Suntri	Mustari Adeh kaulung Rm 10-9-64 Rm Suntri
3	Minggu 25-1-2015	M. Kheron	I	I
4	Selasa 26-2-2015	Shofia Rm 9-1-84 Rm Lani Dr Suntri 0962/AC/2013/PA	I	I
5	Jum'at 6-3-15	Sulomo Rm 20-6-852 Rm maki Dr Suntri	Ribut Lestari Rm 3-5-1963 Janda maki Dr Tegalewa	Paripin Rm 49 th Rm Tegalewa Napat
6	Minggu 8-3-2015	Suparman Rm 22-3-2015 Rm Cerai AC No 0321/AC/ 2012/PA/M Rm Dr Suntri	I	I

Catatan : Kolom 7 s/d 10 diisi oleh PPN

KEHENDAK NIKAH

Lampiran 16 KMA No. 298 Tahun 2003
Pasal 4 ayat 2

Model N - 10

Tanda tangan a. Kepala Desa/Kelu- rahan b. Pembantu PPN	Tanggal Akad nikah dilaksanakan	Nomor, Tanggal Akta Nikah	Biaya pencatatan	Tanda Tangan PPN	Keterangan
Jm Amin	Minggu 25 Jan. 15 jam 08.00	002/02/ I/2015			474.04/15/ 1/2015 474.2/15/ 1/2015
Jm Amin	Kamis 12-2-15 jam 16.00 Di Rumah	013/03/ I/2015			474.02/02/ I/2015
Jm Amin	I	I	I	I	474.03/25 I/2015 Rekomendasi
Jm Amin	I	I	I	I	474.04/26/ II/2015 Nikah di Tegalewa
Jm Amin	Jum'at 13 Maret 2015 jam 9.00 Di KUA	033/03/ III/2015			474.05/ 06/III/2015
Jm Amin	I	I	I	I	474.06/ 08/III/ 2015 Rekomendasi

BUKU CATATAN

Nomor Urut	Tanggal Laporan	Nama, Umur, Warganegara, Pekerjaan, Tempat tinggal		
		Calon Suami (terangkan jejak, duda atau beristri)	Calon Istri (terangkan perawan atau janda)	Wali (terangkan status dan hubungannya dengan calon istri)
7	Minggu 8-3-15	Ardi Anyaga Rm 14-1-96 Duda Lani Dr Suntri	I	I
8	Jum'at Serin 9-3-15	Jumari Rm 12-3-1968 Duda maki Dr Suntri	I	I
9	Rabu 10-3-15	Abdul Rahman Rm 18-5-92 Jelaku Dr Suntri	I	I
10	Jum'at 10-4-15	Suhewanto Rm 15-7-1973 Duda Lani Dr Suntri Warta	I	I
11	Rabu 15-4-15	Novia Intra Y Rm 11-7-1990 Jelaku Guru Dr Suntri	Siti Khairun N Rm 26-8-1992 Pria Warta Dr Korowelam	Jahuri Rm 15-9-87 Ayah kandung Warta Dr Korowelam
12	Selasa 5-5-15	Ratn Marth Rm 9-8-94 Duda Dr pencon	Rm 15-2-1997 Perawan Dr Suntri	Hakim Abd. Ghoni M mengajar Rany (jani)

Catatan : Kolom 7 s/d 10 diisi oleh PPN

KEHENDAK NIKAH

Lampiran 16 KMA No. 298 Tahun 2003
Pasal 4 ayat 2

Model N - 10

Tanda tangan a. Kepala Desa/Kelu- rahan b. Pembantu PPN	Tanggal Akad nikah dilaksanakan	Nomor, Tanggal Akta Nikah	Biaya pencatatan	Tanda Tangan PPN	Keterangan
Jm Amin	I	I	I	I	474.07/08/ II/2015 Numpang Nikah
Jm Amin	I	I	I	I	474.08/10/ III/2015 Rekomendasi ke pemerintah
Jm Amin	I	I	I	I	474.09/18 /III/2015 Rek ke Sale
Jm Amin	I	I	I	I	474.10/10/ IV/2015 Numpang Di Tegalewa
Jm Amin	Kamis 7 Mei 2015 jam 9.00 WIB Di Kantor	70/07/ V/2015			474.11/15/ IV/2015
Jm Amin	Sabtu 16 Mei jam 09	0075/12 V/2015			474.12/05/ V/2015

BUKU CATATAN

KEHENDAK NIKAH

Nama, Umur, Warganegara, Pekerjaan, Tempat tinggal				
Nomor Urut	Tanggal Laporan	Calon Suami (terangkan jejak, duda atau beristri)	Calon Istri (terangkan perawan atau janda)	Wali (terangkan status dan hubungannya dengan calon istri)
		Bila duda atau janda jelaskan a. Akta cerai/kutipan buku pendaftaran talak/cerai b. Surat keterangan matinya suami/istri		
13	Seleasa 5 Mei 15	Adi Candra, Raj. 5-5-85 Jepaku Raj. Jepaku Kec. Jupa	Sirkawati Raj. 7-11-97 Perawan R. Sumbi	Furur Raj. 1-1-76 Tami Dr. Tegeder
24	Seleasa 5 Mei 15	Suwarno Raj. 11-7-1959 Duda Cerai R. Sumbi	[]	[]
15	Jumat 15 Mei 15	Juwana Raj. 1-1-76 Jepaku Swaru R. Sumbi	[]	[]
16	Sabtu 16 Mei 15	Armin Raj. 01-07-1990 Jepaku Tami R. Tef. dudu	Rusmiyati Raj. 3-3-1999 Perawan Tami R. Sumbi	Pandu Raj. 6-9-1976 Ayah kandung R. Sumbi
17	Ahad 24 Mei 15	Sukeco Raj. 29-9-20-12-1980 Jepaku Tami R. Sumbi	[]	[]
18	Sabtu 25-5-15	Mukhlis Raj. 19-6-85 Jepaku R. Sumbi	Fitria Nurjani Raj. 15-3-1999 Perawan R. Sumbi	Suwarno Raj. 15-1-76 Ayah kandung

Catatan : Kolom 7 s/d 10 diisi oleh PPN

Tanda tangan a. Kepala Desa/Kelu- rahan b. Pembantu PPN	Tanggal Akad nikah dilaksanakan	Nomor, Tanggal Akta Nikah	Biaya pencatatan	Tanda Tangan PPN	Keterangan
Amu	Minang 31 Mei 15	0082/19/ VI/2015			474-13/05 V/2015
Amu	Jam 09 Di Kantor Sundi				
Amu	[]	[]	[]	[]	474-14/05 V/2015
Amu	[]	[]	[]	[]	Ni Di Tegal dudu
Amu	[]	[]	[]	[]	474-15/15/ V/2015
Amu	[]	[]	[]	[]	Nikah Di Sukung
Amu	Senin 8 Juni 15	0093/11/VI /2015			474-16/16/ V/2015
Amu	Jam 9.00 Di Kantor				
Amu	[]	[]	[]	[]	474-17/24/ V/2015
Amu	[]	[]	[]	[]	Nikah ke Dr. Dewan
Amu	Kamis 11 Juni 15	0096/14/VI /2015			474-18/20 V/2015
Amu	Jam 9.00 Di Kantor				474-19/21 V/2015

BUKU CATATAN

KEHENDAK NIKAH

Nama, Umur, Warganegara, Pekerjaan, Tempat tinggal				
Nomor Urut	Tanggal Laporan	Calon Suami	Calon Istri	Wali
		(terangkan jejak, duda atau beristri)	(terangkan perawan atau janda)	(terangkan status dan hubungannya dengan calon istri)
Bila duda atau janda jelaskan a. Akta cerai/kutipan buku pendaftaran talak/cerai b. Surat keterangan matinya suami/istri				
19	Kamis 28-5-15	Nar Ngalim Raj. 27-1-1991 Jepaku Tami R. Pasukan	Namik Raj. 7-6-1994 perawan Tami R. Sumbi	Damin Raj. 6-7-1945 Tami Ayah kandung R. Sumbi
20	Selasa 2-6-15	Selamat Sumboro Raj. 8-12-1991 Jepaku Tami R. Sumbi	Nur Sri Yuliana Raj. 20-7-04 perawan Bura R. Kandung rpi	I
21	Ahad 28-6-15	Nur Khelir Raj. 11-4-1992 Jepaku Suzeta R. Sumbi	Nuril Lailiyah Raj. 24-2-95 R. Ukar	Pustamaji Raj. 1-1-76 Ayah kandung
22	Sabtu 11-7-15	M. Sulkhan Raj. 1 Jan 1983 Jepaku Kuswata R. Sumbi	Amriyati Raj. 5 Juni 87 janda mati R. Sumbi	Suzeta Raj. 12-01-1972 Ayah kandung R. Sumbi
23	Minang 12-7-15	Sriyono Raj. 15-9-1992 Jepaku Suzeta R. Sumbi	Supatriningsih Raj. 2-5-1996 perawan Suzeta R. Sumbi	Kasnah Raj. 16-5-1972 Ayah Kdg R. Sumbi
24	Jumat 24-7-15	M. As'ad Raj. 27-3-90 Jepaku R. Dzung Muday Saxang	Rizka Anggra Raj. 15-5-1998 perawan R. Sumbi	Kasmin Raj. 23-2-72 Ayah kandung R. Sumbi

Catatan : Kolom 7 s/d 10 diisi oleh PPN



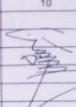




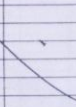


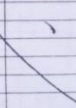
Tanda tangan a. Kepala Desa/Kelu- rahan b. Pembantu PPN	Tanggal Akad nikah dilaksanakan	Nomor, Tanggal Akta Nikah	Biaya pencatatan	Tanda Tangan PPN	Keterangan
Amu	Kamis 11 Juni 15	0097/015/ VI/2015			474-20/20/ V/2015
Amu	Jam 9.00 Di Kantor KUA				
Amu	[]	[]	[]	[]	474-21/02/ V/2015
Amu	[]	[]	[]	[]	R. Sumbi
Amu	[]	[]	[]	[]	474-22/28 V/2015
Amu	[]	[]	[]	[]	R. Sumbi
Amu	Rabu 25 August 15	0133/019/ VIII/2015			474-23/11/ VII/2015
Amu	Jam 8.00 Di KUA				
Amu	Selasa 11 August Jam 9.00 Di Kantor	0134/020/ VIII/2015			474-24/25/13 VII/2015
Amu	[]	[]	[]	[]	
Amu	[]	[]	[]	[]	474-26/24 VII/2015

BUKU CATATAN

KEHENDAK NIKAH












Nama, Umur, Warganegara, Pekerjaan, Tempat tinggal				
Nomor Urut	Tanggal Laporan	Calon Suami	Calon Istri	Wali
		(terangkan jejak, duda atau beristri)	(terangkan perawan atau janda)	(terangkan status dan hubungannya dengan calon istri)
		Bila duda atau janda jelaskan a. Akta cerai/kutipan buku pendaftaran talak/cera b. Surat keterangan matinya suami/istri		
1	2	3	4	5
25	Ahad 26-7-15	Suntoro Rtg 4-60-83 Jatikan Dk Suntri	Ulamas Rtg 26-2-95 Perawan Dk Dowan	Rushadi Rtg Pemeran
26	Ahad 6-9-15	Karsam Rtg 24-1-1991 Jatikan Dk Suntri	Suryam Rtg 2-1-1999 Perawan Dk Tonggan	[
27	Rabu 9-9-15	Abdul Rohman Rtg 18-5-1992 Jatikan Dk Suntri]]]]
28	Sabtu 10/9/2015	A Zaeni Astori bin Rohmad Rtg 13-3-1988 Duda Cerai Dk Dowan	Imawati Binti Satip Rtg 6-7-1997 Janda Cerai Dk Suntri	Satip Rtg 5-3-1970 Ayah kandung Dk Suntri
29	Rabu 11/11/2015	Choirul Rappan Bin Mikhsum Rtg 3-11-1993 Jatikan Dk Karas Sedan	Alfian Mikmah Binti Sugiman Rtg 2-1-1996 Perawan Dk Suntri	Sugiman Rtg 18-5-80 Ayah kandung Dk Suntri
30				

atan : Kolom 7 s/d 10 diisi oleh PPN

Tanda tangan a. Kepala Desa/Kelurahan b. Pembantu PPN	Tanggal Akad nikah dilangsungkan	Nomor, Tanggal Akta Nikah	Biaya pencatatan	Tanda Tangan PPN	Keterangan
	Selasa 11 April 15 jam 8.00 Dk Kantor	0132/012 /VII/2015			474.27/26/ VII/2015
					474.28/ 06/IX/2015 Rtg ke sale
					474.29/ 09/IX/2015
	Selasa 6 Okt 2015 jam 9. Dk Kantor	0169/015/ X/2015			474.30/19/ X/2015
	Selasa 8 Des 15 jam 8. Dk Kantor	0192/007 /XII/2015			474.31/11/ XI/2015

F. Tahun 2016

BUKU CATATAN KEHENDAK NIKAH

No-mor Urut	Tanggal laporan	Nama, Umur, Warga negara, Pekerjaan, Tempat tinggal			Tanda tangan a. Kepala Desa/ Kelurahan b. Pembantu PPN	Tanggal akad nikah dilangsungkan	Nomor, tanggal akta nikah	Biaya pencatatan	Tanda tangan PPN	Keterangan
		Calon Suami (terangkan jejak, duda atau beristri)	Calon Istri (terangkan perawan, atau janda)	Wali (terangkan status dan hubungannya dengan calon istri)						
		Bila duda atau janda jelaskan a. Akta cerai/kutipan buku pendaftaran talak/cera b. Surat keterangan matinya suami/istri								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Selasa 5 Jun 16	Ramin Rtg 12-4-73 Duda Cerai Ds Tegaldaru	Suwati Rtg 28-11-1986 Janda Cerai Ds Suntri	Sukijan Rtg 15-7-1950 Ayah kandung Nasab	 M. N. A.	Selasa pon 19 Jan 2016 jam 8.30 Ds Kantor	002/07/I/ 2016 Selasa 19 Jan 16	Nikah Kantor *1- 		474.1/08/I/16 
2		Nama : Janyadi TTL : Rtg 1 April 95 Pek : Swasta status : Janda Alamat : Ds Suntri			 M. N. A.					474.2/26/I/ 2016 Numpang Nikah di Ds Dowan
3		Nama : Rasmidi TTL : Rtg 15-2-1984 status : Janda Pek : Swasta Alamat : Ds Dowan	Siti Musarahah Rembang 01-10-1994 Janda Cerai Swasta Ds Suntri	Selanet Rtg 01-08-80 Ayah kandung Tami Ds Suntri	 M. N. A.	Jumat 19-2-16 jam 09.00 Ds Kantor	0038/023/ 11/2016 Jumat 19 Feb 16 m KUA 1477 H	No akta Kantor : 0773/ AC/2015 Seri : K No. 0828 *2		474.3/03/II/ 2016 
4		Nama : Gunadi TTL : Rtg 5-3-82 status : Janda Pek : Tami Alamat : Ds Tegaldaru	Jarmi Rtg 4-1-1984 Janda Cerai Tami Ds Suntri	Jarman Rtg 18-2-1954 Ayah kandung Tami Ds Suntri	 M. N. A.	Rabu 24-2-16 jam 09.00 Ds Kantor KUA Gunam	0038/026/ 11/2016 24-2-16 15 Jun 2016 1477 H	No akta 0437/AC/ 2015/PA 1989		474.4/10/II/ 2016 



BUKU CATATAN KEHENDAK NIKAH

No-mor Urut	Tanggal laporan	Nama, Umur, Warga negara, Pekerjaan, Tempat tinggal			Tanda tangan a. Kepala Desa/ Kelurahan b. Pembantu PPN	Tanggal akad nikah dilangsungkan	Nomor, tanggal akta nikah	Biaya pencatatan	Tanda tangan PPN	Keterangan
		Calon Suami (terangkan jejaka, duda atau beristri)	Calon Istri (terangkan perawan, atau janda)	Wali (terangkan status dan hubungannya dengan calon istri)						
		Bila duda atau janda jelaskan a. Akta cerai/kutipan buku pendaftaran talak/cerai b. Surat keterangan matinya suami/istri								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5		Nama : A. Alimaulan TTL : Rby 15-12-1989 status : jejaka Pek : swasta Alamat : Dr Sundri	Nurul Andika Sari Rby 15-10-1994 Perawan Swasta Dr Jutundo, Lasem	Bambang Kartono Ayah kandung Dr. Pro. Lusa		20 Mei 2016 Jam 09.00 Dr. Kantor	0073/008/2016			474.5/09/2016 Rekomendasi Ke Lasem
6		Nama : Nur Setyo TTL : Bopengoro 1-6-95 status : jejaka Peker : Swasta Alamat : Dr Turi, Tambak rpg	Yuli Astuti Rby 03-07-1999 Perawan Swasta Dr Sundri	Sukirman Rby 12-3-1993 Ayah kandung Sundri		Solan 3 Mei 2016 Jam 09.00 Dr. Kantor	0074/008/2016		474.6/19/2016 	
7		Nama : Jandi TTL : Rby 3-11-94 status : jejaka Peker : Swasta Alamat : Dr Patusen	Asmahul Husna Rby 8-5-1992 Perawan Swasta Dr Sundri	Pargidan Rby 7-9-1992 Ayah kandung Dr Sundri		Sabilu Wary 14 Mei 2016 Jam 08.00 Dr. Sundri	0075/008/2016		474.7/14/2016 	
8		Nama : Wintoro TTL : Rby 25-2-92 status : jejaka Peker : Tani Alamat : Tegaladuro	Vila Furhasari Rby 6-6-2001 Perawan Tani Sundri	Sidikun Rby 20-3-1995 Ayah kandung Dr Sundri		Kamis 26 Mei 2016 Jam 8.00 Dr. Sundri	0098/008/2016		474.8/26/2016 	

BUKU CATATAN KEHENDAK NIKAH

No-mor Urut	Tanggal laporan	Nama, Umur, Warga negara, Pekerjaan, Tempat tinggal			Tanda tangan a. Kepala Desa/ Kelurahan b. Pembantu PPN	Tanggal akad nikah dilangsungkan	Nomor, tanggal akta nikah	Biaya pencatatan	Tanda tangan PPN	Keterangan
		Calon Suami (terangkan jejaka, duda atau beristri)	Calon Istri (terangkan perawan, atau janda)	Wali (terangkan status dan hubungannya dengan calon istri)						
		Bila duda atau janda jelaskan a. Akta cerai/kutipan buku pendaftaran talak/cerai b. Surat keterangan matinya suami/istri								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9		Nama : Pur Ali TTL : Rby 21-4-93 status : jejaka Pek : swasta Alamat : Tegaladuro	Indah Aninda Wulan Rby 25-5-1998 Perawan Swasta Dr Sundri	Ayah kandung Sukislan Rby 22-6-1992 Tani Dr Sundri		Jumat 20 Mei 16 Jam 16.00 P3N Sundri M. N. A	0086/019/2016			474.8/6/2016
10		Nama : Fidi Slamet TTL : Rby 3-2-92 status : jejaka Pek : swasta Alamat : Patusen	Ayu Nurri'ati Rby 19-4-1992 Perawan Swasta Dr Sundri	Ayah kandung Waktijan Rby 14-3-65 Tani Dr Sundri		Senin 30 Mei 16 Jam 9.00 P3N Sundri M. N. A	0105/025/2016		474.9/9/2016 	
11		Nama : Nur Salim TTL : Rby 26-82 status : jejaka Pekerjaan : swasta Alamat : Timbranga	Kardisari Rby 11-8-1999 Perawan Swasta Dr Sundri	Sukarno Rby 01-01-61 Ayah kandung Tani Dr Sundri		Kamis 26 Mei 16 Jam 8.30 Dr. Ruma	0108/020/2016		474.10/14/2016 	
12		Nama : Fumari TTL : Rby 30-1-82 status : jejaka Pek : swasta Alamat : Dr Sundri								Rekomendasi Ke Kecamatan Ke Damak No: 474.13/19/2016







BUKU CATATAN KEHENDAK NIKAH

No-mor Urut	Tanggal laporan	Nama, Umur, Warga negara, Pekerjaan, Tempat tinggal			Tanda tangan a. Kepala Desa/ b. Kelurahan PPN	Tanggal akad nikah dilaksanakan	Nomor, tanggal akta nikah	Biaya pencatatan	Tanda tangan PPN	Keterangan
		Calon Suami (terangkan jejak, duda atau beristri)	Calon Istri (terangkan perawan, atau janda)	Wali (terangkan status dan hubungannya dengan calon istri)						
13	7/16 2016	Nama: Ahmad Kairi TTL: Rm 15-12-80 Status: Janda Pekerja: Swasta Alamat: Dr Suntri	Eni Idayanti Rm 15-9-1998 perawan Swasta Dr Suntri	Jabiman Rm 19-2-21 Ayah kandung Tami Dr Suntri	[Signature]	Senin 11/10/16 Jam: 16.00 Di Rumah	0106/006/ VII/2016	7	[Signature]	474-12/ 474-11/09/VII /2016 
14		Nama: Priawan TTL: Rm 14-2-1994 Status: Janda Pekerja: Swasta Alamat: Dr Suntri	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	474-13/32/VII /2016 Mumpung Di Rimbungan
15		Nama: Sumardi TTL: Rm 14-9-1992 Status: Janda Pekerja: Swasta Alamat: Dr Trembes	Murul Inayah Rm 4-2-1999 perawan Swasta Dr Suntri	Rudi Rm 22-2-1969 Ayah kandung Tami Dr Suntri	[Signature]	Sabtu 30/Jul 2016 Jam: 09.00 Di Suntri	0125/025/ VII/2016	Berkas 605.000	[Signature]	474-14/25/VII /2016 
16		Nama: Vera Apriliani TTL: Rm 21-4-2001 Status: Swasta perawan Pekerja: Swasta Alamat: Dr Suntri	Sutrisno Rm 16-8-1944 Janda Swasta Dr Tegaldawa	Mustafa Rm 14-12-1978 Ayah kandung Tami Dr Suntri	[Signature]	Jumat 23 Sept 2016 Jam: 14.00 Di Kantor	0125/025/ VII/2016	[Signature]	[Signature]	474-15/10/VII /2016

BUKU CATATAN KEHENDAK NIKAH

No-mor Urut	Tanggal laporan	Nama, Umur, Warga negara, Pekerjaan, Tempat tinggal			Tanda tangan a. Kepala Desa/ b. Kelurahan PPN	Tanggal akad nikah dilaksanakan	Nomor, tanggal akta nikah	Biaya pencatatan	Tanda tangan PPN	Keterangan
		Calon Suami (terangkan jejak, duda atau beristri)	Calon Istri (terangkan perawan, atau janda)	Wali (terangkan status dan hubungannya dengan calon istri)						
4	9 April 2016	Nama: Sutejo TTL: Rm 25-2-89 Status: Janda Pekerja: Swasta Alamat: Dr Suntri	- Imrolatus Sholikhah - Blora 17-9-1999 - perawan - Swasta - Dr Kawengnan Jepun. Blora	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	474-16/08/ VIII/2016 - pindah nikah ke Dr Kawengnan Jepun. Blora
18	26 April 2016	Nama: Rafiq TTL: Rm 16-12-87 Status: Janda Pekerja: Guru Alamat: Dr Suntri	Irena H Rm 10-01-1994 perawan Guru Dr Tanjung Sari Rembang	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	474-17/26/VIII /2016 pindah Di Jepun. Tanjung Sari. Rembang
19	13 Sept 2016	Nama: Sutrisno TTL: Rm 18-8-1994 Status: Janda Pekerja: Swasta Alamat: Dr Tegaldawa	Vera Apriliani Rm 21-4-2001 perawan Dr Suntri	Mustafa Rm 14-12-1978 Ayah kandung Tami Dr Suntri	[Signature]	Jumat 23 Sept 16 Jam: 14.00 Di Kantor	0169/037/ VIII/2016	21 Duta Hijab 1422	[Signature]	474-18/26/ VIII/2016 Disperdukas PA Rembang
20	1 Des 2016	[Signature]	Nama: Susanto TTL: Rm 18-4 Status: perawan Pekerja: Swasta Alamat: Dr Suntri	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	[Signature]	474-18/1/VIII /2016 Mumpung Di Dr Tegaldawa Kec. Blora

BUKU CATATAN KEHENDAK NIKAH

No-mor Urut	Tanggal laporan	Nama, Umur, Warga negara, Pekerjaan, Tempat tinggal			Tanda tangan a. Kepala Desa/ Kelurahan b. Pembantu PPN	Tanggal akad nikah dilaksanakan	Nomor, tanggal akta nikah	Biaya pencatatan	Tanda tangan PPN	Keterangan
		Calon Suami (terangkan jejak, duda atau beristri)	Calon Istri (terangkan perawan, atau janda)	Wali (terangkan status dan hu- bungannya dengan calon istri)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	9/12 2016	Nama : Suharyono TTL : 20/4-9-79 Status : duda nekad pek : swasta Alamat : Di Suntri	Nama : TATUN 2016. → N = 19 Catin. R = 5							474.19/9/XII /2016 Nikah Di Sumatara
1.	2017. 11/11/17	Nama : Winda TTL : 12-4-77 Status : Bawa Cerai pek : swasta Alamat : Wonorejo Sole.	Pudrik Maripah Raj 1-7-83 Janda Cerai Swasta Di Suntri	Nurman. Raj Ayah Kandung Tamu Di Suntri		Rabu 18 Jan 17 jam 08.30 KUA	0018/018/ 2017 20 Rabi'ul tsam 1438	0,-	  	474.1/11/17 2-017
2	29-1-17	Nama Rudik TTL Raj 11-8-97 Status Janda pek swasta Alamat Di Suntri								474.2/29/ I/2017 Nikah ke Pasuruan
3.	22-2-17	Nama peti ukaran TTL Raj 20-7-93 Status Janda pek swasta Alamat Di Tegalrejo	Purni Sri Wahyuni Raj 5-5-2000 perawan Swasta Di Suntri	Fitri-k Raj 13-12-1971 Ayah Kandung Tamu Di Suntri		Sabtu 15 April 17 jam 16.00 Di Suntri	0061/010/ W/2017 Rp 600.000,-		  	474.3/22/ II/2017

5. HASIL WAWANCARA

A. Wawancara Dengan Pelaku Nikah Dini

Nama : YA
Waktu : Senin 30 Oktober 2017
Tempat : Di kediaman YA

1. Apakah anda tau bahawa didesa ini mempunyai peraturan desa tentang perlindungan anak ?

Tidak tau mas

2. Sejauh ini upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah desa dalam mencegah pernikahan dini ?

Kurang tau mas

3. Apakah anda pernah ikut sosialisasi?

Saya tidak pernah ikut mas

4. Apakah Pemerintah Desa Suntri ikut sosialisasi pernikahan dini ?

Kurang tau mas

5. Siapa saja yang ikut terlibat dalam mensosialisasikan pernikahan dini ?

Kurang tau mas, karena saya sendiri tidak pernah ikut sosialisasi

6. Seberapa sering diadakan sosialisasi tentang pernikahan dini ?

Saya enggak tau mas

7. Apakah anda dicegah ketika mengurus perizinan nikah ?

Enggak dicegah mas, langsung diizinkan

Nama : VA
Waktu : Senin 30 Oktober 2017
Tempat : Di kediaman VA

- 1. Apakah anda tau bahawa didesa ini mempunyai peraturan desa tentang perlindungan anak ?**

Kurang terlau tau mas

- 2. Sejauh ini upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah desa dalam mencegah pernikahan dini ?**

Kurang tau mas

- 3. Apakah anda pernah ikut sosialisasi?**

Pernah ikut mas di Balai Desa

- 4. Apakah Pemerintah Desa Suntri ikut sosialisasi pernikahan dini ?**

Setau saya ikut mas

- 5. Siapa saja yang ikut terlibat dalam mensosialisasikan pernikahan dini ?**

Pak lurah dan mas ayik (humas KPAD) mas

- 6. Seberapa sering diadakan sosialisasi tentang pernikahan dini ?**

Seingat saya tiga bulan sekali mas

- 7. Apakah anda dicegah ketika mengurus perizinan nikah ?**

Kalau saya sih enggak dicegah mas karena yang menguruskan dulu bapak saya, tapi kata bapak saya dulu disarankan untuk menunggu sampai umur 16 tahun mas, karena dulu saya kan nikah rekomendasi dari Pengadilan Agama

Nama : VF
Waktu : Senin 30 Oktober 2017
Tempat : Di kediaman VF

- 1. Apakah anda tau bahawa didesa ini mempunyai peraturan desa tentang perlindungan anak ?**

Tau mas

- 2. Sejauh ini upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah desa dalam mencegah pernikahan dini ?**

Kurang tau mas

- 3. Apakah anda pernah ikut sosialisasi?**

Pernah ikut mas dua kali di Balai Desa

- 4. Apakah Pemerintah Desa Suntri ikut sosialisasi pernikahan dini ?**

Seingat saya ikut mas

- 5. Siapa saja yang ikut terlibat dalam mensosialisasikan pernikahan dini ?**

Pemerintah desa, kak yik (Humas KPAD), dan kakak-kakak dari Plan mas

- 6. Seberapa sering diadakan sosialisasi tentang pernikahan dini ?**

satu bulan sekali mas

- 7. Apakah anda dicegah ketika mengurus perizinan nikah ?**

Dulu disarankan ditunda mas bahkan rumah saya di datangi Plan mas disarankan untuk menunda karena waktu itu usia saya belum cukup umur mas

Nama : EI
Waktu : Senin 30 Oktober 2017
Tempat : Di kediaman EI

- 1. Apakah anda tau bahawa didesa ini mempunyai peraturan desa tentang perlindungan anak ?**

Tidak tau mas

- 2. Sejauh ini upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah desa dalam mencegah pernikahan dini ?**

Saya tidak tau mas

- 3. Apakah anda pernah ikut sosialisasi?**

Tidak pernah ikut mas karena saya enggak dapat undangan

- 4. Apakah Pemerintah Desa Suntri ikut sosialisasi pernikahan dini ?**

Saya enggak tau mas

- 5. Siapa saja yang ikut terlibat dalam mensosialisasikan pernikahan dini ?**

Saya enggak tau mas kan saya ga dapat undangan ikut sosialisasi, kalau ikut ya mungkin saya tau mas

- 6. Seberapa sering diadakan sosialisasi tentang pernikahan dini ?**

Iya enggak tau mas

- 7. Apakah anda dicegah ketika mengurus perizinan nikah ?**

Enggak dicegah mas, langsung dibolehkan

Nama : H
Waktu : Senin 30 Oktober 2017
Tempat : Di kediaman H

- 1. Apakah anda tau bahawa didesa ini mempunyai peraturan desa tentang perlindungan anak ?**

Eggak tau mas

- 2. Sejauh ini upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah desa dalam mencegah pernikahan dini ?**

Wah saya enggak tau mas

- 3. Apakah anda pernah ikut sosialisasi?**

Saya enggak pernah ikut mas

- 4. Apakah Pemerintah Desa Suntri ikut sosialisasi pernikahan dini ?**

Kurang tau mas

- 5. Siapa saja yang ikut terlibat dalam mensosialisasikan pernikahan dini ?**

Kurang tau mas setau saya sih dulu disini pernah ada Plan yang mensosialisasikan tapi desa sini gak pernah ada yang memperhatikan

- 6. Seberapa sering diadakan sosialisasi tentang pernikahan dini ?**

Enggak tau mas

- 7. Apakah anda dicegah ketika mengurus perizinan nikah ?**

Enggak dicegah mas, langsung dibolehkan

Nama : UH
Waktu : Senin 30 Oktober 2017
Tempat : Di kediaman H

- 1. Apakah anda tau bahawa didesa ini mempunyai peraturan desa tentang perlindungan anak ?**

Saya sudah tau mas

- 2. Sejauh ini upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah desa dalam mencegah pernikahan dini ?**

Saya enggak tau mas

- 3. Apakah anda pernah ikut sosialisasi?**

Pernah mas dulu di SD

- 4. Apakah Pemerintah Desa Suntri ikut sosialisasi pernikahan dini ?**

Enggak ikut mas

- 5. Siapa saja yang ikut terlibat dalam mensosialisasikan pernikahan dini ?**

Dulu kakak-kakak Plan mas

- 6. Seberapa sering diadakan sosialisasi tentang pernikahan dini ?**

Satu bulan sekali mas

- 7. Apakah anda dicegah ketika mengurus perizinan nikah ?**

Enggak dicegah mas, langsung dibolehkan

Nama : NI
Waktu : Senin 30 Oktober 2017
Tempat : Di kediaman NI

- 1. Apakah anda tau bahawa didesa ini mempunyai peraturan desa tentang perlindungan anak ?**

Tau mas

- 2. Sejauh ini upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah desa dalam mencegah pernikahan dini ?**

Enggak tau mas

- 3. Apakah anda pernah ikut sosialisasi?**

Pernah mas dulu di Balai Desa

- 4. Apakah Pemerintah Desa Suntri ikut sosialisasi pernikahan dini ?**

Ikut mas dulu

- 5. Siapa saja yang ikut terlibat dalam mensosialisasikan pernikahan dini ?**

Pemerintah desa sama kakak Plan mas

- 6. Seberapa sering diadakan sosialisasi tentang pernikahan dini ?**

Satu bulan sekali mas

- 7. Apakah anda dicegah ketika mengurus perizinan nikah ?**

Enggak dicegah mas, langsung dibolehkan

Nama : FP

Waktu : Senin 30 Oktober 2017

Tempat : Di kediaman FP

- 1. Apakah anda tau bahawa didesa ini mempunyai peraturan desa tentang perlindungan anak ?**

Saya sudah tau mas

- 2. Sejauh ini upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah desa dalam mencegah pernikahan dini ?**

Enggak tau mas

- 3. Apakah anda pernah ikut sosialisasi?**

Dulu saya pernah ikut mas di Balai Desa

- 4. Apakah Pemerintah Desa Suntri ikut sosialisasi pernikahan dini ?**

Seingat saya tidak ikut mas

- 5. Siapa saja yang ikut terlibat dalam mensosialisasikan pernikahan dini ?**

Kakak-kakak Plan mas

- 6. Seberapa sering diadakan sosialisasi tentang pernikahan dini ?**

Satu bulan sekali mas

- 7. Apakah anda dicegah ketika mengurus perizinan nikah ?**

Dulu saya dicegah mas, karena umur saya waktu itu belum cukup mas, terus saya nikah sirri, terus setelah mencapai umur baru nikahnya disahkan di KUA mas

Nama : Y
Waktu : Senin 30 Oktober 2017
Tempat : Di kediaman FP

- 1. Apakah anda tau bahawa didesa ini mempunyai peraturan desa tentang perlindungan anak ?**

Tau mas

- 2. Sejauh ini upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah desa dalam mencegah pernikahan dini ?**

Kurang tau mas

- 3. Apakah anda pernah ikut sosialisasi?**

Pernah ikut mas

- 4. Apakah Pemerintah Desa Suntri ikut sosialisasi pernikahan dini ?**

Ikut mas

- 5. Siapa saja yang ikut terlibat dalam mensosialisasikan pernikahan dini ?**

Pak carik sama kakak Plan mas

- 6. Seberapa sering diadakan sosialisasi tentang pernikahan dini ?**

Satu bulan sekali mas

- 7. Apakah anda dicegah ketika mengurus perizinan nikah ?**

Enggak dicegah mas, langsung dibolehkan, waktu itu umur saya padahal kurang dari 16 tahun mas tapi entah kenapa kok boleh mas, tapi waktu itu rumah tangga saya gagal mas (cerai), kemudian diumur 17 tahun saya nikah lagi mas

Nama : PA
Waktu : Senin 30 Oktober 2017
Tempat : Di kediaman PA

- 1. Apakah anda tau bahawa didesa ini mempunyai peraturan desa tentang perlindungan anak ?**

Saya enggak tau mas

- 2. Sejauh ini upaya apa saja yang telah dilakukan pemerintah desa dalam mencegah pernikahan dini ?**

Kurang tau mas

- 3. Apakah anda pernah ikut sosialisasi?**

Tidak pernah ikut mas karena gak dapat undangan padahal teman-teman saya pada dapat undangan mas

- 4. Apakah Pemerintah Desa Suntri ikut sosialisasi pernikahan dini ?**

Enggak tau mas

- 5. Siapa saja yang ikut terlibat dalam mensosialisasikan pernikahan dini ?**

Kurang tau mas

- 6. Seberapa sering diadakan sosialisasi tentang pernikahan dini ?**

Enggak tau mas kan gak pernah ikut

- 7. Apakah anda dicegah ketika mengurus perizinan nikah ?**

Enggak mas, langsung dibolehkan

B. Wawancara Dengan Pemerintah Desa

Nama : Siswoyo (Kepala Desa)
Waktu : Selasa 3 Oktober 2017
Tempat : di Balai Desa

1. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini?

Pernikahan yang dilakukan di usia dini, yang dimaksud dini apabila belum 18 tahun

2. Apa tujuan anda mencegah pernikahan dini?

Supaya anak menunda pernikahan dan mendahulukan sekolah, lebih-lebih ada pabrik semen di tegaldowo, kalau mereka sekolah kan nanti bisa kerja disana.

3. Upaya apa saja yang anda lakukan dalam mencegah pernikahan dini ?

Upaya selama ini sosialisasi tentang pernikahan dini di Balai Desa mas

4. Seberapa sering dilakukan sosialisasi bahaya pernikahan dini ?

Satu bulan sekali mas

5. Apakah pemerintah desa ikut terlibat dalam sosialisasi pernikahan dini ?

Iya ikut

6. Siapa saja yang ikut terlibat dalam sosialisasi pernikahan dini ?

Pemerintah Desa, Plan Indonesia, dan KPAD

7. Apa yang anda lakukan ketika ada calon mempelai yang usianya masih dini mengurus administrasi perizinan nikah ?

Saya sebagai pemerintah menghendaki nikah cukup umur, jadi kalau ada mempelai usia dini meminta izin menikah maka sebisa mungkin mencegah dengan menasehati, hanya saja kembali lagi pada kesadaran orang tuanya yang mendesak pemerintah desa agar dibolehkan, makanya akhirnya dengan terpaksa pemerintah desa membolehkan

Nama : Sudirman (Sekretaris Desa)
Waktu : Senin 30 Oktober 2017
Tempat : di Balai Desa

1. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini?

Pernikahan yang dilakukan kurang dari umur 18 tahun

2. Apa tujuan anda mencegah pernikahan dini?

Supaya melanjutkan sekolah kejenjang yang lebih tinggi, dengan begitu akan meningkatkan SDM yang berkualitas.

3. Upaya apa saja yang anda lakukan dalam mencegah pernikahan dini ?

mengumumkan kepada warga tentang adanya perda perlindungan anak lewat sosialisasi di Balai Desa dan diacara hajatan, kondangan dan ketika mengobrol di warung

4. Seberapa sering dilakukan sosialisasi bahaya pernikahan dini ?

Setiap satu bulan sekali

5. Apakah pemerintah desa ikut terlibat dalam sosialisasi pernikahan dini ?

Iya ikut

6. Siapa saja yang ikut terlibat dalam sosialisasi pernikahan dini ?

Pemerintah Desa tentunya, juga Plan Indonesia dan KPAD

7. Apa yang anda lakukan ketika ada calon mempelai yang usianya masih dini mengurus administrasi perizinan nikah ?

Ya kami sebisa mungkin mencegah mengupayakan menolak dan menasehati, tapi dari pihak orang tua bersikukuh menghendaki pernikahan akhirnya dengan terpaksa kami membolehkan, lebih-lebih Undang-Undang Perkawinan 1974 juga membolehkan

Nama : **Abdul Ghoni (Kaur Kesra)**
Waktu : **Senin 30 Oktober 2017**
Tempat : **di Balai Desa**

1. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini?

Pernikahan yang dilakukan usia kurang dari 18 tahun

2. Apa tujuan anda mencegah pernikahan dini?

Supaya anak di desa sini sekecil mungkin yang tinggi biar memudahkan mencari pekerjaan, dan juga pernikahan dini itu kan membahayakan terutama si perempuan karena reproduksinya belum matang

3. Upaya apa saja yang anda lakukan dalam mencegah pernikahan dini ?

Mensosialisasikan kepada masyarakat

4. Seberapa sering dilakukan sosialisasi bahaya pernikahan dini ?

Sering, setiap satu bulan sekali

5. Apakah pemerintah desa ikut terlibat dalam sosialisasi pernikahan dini ?

Iya ikut

6. Siapa saja yang ikut terlibat dalam sosialisasi pernikahan dini ?

Pemerintah Desa, Plan dan juga KPAD

7. Apa yang anda lakukan ketika ada calon mempelai yang usianya masih dini mengurus administrasi perizinan nikah ?

Ya mencegah karena umurnya kan masih kurang

Nama : Samiyono (Kaur Pemerintahan)
Waktu : Kamis 14 Desember 2017
Tempat : di Balai Desa

1. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini?

Pernikahan yang dilakukan kurang dari 18 Tahun

2. Apa tujuan anda mencegah pernikahan dini?

Suapaya anak tidak menikah dini, karena biar si anak menikah dulu

3. Upaya apa saja yang anda lakukan dalam mencegah pernikahan dini ?

Ya mensosialisasikan pernikahan dini di Balai Desa, juga menyampaikan kepada warga bahaya nikah dini lewat pertemuan warga.

4. Seberapa sering dilakukan sosialisasi bahaya pernikahan dini ?

Cukup sering satu bulan sekali

5. Apakah pemerintah desa ikut terlibat dalam sosialisasi pernikahan dini ?

Iya ikut

6. Siapa saja yang ikut terlibat dalam sosialisasi pernikahan dini ?

Pemerintah Desa, dan KPAD, dulu juga dengan Plan

7. Apa yang anda lakukan ketika ada calon mempelai yang usianya masih dini mengurus administrasi perizinan nikah ?

Jelas kami mencegah menolak, kemudian kami menasehati supaya menunda pernikahannya, tapi pihak orang tua memaksa agar dibolehkan dengan alasan dikawatirkan terjadinya kumpul kebo dan hamil diluar nikah

Nama : Suyikno (Humas KPAD)
Waktu : Kamis 14 Desember 2017
Tempat : Di kediaman Suyikno

1. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini?

Pernikahan yang dilakukan kurang dari umur 18 tahun

2. Upaya apa saja yang anda lakukan dalam mencegah pernikahan dini ?

Sosialisasi bahaya menikah dini ke masyarakat

3. Seberapa sering dilakukan sosialisasi bahaya pernikahan dini ?

Sering, kami mensosialisasikan lewat pertemuan di Balai Desa, juga sering lewat acara tahlil, arisan, selapanan dengan begitu tidak memerlukan biaya yang banyak.

4. Apakah pemerintah desa ikut terlibat dalam sosialisasi pernikahan dini ?

Iya ikut, selalu ikut. Dalam sosialisai tersebut Kepala Desa Masuk, kaur kesra masuk, kaur pemerintahan masuk, jadi semuanya masuk karena anggota KPAD pun juga mereka-mereka perangkat desa.

5. Siapa saja yang ikut terlibat dalam sosialisasi pernikahan dini ?

KPAD, pak Siswoyo, pak Dul Ghoni itu selaku kaur kesra kemudian pak Samiyono itu dulu pak Samiyono ketua KPAD dan juga sama Plan

6. Gambar Proses Wawancara



7. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi

